

BUKU I
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2007



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PULAU PUNJUNG
2006



PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 – 2010 perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2007;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2007.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Wilayah Propinsi Sumatera Barat;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Dharmasraya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Inspektorat/Badan/Kantor Kabupaten Dharmasraya;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2006;

19. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2006, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 – 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2007.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2007, yang selanjutnya disebut dengan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2007 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Dharmasraya untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2007.
4. Satuan Kerja perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut dengan SKPD
5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2007, yang selanjutnya disebut Renja-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2007.
6. Rencana Kerja Anggaran Tahun 2007 adalah Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-SKPD Tahun 2007.
7. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Pasal 2

1. RKPD Tahun 2007, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2007 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode

- 1 (satu) tahun yaitu tahun 2007, yang dimulai tanggal 1 Januari 2007 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2007.
2. RKPD Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
 - a. Buku I yaitu sebagaimana dimuat dalam lampiran 1, dan
 - b. Buku II yaitu sebagaimana dimuat dalam lampiran 2, Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

1. RKPD Tahun 2007 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 - 2010 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2006, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2007, yang termasuk dalam arah kebijakan umum, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya.
2. RKPD Tahun 2007 sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi :
 - a. Acuan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2007.
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2007.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2007 :

- a. Pemerintah menggunakan RKPD Tahun 2007 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPRD.
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2007 dalam melakukan pembahasan RKA-SKPD dengan DPRD.

Pasal 5

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.

2. Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati Dharmasraya cq. Bappeda Kabupaten Dharmasraya paling lambat 14 hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
3. Laporan kinerja SKPD menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

Pasal 6

Bappeda menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD Tahun 2007 hasil pembahasan bersama SKPD dengan DPRD sesuai dengan RKPD Tahun 2007.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2006
BUPATI DHARMASRAYA

H. MARLON MARTUA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

H. FEBRI ERIZON, SH
Pembina Utama Muda
Nip. 010 123 030

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR

TAHUN 2006

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2007 merupakan rencana pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2007 dalam bentuk dokumen perencanaan sebagai upaya pencapaian dari visi, misi dan program Bupati Dharmasraya secara bertahap pada tahun 2007 yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 -2010. RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2007 menjadi pedoman/acuan pemerintah daerah, satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2007.

RKPD Kabupaten Dharmasraya tersebut dibagi dalam 2 (dua) buku, yaitu Buku I dan Buku II. Buku I RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2007 menjelaskan prioritas pembangunan daerah beserta sasaran dan arah kebijakan dan fokus pembangunan dan kegiatan prioritas yang akan menjadi fokus untuk pencapaiannya, kerangka makro ekonomi pembangunan, dan kaidah pelaksanaannya. Buku II RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2007 juga menguraikan seluruh program pembangunan Tahun 2007 dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan. RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2007 berlaku sejak Januari sampai dengan Desember 2007.

Penetapan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2007 dengan Peraturan Bupati Dharmasraya diharapkan dapat bermanfaat bagi pencapaian program pembangunan secara terencana dan terarah guna tercapainya percepatan pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya, sehingga dapat sejajar dengan daerah lain.

Pulau Punjung, Mei 2006
Bupati Dharmasraya

H. MARLON MARTUA

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Bab I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tema Pembangunan Tahun 2007	3
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD	3
1.4 Proses Penyusunan RKPD	4
Bab II Kondisi Umum Daerah	6
2.1 Bidang Pemerintahan Daerah	6
2.2 Bidang Sarana dan Prasarana Dasar.....	9
2.3 Bidang Sosial dan Budaya	11
2.4 Bidang Perekonomian Masyarakat	15
Bab III Prioritas Pembangunan Tahun 2007	21
3.1 Peningkatan dan Pengembangan Perekonomian Masyarakat serta Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Angka Pengangguran	21
3.2 Penataan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	24
3.3 Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar (Infrastruktur)	27
3.4 Peningkatan Keamanan dan Penegakan Peraturan Daerah	30
3.5 Peningkatan dan Pemerataan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat	31
Bab IV Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya	36
4.1 Kondisi Ekonomi Makro	
4.2 Tantangan Pokok Ekonomi	
4.3 Arah Kebijakan Ekonomi Makro	

4.4	Proyeksi Ekonomi Tahun 2007	
4.5	Investasi dan Pembiayaan Pembangunan	
Bab V	Kaidah Pelaksanaan	41
Bab VI	Penutup	43

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 20, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2007 sebagai penjabaran dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006-2010. RKPD tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun yang menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, penyusunan RKPD mengacu kepada RPJMD Tahun 2006 – 2010, merupakan penjabaran visi, misi dan program pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya yang memuat 5 agenda pembangunan daerah, yaitu :

1. Mewujudkan pemerintah yang profesional dan penuh pengabdian yang berbasis pada *good governance* dan *clean government*.
2. Mewujudkan masyarakat yang produktif dan memiliki ekonomi yang tangguh.
3. Mewujudkan masyarakat yang sehat dalam lingkungan yang bersih, aman dan nyaman.
4. Mewujudkan masyarakat yang berpendidikan dan menguasai teknologi.
5. Mewujudkan masyarakat religius yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rukun, penuh kedamaian, berbudaya serta didukung oleh supremasi hukum dan stabilitas politik yang handal.

Berdasarkan perkembangan keadaan dan permasalahan yang ada untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah pada tahun 2007 dituangkan dalam 5 program prioritas, antara lain :

1. Peningkatan dan pengembangan perekonomian masyarakat serta pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran.
2. Penataan administrasi pemerintahan dan pelayanan umum.
3. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar (infrastruktur).
4. Peningkatan keamanan dan penegakan peraturan daerah.
5. Peningkatan dan pemerataan pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Prioritas pembangunan tersebut disusun dengan berbagai pertimbangan, antara lain :

1. Berdasarkan potensi dan prospek serta tantangan yang dihadapi daerah.
2. Berpengaruh langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Sebagai kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang memuat kebijakan pembangunan yang terkait dengan kebijakan APBD Kabupaten, dengan mempedomani APBD Propinsi dan APBN yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2007.

1.2 Tema Pembangunan Tahun 2007

Tahun 2008 : Tahun Agroibisnis dan Ketahanan Pangan

- a. *Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)*
- b. *Peningkatan aktivitas perdagangan*
- c. *Peningkatan dan Perbaikan Sarana Perhubungan dan Penerangan*

Dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 – 2010, strategi pembangunan Kabupaten Dharmasraya dibagi dalam 5 (lima) tahun yang dikemas dalam tema-tema tahunan sebagai prioritas. Tahun 2007 ditetapkan tema pembangunan sebagai “**Tahun Peningkatan Investasi dan Produktivitas**”. Tiga prinsip dasar yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, antara lain :

1 Partisipasi Masyarakat

Perencanaan kegiatan pembangunan harus melibatkan partisipasi masyarakat yang disalurkan melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) di seluruh jajaran pemerintahan mulai dari tingkat Nagari, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

2 Tata Pengelolaan yang Baik

Kegiatan Pembangunan perlu dilakukan dengan pengelolaan dan penataan yang efisien dan efektif serta berdaya guna tinggi.

3 Pembangunan yang Berkelanjutan

Kegiatan pembangunan harus memperhatikan dan mempertimbangkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2007 adalah :

1. Sebagai pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2007.
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2007.

1.4 Proses Penyusunan RKPD

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Tahun 2007 melalui tahapan-tahapan, sebagai berikut :

1. Penyiapan draft awal rancangan RKPD Tahun 2007 Kabupaten Dharmasraya oleh Tim Penyusun RKPD. Rancangan awal RKPD Tahun 2007 berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 - 2010, selanjutnya rancangan awal RKPD Tahun 2007 menjadi pedoman bagi SKPD untuk menyusun Renja-SKPD (Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah) Tahun 2007.
2. Renja SKPD Kabupaten dan Renja SKPD Kecamatan disinergikan dan disinkronkan dalam forum SKPD Kabupaten.
3. Menyerasikan RKPD Kabupaten Dharmasraya dengan RKPD Propinsi, khususnya terhadap tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang hasilnya digunakan sebagai bahan untuk pemutakhiran rancangan RKPD Kabupaten.
4. Rancangan awal RKPD Tahun 2007 merupakan hasil forum SKPD dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 yang dilaksanakan pada tanggal 23 dan 24 Maret 2006.

5. Pemutakhiran RKPD Kabupaten berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten.

Adapun RKPD Kabupaten Tahun 2007 disusun menurut sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tema Pembangunan Tahun 2007
- 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD
- 1.4 Proses Penyusunan RKPD

Bab II. Kondisi Umum Daerah

- 2.1 Bidang Pemerintahan Daerah
- 2.2 Bidang Sarana dan Prasarana Dasar
- 2.3 Bidang Sosial dan Budaya
- 2.4 Bidang Perekonomian Masyarakat

Bab III. Prioritas Pembangunan Tahun 2007

- 3.1 Peningkatan dan pengembangan perekonomian masyarakat serta pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran.
- 3.2 Penataan administrasi pemerintahan dan pelayanan umum.
- 3.3 Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar (infrastruktur).
- 3.4 Peningkatan keamanan dan penegakan peraturan daerah.
- 3.5 Peningkatan dan pemerataan pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Bab IV. Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya

- 4.1 Kondisi Ekonomi Makro
- 4.2 Tantangan Pokok Ekonomi
- 4.3 Arah Kebijakan Ekonomi Makro
- 4.4 Proyeksi Ekonomi Tahun 2007
- 4.5 Investasi dan Pembiayaan Pembangunan

Bab V. Rencana Kerja dan Indikasi Program

Bab VI. Kaidah Pelaksanaan

Bab VII. Penutup

BAB II

Kondisi Umum Daerah

2.1. Bidang Pemerintahan Daerah

Pencapaian hasil pembangunan Kabupaten Dharmasraya pada bidang pemerintahan terlihat masih belum optimal, untuk mempercepat pembangunan pada bidang administrasi pemerintahan maka dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 - 2010, merupakan salah satu agenda pembangunan daerah.

Arah pembangunan untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional dan penuh pengabdian ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada publik melalui penyusunan standar dan operasional, menyediakan prasarana dan sarana kerja yang memadai, menyusun struktur organisasi yang solid dan ramping, melakukan pembinaan kepada aparat tentang tugas dan fungsinya serta membangkitkan komitmen aparat.

Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya disusun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK). Kabupaten Dharmasraya menindak lanjutinya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6, Nomor 7, Nomor 8 dan Nomor 9 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas, Struktur Organisasi Tata Kerja Inspektorat

Daerah, Badan dan Kantor dan Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan.

Adapun Instansi yang dibentuk berdasarkan keputusan tersebut terdiri dari :

1. Inspektorat Daerah
2. Sekretariat Daerah dengan 3 Asisten dan 9 Bagian
3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. 10 Dinas Daerah
5. 4 Badan
6. 5 Kantor

Jumlah Pegawai Negeri yang menunjang jalannya roda pemerintahan tahun 2004 berjumlah 2.719 orang terdiri dari :

- Golongan IV sebanyak 105 orang
- Golongan III sebanyak 1.528 orang
- Golongan II sebanyak 721 orang
- Golongan I sebanyak 77 orang

Jumlah ini masih ditambah dengan adanya Pegawai Honorer sebanyak 288 orang.

Jumlah ini dirasakan belum diberdayakan secara optimal. Selain itu, kekurangan personil dan pegawai masih sangat dirasakan pada berbagai unit kerja dan perlu mendapat perhatian serius dengan penambahan personil baru. Latar belakang pendidikan pegawai sangat beragam hampir mencakup semua disiplin ilmu, namun penempatan personil belum sepenuhnya mengacu pada latar belakang pendidikan maupun pengalamannya.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

yang diberlakukan membawa perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah dalam hubungan tersebut diberikan kewenangan dan ruang gerak yang luas dalam menyelenggarakan dan mengelola daerahnya, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan dari tatanan lama menuju tatanan baru tersebut akan membawa konsekuensi logis, menjadi peluang dan sekaligus tantangan. Peluang yang diharapkan adalah semakin berkembangnya dunia kewirausahaan, sedangkan resiko yang terkandung didalamnya adalah pemisahan wilayah secara keruangan, ketegangan antar wilayah serta konflik sosial akibat egoisme daerah.

Kondisi penyelenggaraan pemerintahan/birokrasi belum mengalami perubahan yang signifikan. Permasalahan yang terjadi masih berputar pada persoalan-persoalan rendahnya kinerja sumber daya aparatur, masih terdapatnya penyimpangan, rendahnya tingkat disiplin, sistem kelembagaan (organisasi), dan ketatalaksanaan (manajemen) yang belum memadai sehingga mengakibatkan terjadinya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi beberapa unit kerja.

Permasalahan lain adalah belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang cepat, tepat, murah dan transparan serta tidak diskriminatif. Belum adanya standar pelayanan minimal masing-masing unit kerja, belum optimalnya penggunaan teknologi, informasi untuk pelayanan.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya didukung oleh 4 (empat) Kecamatan dan 21 Nagari serta 109 Jorong, permasalahan yang dihadapi dalam lembaga Nagari secara umum belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah Nagari terlihat dari belum berfungsinya pemberdayaan Nagari seperti penataan lembaga Nagari, pengelolaan administrasi Pemerintahan

Nagari, peningkatan kualitas sumber daya aparatur Nagari, peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan Nagari serta peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan Nagari.

2.2. Bidang Sarana dan Prasarana Dasar

Kabupaten Dharmasraya dengan luas daerah 2.964,13 km² dihubungkan oleh jalan sepanjang 841,20 km, terdiri dari 62,50 km jalan nasional/negara yang membentang dari utara ke selatan, dan 83,50 km jalan propinsi serta 695,2 km jalan kabupaten dengan didukung oleh 114 buah jembatan dengan panjang 1.445,3 m dan jembatan terbanyak terdapat di Kecamatan Sitiung sebanyak 46 buah dengan panjang 617,3 m. Kondisi jalan kabupaten pada tahun 2005 terdapat pada :

- 1 Kecamatan Pulau Punjung, sepanjang 292,80 km terdiri dari jalan aspal 43,30 km, jalan kerikil 81,70 km, dan jalan tanah 167,80 km (dengan kondisi baik sepanjang 45,20 km, sedangkan 44,50 km dalam kondisi sedang dan 178,30 km dalam kondisi rusak).
- 2 Kecamatan Sitiung, sepanjang 135,8 km terdiri dari jalan aspal 32,20 km, jalan kerikil 67,60 km, dan jalan tanah 36 km (dengan kondisi baik sepanjang 30,80 km, sedangkan 11 km dalam kondisi sedang dan 99,50 km dalam kondisi rusak).
- 3 Kecamatan Koto Baru, sepanjang 114 km terdiri dari jalan aspal 42,3 km, jalan kerikil 45,20 km, dan jalan tanah 26,5 km (dengan kondisi baik sepanjang 24,60 km, sedangkan 11,30 km dalam kondisi sedang dan 77,5 km dalam kondisi rusak).
- 4 Kecamatan Sungai Rumbai, sepanjang 152,6 km terdiri dari jalan aspal 27,4 km, jalan kerikil 51,10 km, dan jalan tanah 74,10 km (dengan kondisi baik sepanjang 9,5 km, sedangkan 37,20 km dalam kondisi sedang dan 125,80 km dalam kondisi rusak).

Permasalahan yang ditemui untuk meningkatkan kondisi jalan di Kabupaten Dharmasraya, antara lain :

1. Terbatasnya dana pembangunan dan biaya pemeliharaan jalan yang relatif tinggi mengingat faktor geografis yang bergelombang dan berbukit.
2. Daerah rawan bencana, sehingga sering terjadinya longsor dan banjir yang mengakibatkan banyaknya badan jalan yang rusak.
3. Belum terpadunya penanganan sistem jaringan jalan kabupaten, propinsi dan jalan negara.
4. Belum berjalannya hukum terhadap pelanggaran bagi muatan kendaraan yang melebihi kapasitas sesuai kelas jalan.
5. Masih kurangnya fasilitas dan kelengkapan sarana jalan berupa rambu-rambu lalu lintas, dan sebagainya.

Pengembangan dan pengelolaan prasarana sumber daya air ditujukan untuk pengelolaan sumber daya yang meliputi konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya guna air dalam rangka mewujudkan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat.

Kabupaten Dharmasraya memiliki daerah irigasi seluas 23.596 Ha terdiri dari 72 DI tersebar pada 4 Kecamatan yang ada, dimana Kecamatan Pulau Punjung mempunyai areal irigasi terluas yaitu 18.048 Ha, diiringi Kecamatan Sungai Rumbai seluas 3.073 Ha, Kecamatan Sitiung seluas 2.311 Ha dan Kecamatan Koto Baru seluas 164 Ha. Adanya pembangunan Irigasi Batang Hari diharapkan akan mampu mengairi areal persawahan yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

Permasalahannya adalah belum optimalnya Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, begitu

pula sarana dan prasarana lingkungan seperti drainase mandi, cuci dan kakus (MCK) dan jamban keluarga serta instalasi pembuangan air limbah pada umumnya masih belum menjadi perhatian. Hal ini dapat terlihat dari masih rendahnya cakupan air bersih yang baru mencapai 20% dibandingkan dengan program nasional yang menargetkan tingkat pelayanan air bersih mencapai 60%. Kondisi drainase dan jalan lingkungan juga masih kurang yang dapat dilihat dengan adanya saluran drainase yang tidak berfungsi dengan baik sehingga menimbulkan genangan pada beberapa tempat dan daerah.

Sarana dan prasarana pada fasilitas umum masih belum memadai dimana pasar-pasar yang ada umumnya belum dilengkapi dengan fasilitas seperti tersedianya saluran air bersih, sarana pembuangan sampah, WC umum, drainase pasar dan fasilitas umum lainnya, sedangkan fasilitas umum pada kantor pemerintahan juga masih kurang sekali karena masih memanfaatkan sarana kantor yang sangat terbatas.

2.3. Bidang Sosial dan Budaya

Pembangunan bidang pendidikan terlihat belum memuaskan, ini terlihat pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu memberikan pelayanan secara lebih merata, berkualitas dan terjangkau antara lain :

1. Masih tingginya penduduk buta aksara.
2. Rendahnya cakupan layanan pendidikan bagi anak usia dini.
3. Masih rendahnya partisipasi pendidikan terutama pada pendidikan menengah pertama (SLTP) sampai dengan pendidikan tinggi.

Arah pengembangan pendidikan ditujukan untuk memperluas dan meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi semua masyarakat. Kebijakan peningkatan perluasan dan pemerataan pendidikan antara lain melalui perbaikan dan penyediaan fasilitas layanan

pendidikan berupa pembangunan prasarana dan sarana sekolah, penyediaan fasilitas pendukung, penyediaan beasiswa dan bantuan operasional sekolah dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.

Pendidikan Kabupaten Dharmasraya dilihat dari partisipasi pendidikan menurut jenjang pendidikan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD / MI Tahun 2005 sebesar 105,83 dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD / MI sebesar 92,84. Sedangkan APK SLTP / MTs Tahun 2005 sebesar 69,89 dan APM SLTP / MTs sebesar 54,79. APK SLTA / MA Tahun 2005 sebesar 35,03 dengan APM SLTA / MA sebesar 23,0.

Sedangkan kondisi bangunan SLTP dan SLTA dalam keadaan rusak ringan, namun untuk gedung MTs dan MA keadaannya kurang memadai. Selain upaya untuk meningkatkan pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan juga mendapat perhatian dari pemerintah daerah melalui penambahan tenaga pendidik .

Tahun 2004 terdapat peningkatan jumlah guru SLTP dari 344 orang menjadi 372 orang, dan guru SLTA dari 177 menjadi 205 orang, sedangkan guru SD mengalami penurunan dari 1.182 menjadi 985 orang. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kekurangan guru SD. Jumlah guru SLTP dan SLTA walaupun meningkat namun masih dirasa sangat kurang terutama untuk bidang studi eksakta, bahasa asing, dan kejuruan.

Angka kelulusan pendidikan tahun 2004 terjadi penurunan dari 5.071 orang pada tahun 2003 menjadi 4.910 dan angka kelulusan SD dari 2.874 tahun 2003 menjadi 2.770 tahun 2004, SLTP dari 1.595 tahun 2003 menjadi 1.540 tahun 2004, begitu juga angka kelulusan SLTA juga terjadi penurunan dari 602 orang tahun 2003 menjadi 600 orang tahun 2004. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan terutama gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium beserta peralatan perpustakaan sekolah belum mencapai standar yang harus dipenuhi. Dari 140 jumlah gedung Sekolah Dasar, 68 unit berada dalam kondisi rusak berat dan 46 unit dalam kondisi

rusak ringan, hanya 36 unit dalam kondisi baik sedangkan 2 MI dan SD swasta berada dalam kondisi rusak ringan.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Dharmasraya yang terlayani pada tingkat Taman Kanak - Kanak (TK) terjadi peningkatan dari 2.277 orang pada tahun 2003 menjadi 2.457 orang pada tahun 2004, sedangkan PAUD pada Raudatul Athfal (RA) terjadi penurunan dari 313 orang menjadi 286 orang.

Meskipun beberapa keberhasilan telah dicapai namun masih ditemui beberapa permasalahan antara lain :

1. Masih rendahnya tingkat pemerataan pada pendidikan dasar dan menengah.
2. Masih rendahnya kualitas pendidikan.
3. Belum optimalnya peran serta Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam membantu pengembangan pendidikan.
4. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan non formal.

Pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Dharmasraya secara umum telah mengalami peningkatan dibanding tahun 2003, hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator seperti Usia Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Status Gizi.

Tingkat Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2003 mencapai usia 64,5 tahun dan tahun 2004 mencapai 67 tahun. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat diatas pada umumnya disebabkan oleh pengaruh adanya kebijakan pembentukan pola dan perilaku hidup sehat ditingkat masyarakat melalui upaya Promotif dan Preventif mengenai kesehatan dengan tidak mengesampingkan upaya kuratif.

Peningkatan kinerja kesehatan ini tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah maupun bantuan pemerintah pusat dalam

meningkatkan fasilitas atau jumlah sarana dan prasarana kesehatan seperti Rumah Sakit (RS), Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan lainnya, serta peningkatan kualitas jangkauan pelayanan serta penyediaan obat-obat esensial bagi masyarakat. Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat terlihat melalui :

1. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Rumah Sakit (RS), Puskesmas, Pustu, dan Puskesmas Keliling (Puskeling) di Kabupaten Dharmasraya terdapat 1 (satu) unit RSUD, 8 Puskesmas, 45 unit Pustu, 8 Puskel, dimana jumlah kunjungan Puskesmas mencapai 129.768 pasien dan rawat inap 46.880 pasien serta rawat jalan 16.471 pasien.
2. Peningkatan prasarana dan sarana baru RSUD, Puskesmas, dan Pustu melalui perbaikan gedung kelengkapan peralatan yang dibutuhkan.
3. Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan.

Permasalahan di bidang kesehatan perlu mendapat perhatian pada tahun 2007 terutama pada :

1. Masih rendahnya kualitas kesehatan penduduk yang terlihat dari tingginya angka kematian bayi, balita, dan ibu melahirkan.
2. Rendahnya tingkat gizi masyarakat.
3. Tingginya angka kematian akibat penyakit menular.
4. Belum meratanya jumlah penyebaran, komposisi serta mutu tenaga medis pada setiap Puskesmas.
5. Kurangnya tenaga kesehatan sehingga masih banyak Pustu yang tidak ditempati, hanya dikunjungi secara berkala oleh tenaga kesehatan Puskesmas.

6. Belum Optimalnya Polindes, Posyandu sebagai ujung tombak untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di desa (Jorong dan Nagari).

2.4. Bidang Perekonomian Masyarakat

Pengembangan ekonomi kerakyatan menunjukkan terjadinya peningkatan, dimana pendapatan per kapita Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2003 sebesar Rp. 6.066.640,03,- meningkat menjadi Rp. 6.798.906,53,- pada tahun 2004. Sektor pertanian, serta sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan sektor primer masih mempunyai andil besar dalam memberikan nilai tambah dalam perekonomian Kabupaten Dharmasraya dengan memberikan sumbangan sebesar Rp. 475,70 Milyar. Sektor sekunder meliputi sektor industri pengolahan, sektor listrik, sektor gas dan air bersih serta sektor bangunan mengalami sedikit percepatan yang mampu tumbuh sebesar 5,64%. Sementara sektor tersier yaitu sektor perdagangan, sektor hotel dan restoran, sektor angkutan, sektor komunikasi sektor keuangan, dan sektor jasa hanya memiliki tingkat pertumbuhan 4,67%.

Peran sektor pertanian sampai saat ini masih dominan dalam perekonomian Kabupaten Dharmasraya khususnya pada bidang perkebunan dan merupakan lapangan usaha yang memberikan nilai tambah cukup besar dalam pembentukan PDRB (*Product Domestic Regional Bruto*) dan sektor terbesar yang menyerap tenaga kerja terutama di bidang perkebunan diikuti bidang lain seperti tanaman pangan dan hortikultura. Perkebunan yang berkembang cukup pesat adalah perkebunan kelapa sawit, karet, dan coklat juga komoditi lainnya.

Luas areal sawah Kabupaten Dharmasraya sekitar 27.778 Ha, dengan luas areal yang sudah mempunyai jaringan irigasi, sebagai berikut:

1. Sawah yang berfungsi dengan baik seluas 7.423 Ha

2. Sawah yang belum berfungsi dengan baik seluas 879 Ha
3. Belum ada sawah (tanah kosong) seluas 7.773 Ha

Sedangkan luas areal sawah Kabupaten Dharmasraya yang belum mempunyai jaringan irigasi, sebagai berikut :

1. Sawah yang berfungsi dengan baik seluas 4.837 Ha (termasuk sawah tadah hujan 3.579 Ha)
2. Belum ada sawah (tanah kosong) seluas 7.046 Ha

Jumlah sungai yang ada di Kabupaten Dharmasraya sekitar 100 buah yang pada umumnya dapat dimanfaatkan untuk jaringan irigasi.

Usaha pertanian tanaman pangan yang ditunjukkan dengan produktivitas padi di Kabupaten Dharmasraya tahun 2004 sebesar 4,17 ton / Ha yang mengalami penurunan dibandingkan produksi tahun 2003 sebesar 3,83 ton / Ha. Kondisi ini merupakan produksi paling rendah selama 5 tahun terakhir. Penurunan produksi ini diakibatkan oleh pembangunan irigasi Batang Hari, sehingga banyak lahan yang beralih ke palawija. Penurunan produksi padi ini terdapat di Kecamatan Koto Baru, dan Kecamatan Sitiung sedangkan di Kecamatan Pulau Punjung terjadi peningkatan produksi sebesar 2.465 Ton

Tanaman ubi kayu mendominasi tanaman palawija dengan luas panen 2.287 Ha jauh melebihi luas panen jenis palawija lainnya seperti jagung seluas 732 Ha yang turun sebesar 10,08% dibanding tahun sebelumnya. Penghasil palawija terbesar adalah Kecamatan Koto Baru yang memberikan kontribusi lebih dari 80% terhadap produksi palawija Kabupaten Dharmasraya.

Secara kuantitas produksi buah-buahan di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2004 bervariasi, untuk buah-buahan yang populer seperti Durian dan Duku mengalami penurunan produksi, sementara buah-buahan lain mengalami peningkatan yang pesat seperti Jeruk Siam dan Rambutan, yaitu

1. Durian dari 9.672 ton menjadi 7.394 ton (turun 23,55%)
2. Duku dari 636,5 ton menjadi 230,5 ton (turun 63,79%)
3. Jeruk siam dari 406 ton menjadi 2.259,25 ton (naik 456,47%)
4. Rambutan dari 1.081 ton menjadi 1.675 ton (naik 54,95%)
5. Pisang dari 306 ton menjadi 343 ton (naik 12,1%)
6. Pepaya dari 17 ton menjadi 18 ton (naik 6%)

Jenis tanaman perkebunan rakyat tercatat 3 komoditi yang mengalami peningkatan produksi yaitu :

1. Kelapa dari 702,5 ton menjadi 721,07 ton (naik 2,58%)
2. Pinang dari 2 ton menjadi 3,5 ton (naik 75%)
3. Coklat dari 29,8 ton menjadi 54,02 ton (naik 84,1%)

Sedangkan produksi tanaman kelapa sawit, karet dan kopi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu :

1. Kelapa sawit dari 482.504 ton menjadi 303.891 ton (turun 37,02%)
2. Karet dari 59.431 ton menjadi 49.261,24 ton (turun 17,11%)
3. Kopi 463,50 ton menjadi 439,46 ton (turun 5,19%)

Produksi sektor peternakan cenderung mengalami penurunan populasi kecuali populasi sapi naik sedikit dari 25.720 ekor menjadi 25.756 ekor, sedangkan kerbau mengalami penurunan dari 15.473 ekor menjadi 7.824 ekor dan kambing dari 10.143 ekor menjadi 8.359 ekor. Sementara pada populasi ternak unggas mengalami peningkatan, yaitu :

1. Ayam kampung dari 189.013 ekor menjadi 192.200 ekor (naik 1,68%)
2. Ayam ras dari 135.800 ekor menjadi 145.750 ekor (naik 7,33%)
3. Itik dari 9.504 ekor menjadi 9.956 ekor (naik 4,76%)

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya produksi ikan secara umum mengalami penurunan, kecuali produksi ikan di kolam. Produksi ikan kolam dari 772.52 ton menjadi 776,48 ton (naik 0,51%), sedangkan ikan sawah mengalami penurunan dari 407,338 ton menjadi 150,67 ton, ikan keramba dari 42,73 ton menjadi 12,50 ton dan ikan sungai dari 566,53 ton menjadi 511,96 ton.

Walaupun telah dicapai perkembangan pertanian dalam meningkatkan ekonomi Kabupaten Dharmasraya, namun masih ditemui permasalahan yang perlu ditanggulangi, antara lain :

1. Rendahnya SDM petani dalam pengelolaan usaha tani yang berwawasan agribisnis.
2. Kepemilikan lahan usaha tani yang relatif sempit dan cenderung semakin berkurang dari tahun ke tahun.
3. Belum tertanganinya dengan baik hasil panen dan belum berkembangnya industri hasil pertanian.
4. Rendahnya mutu dan produksi komoditi pertanian karena belum mempergunakan teknologi.
5. Semakin berkurangnya tenaga terdidik untuk memilih bekerja di bidang pertanian.

Pembangunan koperasi dan UKM (usaha kecil dan menengah) telah terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2003 berjumlah 103 unit menjadi 115 unit koperasi. Pertumbuhan KUD (Koperasi Unit Desa) mengalami penurunan dari 45 unit menjadi 44 unit, sedangkan non KUD meningkat dari 58 unit menjadi 71 unit.

Pada tahun 2004 di Kabupaten Dharmasraya tercatat perusahaan yang memiliki Tanda Daftar Perusahaan sebanyak 69 buah, sementara yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan berdasarkan surat izin yang dikeluarkan Dinas Perekonomian Kabupaten Dharmasraya tahun 2004 tercatat ada 4 perusahaan besar, 7 perusahaan menengah dan 48

perusahaan kecil yang melakukan aktivitas dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Dharmasraya.

Perkembangan perekonomian ini ditunjang dengan 3 buah pasar tradisional dan 14 pasar lokal. Industri kecil dan rumah tangga pada tahun 2004 tercatat sebanyak 62 unit, dimana 32 unit (51,61%) bergerak di bidang usaha industri logam, mesin dan kimia dan 14 unit (22,58%) bergerak di bidang usaha industri pertanian, selanjutnya 16 unit (25,91%) bergerak di bidang industri aneka.

Sasaran UKM di Kabupaten Dharmasraya diarahkan pada pembinaan UKM di bidang perawatan sentra industri dan pembinaan UKM di bidang penambahan sentra diarahkan pada sentra batik di Koto Agung Kecamatan Sitiung dan sentra genteng di Pulau Mainan Kecamatan Koto Baru.

Usaha kecil dan menengah dalam pembangunan ekonomi daerah mempunyai peran dalam meningkatkan PDRB Kabupaten Dharmasraya sebagai penyedia lapangan kerja, mendorong pemerataan pendapatan dan menunjang pertumbuhan sektor ekonomi lainnya dan menjadi stabilisator di bidang politik, sosial dan pertahanan keamanan. Usaha kecil dan menengah selama 2 tahun terakhir ini terus berkembang sejalan dengan aktivitas roda pemerintahan Kabupaten Dharmasraya yang baru dimekarkan, namun masih ditemui permasalahan dalam pengembangan koperasi dan UKM, antara lain :

1. Rendahnya kemampuan dan terbatasnya jangkauan pemasaran
2. Rendahnya penguasaan teknologi dan terbatasnya jangkauan produksi
3. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan manajerial dari pengusaha
4. Kurang lengkapnya administrasi dan informasi akuntansi
5. Kecilnya modal usaha, baik modal kerja maupun modal tetap dan rendahnya aksesibilitas pada lembaga keuangan

6. Kemampuan membangun jaringan bisnis yang masih terbatas
7. Umumnya usaha kecil dan menengah beroperasi pada volume produksi di sekitar titik impas, sehingga akumulasi modal dan keuntungan kurang dapat diharapkan.

Selama tahun 2004 pelanggan listrik mencapai 12.812 pelanggan dari berbagai kelas tarif dan menghabiskan 13.068.136 KWH. Pelanggan terbanyak dari golongan rumah tangga (R1) dengan jumlah 20.241 pelanggan, berikutnya dari kelas B1 sebanyak 865 pelanggan dan kelas sosial sebanyak 510 pelanggan serta pelanggan lain yang mengkonsumsi dalam jumlah banyak yaitu perusahaan besar sebanyak 5 pelanggan.

PDAM baru mampu melayani sebagian kecil masyarakat di Kabupaten Dharmasraya. Indikasi ini dapat dilihat dari jumlah unit yang ada yaitu Kecamatan Koto Baru dan Kecamatan Pulau Punjung dengan jumlah pelanggan 155 pelanggan. Unit PDAM di Kecamatan Koto Baru mempunyai 48 pelanggan dengan panjang jaringan 7.414 m dengan air terpakai 5.275 m³ sedangkan unit PDAM di Kecamatan Pulau Punjung mempunyai 107 pelanggan dengan panjang jaringan 12.265 m dengan air terpakai 13.640 m³ pada tahun 2004. Sedangkan dari segi pemakaian air terjadi penurunan baik di Kecamatan Pulau Punjung maupun di Kecamatan Koto Baru.

Berdasarkan kondisi ini, Kabupaten Dharmasraya masih harus bekerja lebih keras agar masyarakat dapat memperoleh air bersih. Permasalahan yang ditemui pada pengembangan air bersih di Kabupaten Dharmasraya, yaitu :

1. Belum optimalnya PDAM untuk meningkatkan pelanggan air bersih.
2. Terjadinya kebocoran-kebocoran jaringan sehingga belum maksimalnya debit air yang dimanfaatkan.
3. Pengelolaan PDAM masih dikelola oleh Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

BAB III

Prioritas Pembangunan Tahun 2007

Sesuai dengan visi dan misi Daerah yang dijabarkan dalam RPJM Kabupaten Dharmasraya tahun 2006 - 2010, serta berdasarkan perkembangan kondisi serta permasalahan yang ada dengan memperhatikan sumber daya yang terbatas, maka RKPD Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2007 difokuskan kepada upaya untuk mengatasi permasalahan yang sangat mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan melanjutkan pembangunan tahun sebelumnya.

Prioritas-prioritas pembangunan tersebut adalah :

3.1 Peningkatan dan Pengembangan Perekonomian Masyarakat serta Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Angka Pengangguran

a. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka pengembangan dan peningkatan perekonomian masyarakat serta pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran, adalah :

1. Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha sektor pertanian terutama perkebunan, sektor perdagangan, sektor hotel dan restoran, sektor keuangan, sektor pengolahan, sektor bangunan dan sektor-sektor lain yang dapat mendorong dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Meningkatnya produktifitas tenaga kerja dan pendapatan tenaga kerja.
3. Meningkatnya produktifitas dan nilai produksi koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
4. Meningkatnya produktifitas dan nilai produksi industri rumah tangga (*Home Industry*).
5. Meningkatnya potensi ekonomi daerah dan fasilitasi penanaman modal.

b. Arah dan kebijakan

Pengembangan dan peningkatan perekonomian masyarakat serta pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran yang bertujuan untuk mendorong berkembangnya usaha yang mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dan mempunyai nilai tambah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk mewujudkan hal itu, kebijakan peningkatan perekonomian masyarakat serta pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi, produktifitas, kualitas dan nilai tambah usaha pertanian yang meliputi : perkebunan, tanaman pangan, peternakan dan budidaya perikanan melalui :
 - a Pengembangan kawasan sentra produksi komoditi unggulan pertanian meliputi : tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan dan perikanan darat.
 - b Pengembangan dan peningkatan pemanfaatan teknologi baik dalam budidaya maupun pasca panen atau pengolahan hasil pertanian.
2. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia pertanian, pelaku usaha kecil dan menengah melalui :
 - a Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dan pelaku usaha kecil dan menengah.

- b Penguatan sistem penyuluhan pertanian.
- 3. peningkatan promosi dan sumber modal melalui penyediaan informasi dan memfasilitasi petani, pelaku usaha kecil dan menengah bermitra dengan pelaku usaha menengah dan besar.
- 4. Penguatan kelembagaan pertanian, kelembagaan usaha koperasi, usaha kecil dan menengah melalui :
 - a Pemantapan dan peningkatan kelembagaan pertanian.
 - b Pembina dan pengembangan kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah.
- 5. Peningkatan dukungan terhadap UKM yang bergerak di sektor potensial dan mempunyai prospek untuk dikembangkan seperti agribisnis dan agro industri melalui :
 - a Dukungan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
 - b Dukungan sarana dan prasarana dalam peningkatan pelayanan aparaturnya dan kelembagaan koperasi.
 - c Dukungan bagi pengembangan komoditi unggulan.

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai sasaran tersebut tercantum pada Bab 1, Bab 2, Bab 3 dan Bab 4 Buku II RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2007 dengan fokus pembangunan dan kegiatan prioritas sebagai berikut :

1. Pengembangan agribisnis dan agro industri.
2. Pengembangan penangkaran pertanian dan perikanan.
3. Peningkatan SDM petugas penyuluhan pertanian.
4. Pengembangan perkoperasian serta Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
5. Pengembangan industri kecil dan rumah tangga.
6. Pengentasan Kemiskinan.
7. Pengembangan potensi ekonomi daerah.

8. Peningkatan kemampuan pengelola dan aparatur pelayanan koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

3.2 Penataan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

a. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai pada penataan administrasi pemerintahan dan pelayanan umum, adalah :

1. Terselenggaranya aparatur pemerintah yang bersih, profesional dan bertanggung jawab
2. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efisien dan efektif melalui peningkatan kemampuan kelembagaan
3. Terselenggaranya pelayanan publik yang cepat, murah dan transparan.

b. Arah dan kebijakan

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Government and Clean Government*), maka administrasi pemerintahan mempunyai peranan penting dalam menata birokrasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Arah kebijakan terwujudnya penataan administrasi pemerintahan dan pelayanan umum yang baik, dilakukan melalui upaya :

1. Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) masing-masing unit kerja yang dilaksanakan melalui :
 - a Penyempurnaan sistem kelembagaan yang efektif, ramping, fleksibel berdasarkan prinsip *good governance*.
 - b Penyempurnaan tatalaksana dan hubungan kerja antar lembaga.

- c Penyusunan sistem administrasi pendukung dan kearsipan yang efektif dan efisien.
2. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan yang dilaksanakan melalui :
- a Penataan kembali sumberdaya aparatur sesuai dengan kebutuhan serta perbaikan distribusi pegawai.
 - b Penyempurnaan sistem manajemen pengelolaan sumber daya aparatur.
 - c Peningkatan kompetensi sumber daya apatur.
 - d Penyempurnaan sistem dan kualitas materi penyelenggaraan diklat PNS.
 - e Penyempurnaan berbagai peraturan dan kebijakan manajemen kepegawaian.
 - f Penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada setiap lini dan kegiatan pemerintahan.
3. Peningkatan kesejahteraan pegawai pemerintah dan pemberlakuan sistem karir berdasarkan prestasi yang dilaksanakan melalui :
- a Peningkatan derajat kesehatan aparatur daerah.
 - b Penyiapan PNS yang akan menghadapi purna tugas.
 - c Penyempurnaan sistem manajemen pengelolaan sumber daya aparatur terutama sistem karir.
4. Peningkatan penegakan sistem dan budaya birokrasi yang profesional melalui pembinaan dan pengawasan melekat yang dilaksanakan melalui :
- a Peningkatan intensitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal eksternal dan pengawasan melekat.
 - b Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, transparan dan bertanggung jawab.

- c Peningkatan SDM pemeriksa yang profesional.
 - d Peningkatan penerapan pengawasan berbasis kinerja.
 - e Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja dan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan.
5. Peningkatan kerjasama yang sinergis antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memperkecil kesenjangan ekonomi, sosial dan budaya dalam masyarakat yang dilaksanakan melalui:
- a Peningkatan upaya untuk menghilangkan hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
 - b Pemantapan koordinasi pembinaan pelayanan publik dan pengembangan kualitas aparat pelayanan publik.
 - c Peningkatan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan publik.
6. Peningkatan koordinasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten baik di Kecamatan maupun antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan melalui :
- a Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
 - b Koordinasi antar unit kerja terkait.
7. Peningkatan kerjasama antar daerah yang dilaksanakan melalui :
- a Peningkatan koordinasi dan kerjasama pembangunan antar daerah dalam Kabupaten Dharmasraya.
 - b Peningkatan koordinasi dan kerjasama pembangunan antar daerah luar Kabupaten Dharmasraya di bawah koordinasi pemerintah kabupaten dan pemerintah propinsi.
 - c Pengembangan informasi dan kebijakan kerjasama antar daerah.

Kebijakan tersebut tercantum dalam Bab 6, Bab 7, Bab 8 dan Bab 9 Buku II RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2007 dengan fokus pembangunan dan prioritas kegiatan sebagai berikut :

1. Program penyusunan dokumen perencanaan daerah.
2. Program peningkatan pelayanan administrasi dan kesejahteraan pegawai.
3. Program peningkatan kualitas aparatur daerah.
4. Program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
5. Program pengembangan perencanaan daerah.
6. Program pengendalian dan evaluasi kinerja program/kegiatan.
7. Program pendayagunaan pelaksanaan pengawasan.
8. Program pemberdayaan Kecamatan dan Nagari.

3.3 Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar (Infrastruktur).

a. Sasaran

Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah, peningkatan ekonomi masyarakat serta pengembangan daerah terisolir perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana fisik yang memadai. Sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar (infrastruktur) di Kabupaten Dharmasraya secara rinci, adalah :

1. Meningkatnya kemantapan jalan dan jembatan.
 - a Jalan negara 88%, jalan propinsi 80%, jalan Kabupaten yang diaspal menjadi 40%.
 - b Kemantapan jembatan pada jalan negara menjadi 90%, jembatan pada jalan propinsi menjadi 80% dan jembatan pada jalan kabupaten menjadi 60%.

- 2 Terwujudnya kelancaran arus transportasi barang dan penumpang perhubungan darat dan sungai.
- 3 Tersedianya pemenuhan kebutuhan rumah sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- 4 Meningkatnya lingkungan pemukiman dan prasarana pemukiman.
- 5 Terdatanya kawasan rawan bencana.
- 6 Terwujudnya dan tersedianya jaringan irigasi pertanian.
- 7 Terbinanya organisasi P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air).
- 8 Terkelolanya daerah aliran sungai secara terpadu.
- 9 Terlaksananya pengembangan pariwisata dan budaya.

b. Arah dan kebijakan

Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar (infrastruktur) merupakan salah satu pendukung dalam pembangunan daerah, khususnya pembangunan ekonomi dalam kelancaran transportasi. Arah kebijakan pada peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar (infrastruktur) tahun 2007 dilakukan melalui upaya sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan melalui:
 - a. Peningkatan jalan Nagari sepanjang 50 km.
 - b. Pembangunan jalan Kabupaten sepanjang 20 km.
 - c. Peningkatan jalan Kabupaten sepanjang 70 km.
 - d. Pembangunan jembatan sebanyak 8 buah.
2. Peningkatan dan pemanfaatan irigasi dilakukan melalui :
 - a. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lain, berupa :

1. Pemeliharaan rutin jaringan irigasi yang telah ada setiap tahunnya.
 2. Pembangunan daerah irigasi baru sebagai upaya meningkatkan produksi padi.
 3. Rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak.
 4. Pembinaan organisasi P3A yang ada di Kabupaten Dharmasraya setiap tahunnya.
 5. Penanggulangan kerusakan irigasi tersier akibat bencana alam yang terjadi.
- b. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, embung dan sumber air lainnya berupa penanggulangan kerusakan akibat bencana alam, prasarana pengairan.
 - c. Pengendalian banjir dan pengamanan tebing sungai akibat banjir.
3. Peningkatan kualitas lingkungan pemukiman.
 4. Pengembangan pariwisata dan budaya.

Kebijakan tersebut diatas tercantum dalam Bab 5 Buku II RKPД Kabupaten Dharmasraya Tahun 2007 dengan fokus pembangunan dan prioritas kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih untuk masyarakat.
2. Peningkatan kualitas lingkungan pemukiman yang tertata dengan baik, bersih, sehat dan aman.
3. Peningkatan perumahan rakyat layak huni terutama di pedesaan bagi masyarakat miskin.
4. Peningkatan sarana dan prasarana dalam meningkatkan, menumbuhkan perekonomian masyarakat serta menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
5. Program peningkatan, perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi.

6. Program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu.

3.4 Peningkatan Keamanan dan Penegakan Peraturan Daerah

a. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai pada peningkatan keamanan dan penegakan peraturan daerah tahun 2007 dilakukan melalui :

1. Terciptanya ketataan, ketertiban dan keamanan yang mantap dalam pembangunan.
2. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dan aparat terhadap peraturan daerah.
3. Tertatanya produk hukum dan sistem hukum daerah yang aspiratif dan akomodatif yang mengacu kepada peraturan/produk hukum lebih tinggi dan mewadahi nilai-nilai sosial budaya yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.
4. Adanya dokumentasi dan informasi tentang produk hukum daerah.

b. Arah dan kebijakan

Untuk mencapai peningkatan keamanan dan penegakan peraturan daerah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2007 dilakukan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Pembangunan produk hukum daerah yang dapat menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pembangunan.

2. Penyuluhan hukum dan sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat.

Kebijakan tersebut tercantum dalam Bab 11, Bab 12, Bab 18, Bab 19 dan Bab 20 Buku II RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2007 dengan fokus pembangunan dan prioritas kegiatan sebagai berikut :

1. Pembinaan, perencanaan, peningkatan, dan pengembangan produk hukum daerah.
2. Peningkatan sarana dan prasarana serta dokumen dan informasi hukum daerah/peraturan daerah.
3. Peningkatan kesadaran hukum.
4. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum.

3.5 Peningkatan dan Pemerataan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat

a. Sasaran

Sasaran peningkatan dan pemerataan pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tahun 2007 khususnya bidang pendidikan diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, melalui peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas. Sasaran yang ingin dicapai tersebut adalah :

1. Meningkatnya jumlah anak usia 4-6 tahun yang terlayani oleh lembaga pendidikan anak usia dini menjadi 35%.
2. Meningkatnya angka partisipasi sekolah.
 1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD / MI / Paket A menjadi 94,5%.

2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP / MTs / Paket B menjadi 67%.
3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA / MA / Paket C menjadi 28%.
4. Meningkatnya angka melanjutkan sekolah ke Perguruan Tinggi.
3. Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan sesuai dengan standar yang diharapkan.
4. Meningkatnya relevansi pendidikan terutama sekolah kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja.
5. Meningkatnya penyelenggara pendidikan non formal bagi peningkatan keterampilan generasi muda.

a. Sasaran

Sasaran pembangunan kesehatan tahun 2007 diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang berkualitas terutama pada penduduk miskin dan daerah terlantar. Secara rinci sasaran pembangunan kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya masyarakat yang memperoleh pelayanan kesehatan dari puskesmas, pusku dan rumah sakit maupun tenaga bidan.
2. Meningkatnya persentase keluarga yang hidup bersih dan sehat.
3. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular.
4. Menurunnya prevalensi gizi buruk pada balita.
5. Meningkatnya sarana dan ketersediaan obat-obat esensial.

b. Arah dan kebijakan

Untuk mewujudkan masyarakat yang berpendidikan, maka pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan kualitas pelayanan pendidikan. Secara rinci arah dan kebijakan pembangunan pada peningkatan pemerataan pendidikan, dilakukan melalui upaya :

1. Peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan dilaksanakan melalui :
 - a Peningkatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan bagi anak usia dini dengan dukungan penyediaan kurikulum, bahan belajar dan peningkatan jumlah dan mutu tenaga didik.
 - b Penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun dengan penekanan pada pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dukungan biaya operasional sekolah untuk mengurangi beban siswa, pemberian insentif pada tenaga pendidik dan bantuan beasiswa.
 - c Peningkatan pemberantasan buta huruf bagi penduduk usia 10 tahun keatas dengan peningkatan intensitas kelompok belajar.
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dilakukan melalui :
 - a Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan.
 - b Penyediaan sarana dan prasarana pendukung peningkatan seperti : perpustakaan, laboratorium dan sarana olahraga.
3. Peningkatan kesejahteraan guru dilaksanakan melalui :
 - a. Pemberian insentif kegiatan mengajar bagi tenaga pendidik.

- b. Pemberian insentif untuk transportasi dan perumahan.
4. Peningkatan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dilakukan melalui :
- a. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan kejuruan dengan menyelenggarakan pendidikan menengah kejuruan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.
 - b. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan non formal untuk meningkatkan keterampilan dalam rangka mengurangi pengangguran.

Kebijakan tersebut tercantum dalam Bab 14, Bab 15, Bab 16, dan Bab 17 Buku II RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2007 dengan fokus pembangunan dan prioritas kegiatan sebagai berikut :

1. Pendidikan anak usia dini.
2. Penuntasan wajib belajar 9 tahun.
3. Pembinaan pemuda dan olahraga.
4. Penyelenggaraan dan pembinaan pariwisata dan budaya lainnya.
5. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar.
6. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.
7. Peningkatan kualitas pendidikan menengah.
8. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah.
9. Penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal.
10. Bantuan pendidikan keagamaan.

Dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka arah kebijakan pembangunan kesehatan ditujukan kepada :

1. Peningkatan, pemerataan dan keterjangkaunan pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui :

- a Peningkatan jangkauan pelayanan puskesmas dan rumah sakit dengan melengkapi sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga medis dan non medis.
 - b Pengembangan jaminan kesehatan bagi masyarakat dengan melanjutkan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan Pustu.
2. Peningkatan kualitas kesehatan yang dilaksanakan melalui :
- a Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.
 - b Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar seperti promosi kesehatan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular dan pelayanan kesehatan dasar.
3. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat yang dilaksanakan melalui :
- a Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat dengan meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
 - b Peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat dengan mengembangkan peran serta masyarakat seperti posyandu dan UKS.

Kebijakan tersebut tercantum dalam Bab 10 Buku II RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2007 dengan fokus pembangunan dan prioritas kegiatan sebagai berikut :

1. Upaya kesehatan masyarakat.
2. Pencegahan pemberantasan penyakit menular.
3. Perbaikan gizi masyarakat.
4. Peningkatan dan rehab gedung kesehatan.

5. Peningkatan profesionalisme petugas kesehatan.

BAB IV

Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya

4.1 Kondisi Ekonomi Makro

Secara umum perekonomian Kabupaten Dharmasraya mengalami pertumbuhan positif yang ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan seluruh sektor ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan PDRB (*Product Domestic Regional Bruto*) tahun 2004 berdasarkan harga berlaku dibandingkan pada tahun 2003 selama 1 tahun hampir mengalami peningkatan 12,78 % dari Rp. 967.259,02 menjadi Rp. 1.090.904,95 pada tahun 2004, sedangkan secara riil berdasarkan harga konstan pada tahun 2004 mengalami peningkatan dari tahun 2003 sebesar 4,66% dengan nilai PDRB tahun 2003 sebesar Rp. 763,72 Milyar dan tahun 2004 mencapai Rp. 799,31 Milyar.

Peningkatan kinerja ekonomi pada periode 2003 - 2004 dilihat dari pertumbuhan dan distribusi PDRB menurut lapangan usaha mengalami peningkatan yang cukup berarti. Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha pada tahun 2003 sebesar 4,47% meningkat menjadi 4,66% pada tahun 2004. hal ini mengidentifikasi potensi yang cukup besar dalam pengembangan perekonomian Kabupaten Dharmasraya. Jika dicermati pertumbuhan pergerakan perekonomian Kabupaten Dharmasraya menunjukkan trend yang semakin meningkat menuju ke arah pertumbuhan positif dibanding tahun sebelumnya.

Pertumbuhan positif pada tahun 2003 adalah sektor perdagangan sebesar 7,42%, sektor angkutan sebesar 5,73%, sektor keuangan sebesar 5,20%, sektor industri sebesar 4,79%, sektor pertambangan

sebesar 1,64%, dan sektor jasa sebesar 2,27%. Sedangkan sektor pertanian serta sektor listrik dan air mengalami penurunan masing-masing sebesar 3,67% dan 8,90%.

4.2 Tantangan Pokok Ekonomi

1. Menurunkan jumlah penduduk miskin. Pembangunan ekonomi akan terus didorong agar mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan mengurangi jumlah penduduk miskin yang jumlahnya relatif besar. Pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Dharmasraya masih belum mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai untuk menekan angka pengangguran terbuka yang jumlahnya relatif besar dan berada diatas angka nasional sebesar 10.8%.
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan upaya peningkatan investasi dan revitalisasi pertanian dengan pengembangan agro industri serta pengembangan ketahanan pangan. Kondisi saat ini secara nasional yang belum kondusif memberikan dampak kepada kegiatan investasi terutama dari PMDN.
3. Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok khususnya beras karena masih banyak penduduk miskin yang mempunyai daya beli terhadap kebutuhan pokok sangat rendah dan perlu mendapat perhatian yang lebih serius.

4.3 Arah Kebijakan Ekonomi Makro

Dalam tahun 2007, kebijaksanaan ekonomi makro Kabupaten Dharmasraya diarahkan untuk meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha sektor pertanian terutama perkebunan, sektor perdagangan, sektor hotel dan restoran, sektor keuangan, sektor pengolahan, sektor bangunan dan sektor-sektor lain yang dapat mendorong dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatnya produktifitas tenaga kerja dan pendapatan tenaga kerja, meningkatnya produktifitas dan nilai produksi koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan

meningkatnya produktifitas dan nilai produksi industri rumah tangga (*Home Industry*), serta meningkatnya potensi ekonomi daerah dan fasilitasi penanaman modal.

4.4 Proyeksi Ekonomi Tahun 2007

Dengan kebijakan ekonomi makro diatas dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan pembangunan ke depan, maka prospek ekonomi tahun 2007 adalah sebagai berikut :

1. Menurunkan jumlah penduduk miskin dari 10.346 jiwa menjadi 5.173 jiwa dan pengangguran terbuka dari 22.100 jiwa menjadi 15.400 jiwa pada tahun 2007.
2. Mendorong peningkatan produksi, produktifitas, kualitas dan nilai tambah usaha pertanian yang meliputi : perkebunan, tanaman pangan, peternakan dan budidaya perikanan.
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pertanian, pelaku usaha kecil dan menengah.
4. Meningkatkan promosi dan sumber modal melalui penyediaan informasi dan memfasilitasi petani, pelaku usaha kecil dan menengah bermitra dengan pelaku usaha menengah dan besar.
5. Meningkatkan penguatan kelembagaan pertanian, kelembagaan usaha koperasi, usaha kecil dan menengah.
6. Meningkatkan dukungan terhadap UKM yang bergerak di sektor potensial dan mempunyai prospek untuk dikembangkan seperti agribisnis dan agro industri.

4.5 Investasi dan Pembiayaan Pembangunan

Pembiayaan pembangunan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, maka dari itu pencapaian pertumbuhan ekonomi perlu didukung dengan peningkatan investasi. Sumber utama investasi berasal dari sektor swasta, pemerintah dan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih diharapkan bisa lebih berperan dengan regulasi

yang dapat menciptakan iklim yang sehat untuk tumbuh dan berkembangnya investasi di daerah.

Gambaran yang jelas mengenai pendapatan dan alokasi belanja daerah pada dasarnya dapat dilihat dengan alokasi anggaran di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Pada pembahasan Bab ini juga digambarkan target dan proyeksi Pendapatan dan Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya untuk tahun 2006.

Ketentuan tentang pendapatan daerah sudah diatur melalui Undang-undang Nomor 34 Tahun 2002 yang memuat sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak Rp. 8.232.781.000,-.

Tabel 4.1

Dana Perimbangan APBD Tahun 2006

Sumber PAD Perimbangan	Jumlah	Ket
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Rp. 14.269.388.864,-	
Dana Alokasi Umum	Rp. 196.311.000.000,-	
Dana Alokasi Khusus	Rp. 25.420.000.000,-	
Dana Bagi Hasil Propinsi	Rp. 7.451.876.858,-	
TOTAL	Rp. 243.452.265.722,-	

Sedangkan sumber pendapatan yang lain adalah berasal dari pendapatan lain-lain yang sah, yang diperkirakan berjumlah Rp.2.500.000.000,- Untuk dana perimbangan pada APBD tahun 2006 berjumlah Rp.243.452.265.722,- Jumlah dana ini meningkat sebesar Rp. 50.233.502.008,- dibandingkan tahun 2005. Dana perimbangan APBD Tahun 2006, yang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 4.1.

APBD Tahun 2006 Kabupaten Dharmasraya berdasarkan jenis belanja dapat dirinci sebagai berikut :

1. Jenis Belanja :

- a. Aparatur Daerah
- b. Pelayanan Publik

2. Jenis Penggunaan :

- a. Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasional
- b. Belanja Modal
- c. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
- d. Belanja Tak Tersangka

Jenis belanja tersebut dapat dirinci pada Alokasi Belanja per unit kerja menurut Sumber dan Jenis Belanja. Salah satu tujuan pemerintah daerah yang berkaitan dengan keuangan daerah adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk meningkatkan PAD ini ada 2 (dua) program prioritas yang dilaksanakan yaitu :

1. Memperbaiki sistem pemungutan pajak dan retribusi

Struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 ditargetkan dari pajak dan retribusi daerah memiliki potensi yang paling besar dalam pemenuhan target PAD dengan penataan sistem yang lebih baik.

Untuk memperbaiki sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya perlu melakukan beberapa pembenahan dan peningkatan yang menyangkut :

a. Intensifikasi objek

Pajak dan retribusi daerah merupakan penyumbang terbesar pada penerimaan PAD Kabupaten Dharmasraya, dimana realisasi penerimaan PAD dari Pajak dan retribusi daerah tahun 2006 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan belum

optimalnya pengelolaan potensi, objek dan perlunya intensifikasi terhadap objek.

Intensifikasi terhadap objek pajak dan retribusi daerah dilakukan dalam bentuk :

1. Melaksanakan pemeriksaan terhadap sektor / bidang yang pencapaiannya masih rendah.
2. Peningkatan penyuluhan dan pelayanan kepada objek pajak yang dilakukan melalui penyempurnaan sistem informasi dan program pelayanan.
3. Penyempurnaan sistem manajemen sumber daya manusia dengan menerapkan sistem pengukuran kinerja.
4. Memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak dan pengurangan tingkat kepuasan wajib pajak.

b. Ekstensifikasi objek

Ekstensifikasi objek pajak dan retribusi bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah, terutama yang bersumber dari pajak dan retribusi. Pada tahun 2006 sumber pajak berasal dari pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak sarang burung walet.

Sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang ada saat ini dan melihat potensi daerah, sangat memungkinkan dilakukan penambahan beberapa objek pajak dan retribusi. Disamping penambahan objek pajak dan retribusi, diperlukan juga adanya pendataan objek untuk mengetahui tingkat kepatuhan dari para wajib pajak. Dengan adanya pendataan ini akan diperoleh gambaran terhadap pencapaian target penerimaan daerah dari pajak dan retribusi. Pendataan objek ini juga akan menghasilkan pemutakhiran data sekaligus memberikan indikasi dan potensi wajib pajak baru dalam meningkatkan PAD.

2. Membentuk Perusahaan Daerah

Kabupaten Dharmasraya memiliki potensi yang bisa dikembangkan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa dari potensi yang apabila secara profesional dikelola secara langsung akan membawa pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya.

Beberapa potensi yang memiliki peluang untuk dikelola secara profesional, dengan membentuk usaha-usaha produktif yang nantinya akan ditampung dalam bentuk perusahaan daerah, potensi-potensi tersebut meliputi :

- b. Bidang Perkebunan
- c. Bidang Pertambangan
- d. Pengelolaan sumber air minum
- e. Rumah Sakit
- f. Jasa keuangan
- g. Listrik

BAB V

Kaidah Pelaksanaan

Untuk tercapainya program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2007, perlu menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat dan pihak swasta.

Pelaksanaan kegiatan disyaratkan pada pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan baik dalam satu program ataupun antar program, dalam satu instansi atau antar instansi dengan tetap memperhatikan tugas-tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing satuan kerja tersebut, melalui forum Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, dan forum SKPD tingkat Kabupaten maupun Musrenbang kabupaten, Musrenbang Propinsi dan Musrenbang Nasional

RKPD tahun 2007 merupakan acuan dan pedoman bagi pemerintah daerah di Kabupaten, Kecamatan, Nagari dan masyarakat serta pihak swasta dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Pelaksanaan kegiatannya perlu ditetapkan dalam kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah dan masyarakat serta pihak swasta berkewajiban melaksanakan program-program RKPD Tahun 2007 dengan sebaik-baiknya.
2. RKPD Tahun 2007 bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun

kebijakan publik baik yang berupa kerangka regulasi maupun berupa kerangka anggaran dalam APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN tahun 2007.

3. SKPD perlu membuat Renja-SKPD Tahun 2007 yang memuat uraian tentang penggunaan APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN Tahun 2007, berupa program dan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing SKPD.
4. Bappeda Kabupaten mengkoordinir Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, dan forum SKPD melalui Musrenbang kabupaten dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
5. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam perencanaan dan perumusan kebijakan melalui forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten Tahun 2007 sehubungan dengan pendanaan pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan berdasarkan rancangan dan peran serta masyarakat yang pendanaannya dibiayai oleh masyarakat luas dan dunia usaha, kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Akhir tahun anggaran 2007, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan terhadap sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN Tahun 2007 serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Setiap SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya harus melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan serta melakukan tindakan koreksi yang diperlukan serta melaporkan secara berkala pelaksanaan program kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

Penutup

Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2007 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 - 2010. Sedangkan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun dan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2007. RKPD Kabupaten Dharmasraya tersebut dibagi dalam 2 (dua) buku, yaitu Buku I dan Buku II.

Buku I RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2007 menjelaskan 1) Prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi fokus program-program tahun 2007 beserta sasaran dan arah kebijakan dan program untuk pencapaiannya, 2) Kerangka makro ekonomi pembangunan, dan 3) Kaidah pelaksanaannya.

Buku II RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2007 juga menguraikan seluruh program pembangunan Tahun 2007 dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan. RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2007 berlaku sejak Januari sampai Desember 2007. Bupati bersama penyelenggara pemerintahan (Satuan Kerja Perangkat Daerah) akan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan program yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2007.

Fokus Pembangunan dan Kegiatan Prioritas Peningkatan dan Pengembangan Perekonomian Masyarakat serta Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Angka Pengangguran

No	Fokus Pembangunan/ Kegiatan Prioritas	Program Pembangunan	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp.)	
				APBD	APBN/ APBD Prop.
1.	Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri	a. Pengembangan agribisnis	Dinas Pertanian dan Kehutanan		
	1. Penataan kemitraan sistem usaha pertanian			100.000.000	
	2. Pengembangan agribisnis sapi potong			275.000.000	
	3. Pengembangan agribisnis padi sawah			100.000.000	
	1. Penertiban perizinan	b. Penataan perizinan usaha industri dan perdagangan	Dinas Pertanian dan Kehutanan	30.000.000	
	2. Pembinaan usaha industri kecil dan menengah				
2.	Pengembangan Industri Kecil dan Rumah Tangga	a. Pengembangan Koperasi dan UKM	Dinas Perekonomian		
	1. Pengembangan kelembagaan sumber daya pengelolaan koperasi dan UKM			20.000.000	

	2. Diklat Pengurus dan Karyawan koperasi			50.000.000	
	1. Penumbuhan usaha kondusif bagi koperasi dan UKM	b. Pemberdayaan perekonomian kerakyatan	Dinas Perekonomiamn	75.000.000	
3.	Peningkatan Ketahanan Pangan. 1. Pengembangan perikanan budidaya (budidaya kolam dan keramba) 2. Peningkatan intensifikasi pertanaman (PIP) padi sawah	a. Pengembangan ketahanan pangan	Dinas Pertanian dan Kehutanan	275.000.000 100.000.000	
	JUMLAH			1.025.000.000	0

Fokus Pembangunan dan Kegiatan Prioritas Penataan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

No	Fokus Pembangunan/ Kegiatan Prioritas	Program Pembangunan	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp.)	
				APBD	APBN/ APBD Prop.
1.	Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 1. Pemeriksaan rutin 2. Monitoring Pengawasan	a. Pendayagunaan pelaksanaan pengawasan	Badan Pengawas Daerah	356.160.000 45.000.000	
2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. Penyelenggaraan Musrenbang 2007 dan Penyusunan RKPD Tahun 2008	a. Penyusunan dokumen perencanaan daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	68.879.350	
	1. Penyusunan Buku Kabupaten dan Nagari dalam angka serta PDRB Tahun 2006	a. Pengembangan data base daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	155.561.700	
	1. Penyusunan SIMPEG/ SIMKRI 2. Pelaksanaan rekrutmen CPNSD Tahun 2007	b. Penataan manajemen sumber daya aparatur	Badan Kepegawaian Daerah	107.197.500 139.342.500	

3.	Peningkatan Kemampuan Pemerintah dan Nagari				
	1. Penegasan Batas Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Solok Selatan	a. Penataan batas administrasi wilayah	Bagian Tata Pemerintahan Setdakab	230.000.000	
	2. Pembentukan LPPKN	b. Pengembangan kelembagaan pemerintahan nagari	Bagian Tata Pemerintahan Setdakab	30.000.000	
	3. Pensertifikatan tanah Pemda	c. Pengamanan set daerah	Bagian Tata Pemerintahan Setdakab	50.000.000	
	JUMLAH			1.182.141.050	0

Fokus Pembangunan dan Kegiatan Prioritas Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar (Infrastruktur)

No	Fokus Pembangunan/ Kegiatan Prioritas	Program Pembangunan	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp.)	
				APBD	APBN/ APBD Prop.
1.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi 1. Rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi dan embung 2. Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi	a. Pengembangan dan pengelolaan pengairan b. Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Dinas PU dan Perhubungan	900.000.000 2.000.000.000	992.000.000 640.000.000
2.	Pengendalian Banjir dan Pengamanan Sungai 1. Normalisasi dan penanggulangan kerusakan alur sungai	a. Normalisasi dan penanggulangan kerusakan alur sungai	Dinas PU dan Perhubungan	1.700.000.000	8.118.000
3.	Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan, Menumbuhkan Perekonomian Masyarakat serta Menekan Angka Kemiskinan dan Pengangguran		Dinas PU dan Perhubungan		

	1. Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan	a. Peningkatan, pemeliharaan jalan dan jembatan		42.350.000	9.900.000
4.	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Air Limbah 1. Pengembangan jaringan air bersih	a. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Dinas PU dan Perhubungan	3.300.000	
	2. Pembangunan jaringan drainase pada 4 lokasi 3. Pembangunan sarana dan prasarana persampahan	b. Pembangunan jaringan drainase	Dinas PU dan Perhubungan	6.000.000.000 2.200.000.000	
5.	Pembangunan Perumahan dan Pemberdayaan Komunitas perumahan 1. Peningkatan jalan pedesaan	a. Peningkatan jalan pedesaan	Dinas PU dan Perhubungan	2.000.000.000	
	2. Pembangunan pasar pada 6 lokasi	b. Pembangunan jaringan drainase	Dinas PU dan Perhubungan	7.200.000.000	
	3. Pembangunan gedung olah raga	c. Pembangunan sarana olah raga	Dinas PU dan Perhubungan	2.200.000.000	
	JUMLAH			24.245.650.000	1.650.018.000

Fokus Pembangunan dan Kegiatan Prioritas Peningkatan Keamanan dan Penegakan Peraturan Daerah

No	Fokus Pembangunan/ Kegiatan Prioritas	Program Pembangunan	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp.)	
				APBD	APBN/ APBD Prop.
1.	Peningkatan Keamanan Ketertiban	a. Peningkatan Kesadaran hukum	Kantor Pol PP	100.000.000	
	1. Penertiban pekat dan pedagang kaki lima				
	2. Pengamanan/penertiban Perda dan Peraturan Bupati				
	3. Pengamanan objek vital / aset daerah			166.219.700	
	4. Pelatihan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA	b. Peningkatan dan jaringan rehabilitasi irigasi	Kantor PMKL	4.500.000	
	5. Penyuluhan pemberantasan maksiat			7.000.000	
	6. Perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah	c. Penegakan supremasi hukum dan perlindungan HAM, pemahaman dan kesadaran	Bagian Hukum dan Organisasi Setdakab	150.000.000	
	7. Penyuluhan hukum			50.000.000	
	JUMLAH			477.719.700	0

Fokus Pembangunan dan Kegiatan Prioritas Peningkatan dan Pemerataan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat

No	Fokus Pembangunan/ Kegiatan Prioritas	Program Pembangunan	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp.)	
				APBD	APBN/ APBD Prop.
1.	Pendidikan Anak Usia Dini 1. Pengadaan lembaga PADU	a. Pembangunan unit sekolah baru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	800.000.000	8.000.000.000
	2. Pengadaan alat peraga TK	b. Pengadaan alat penunjang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	600.000.000	
2.	Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun 1. Rehabilitasi gedung SD	a. Rehabilitasi gedung SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.500.000.000	45.000.000.000
	2. Rehabilitasi MIS /MIN	b. Rehabilitasi MIS / MIN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	220.000.000	1.100.000.000
	3. Pelaksanaan UAN/UAS 4. Sosialisasi Kurikulum 2004 5. Lomba gugus SD, sekolah sehat, dan lomba 10 mata pelajaran.	c. Peningkatan mutu sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	810.000.000 75.000.000 161.000.000	

3.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 1. Pembangunan USB SD 2. Pembangunan USB SMP 3. Pembangunan SDLB 4. Pembangunan ruang pustaka SD	a. Pembangunan prasarana sekolah baru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	500.000.000 500.000.000 200.000.000 875.000.000	4.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 6.000.000.000
4.	Pembinaan Pemuda dan Olahraga 1. Pembentukan Paskibra Kabupaten dan Utusan Propinsi 2. Pelatihan Pemuda Putus Sekolah 3. Bantuan Modal Usaha bagi Pemuda Terampil 4. PORDINI 5. POPDA 6. Pembinaan Olahraga Berprestasi 7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga 8. Pelatihan Guru Olahraga untuk 4 Cabang Olahraga Prioritas	a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga dan Kepemudaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	170,000,000 150,000,000 310,000,000 80,000,000 85,000,000 100,000,000 400,000,000 100,000,000	
	9. Pembinaan dan Pemberdayaan SPMN 10. Pembinaan dan Pelatihan LPM	b. Peningkatan Produktifitas Generasi Muda	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	300,000,000 20,000,000	
5.	Penyelenggaraan dan Pembinaan Pariwisata dan Budaya 1. Inventarisasi Kekayaan Seni dan Budaya	a. Pengelolaan Kekayaan,	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	150,000,000	

	<ul style="list-style-type: none"> 2. Lomba-lomba Bidang Seni dan Budaya 3. Pemeliharaan dan Perlindungan Benda Cagar Budaya 4. Pembuatan Komplek Makam Pahlawan 5. Pengiriman Kontingen Kesenian 6. Jambore Seni 	Seni dan Budaya		<ul style="list-style-type: none"> 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 	<ul style="list-style-type: none"> 150,000,000 150,000,000
6.	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Manajemen Tenaga Administrasi Sekolah 2. Pelatihan Penilaian Angka Kredit Guru, Pengawas dan Penilik Dikmas 3. Penghitungan Angka Kredit Guru, Pengawas dan Penilik Dikmas 	a. Peningkatan Manajemen sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> 485.000.000 55.000.000 80.000.000 	
7.	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan UAN/UAS 2. Sosialisasi KBK 3. Lomba Science dan Lomba olimpiade 4. Uji kompetensi SMK 5. Sekolah unggul 	a. Peningkatan mutu sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> 430.000.000 50.000.000 10.000.000 50.000.000 100.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> 90.000.000 900.000.000
8.	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah <ul style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan USB SMP 	a. Pembangunan prasarana sekolah baru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> 450.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> 4.500.000.000
9.	Bantuan Pendidikan Keagamaan		Dinas Pendidikan		

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Pemberdayaan Pondok Pesantren 2. Pembinaan Imam, Gharib, Khatib dan Guru TPQ/TPSQ 3. Peningkatan Penyuluhan dan Bimbingan Keagamaan 	a. Peningkatan Kegiatan Keagamaan	dan Kebudayaan	<p>50,000,000</p> <p>100,000,000</p> <p>20,000,000</p>	
10	<p>Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai 2. Pengadaan Alat-alat Kedokteran 3. Pengadaan Obat-obatan 4. Pengadaan Oksigen 5. Pengadaan Bahan Laboratorium 6. Pengadaan Inventaris Kantor dan Rumah Tangga 7. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai 8. Pengadaan Alat-alat Kedokteran 	a. Peningkatan Manajemen Logistik Sarana dan Prasarana Medis	Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	<p>506,000,000</p> <p>400,000,000</p> <p>280,000,000</p> <p>135,000,000</p> <p>200,000,000</p> <p>145,000,000</p> <p>506,000,000</p> <p>400,000,000</p>	
11	<p>Pencegahan Pemberantasan Penyakit Menular</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Imunisasi 2. Pemberantasan dan pencegahan penyakit ISPA 3. Pemberantasan dan pencegahan penyakit TB Paru 4. Pemberantasan dan pencegahan penyakit HIV/AIDS 	a. Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL)	Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	<p>722,327,000</p> <p>17,886,000</p> <p>45,830,000</p> <p>29,068,000</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> 5. Pengamatan dan pengkajian penyakit (Surveillance) 6. Pembinaan dan pelayanan kesehatan penyakit Rabies 7. Pemberantasan dan pencegahan penyakit berbasis binatang 8. Pemberantasan dan pencegahan penyakit diare 9. Pertemuan dan pembinaan program PL 10. Pemeriksaan dan pembinaan TTU dan TPM 11. Penanggulangan kasus KLB 			<p>22,862,000</p> <p>9,029,000</p> <p>50,721,000</p> <p>15,634,000</p> <p>14,524,000</p> <p>9,834,000</p>	50.000.000
12	<ul style="list-style-type: none"> Perbaiki Gizi Masyarakat 1. Pemberian makanan tambahan pemulihan 2. Pemantauan status gizi 	a. Penanggulangan Gizi Buruk dan Gizi Kurang	Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	26.500.000	42,000,000
	<ul style="list-style-type: none"> 4. Distribusi KMB 5. Pemetaan Gondok 6. Monitoring garam beryodium 7. Pemeriksaan ekskresi yodium urin 	b. Penanggulangan GAKY	Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	55.000.000	<p>16,500,000</p> <p>11,500,000</p> <p>45,000,000</p>
	<ul style="list-style-type: none"> 8. Distribusi Kapsul Vitamin A 	c. Penanggulangan KVA	Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	42.500.000	
	<ul style="list-style-type: none"> 9. Distribusi Tablet FE 	d. Penanggulangan	Dinas	55.000.000	

	10. Survey Anemia	Anemia	Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial		15.000.000
	11. Pemetaan Kadarzi 12. Sosialisasi Eksklusif	e. Peningkatan Kadarzi	Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	30.000.000 20.000.000	
	13. Pertemuan dan Evaluasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat	f. Evaluasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	20.000.000	
13	Peningkatan dan Rehab Gedung Kesehatan 1. Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas 2. Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawatan 3. Rehabilitasi Polindes 4. Rehabilitasi Pustu 5. Rehabilitasi Puskesmas 6. Pengadaan Peralatan Medis Puskesmas, Pustu dan Polindes 7. Pengadaan Puskesmas Keliling/Ambulance 8. Peningkatan gedung Klinik RSUD Sei Dareh	a. Peningkatan Pelayanan Dasar Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	220,000,000 330,000,000 2,200,000,000 110,000,000 11,000,000 1,650,000,000 4,400,000,000 1,100,000,000	1.980.000.000 2,970,000,000 990,000,000 99.000.000 9,900,000,000

	9. Peningkatan Gedung UGD RSUD Sei Dareh			1,100,000,000	
	10. Pengadaan Peralatan Medis			550,000,000	4.950.000.000
14	Peningkatan Profesionalisme Petugas Kesehatan 1. Peningkatan pengetahuan petugas tentang kesehatan reproduksi 2. Pelatihan pelayanan gizi institusi 3. Pertemuan dan evaluasi perbaikan gizi masyarakat 4. Pelatihan penatalaksanaan gizi buruk dan kurang	a. Peningkatan Profesionalisme Petugas Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	6.110.000 25.000.000 20.000.000	54.990.000 23.835.700
	JUMLAH			28.766.825.000	97.187.825.700

Rekapitulasi Anggaran Dana Berdasarkan Agenda Prioritas Pembangunan

No	Agenda Prioritas Pembangunan	Pagu Dana Indikatif (Rp)	
		APBD	APBN/ APBD Prop.
1	Peningkatan dan Pengembangan Perekonomian Masyarakat serta Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Angka Pengangguran	1.025.000.000	0
2	Penataan administrasi pemerintahan dan pelayanan umum.	1.182.141.050	0
3	Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar (infrastruktur).	24.245.650.000	1.650.018.000
4	Peningkatan keamanan dan penegakan peraturan daerah.	477.719.700	0
5	Peningkatan dan pemerataan pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	28.766.825.000	97.187.825.700
	JUMLAH	55.697.335.750	98.837.843.700



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

BUKU II

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2008**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PULAU PUNJUNG
2007**

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Daftar Isi	i
Bagian I Membangun Pemerintah Yang Profesional dan Penuh Pengabdian.....	I - 1
Bab I. Peningkatan Kemampuan Daerah dan Nagari.....	I - 1
Bab II. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	I - 9
Bab III. Kependudukan.....	I - 17
Bab IV. Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	I - 21
Bab V. Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	I - 24
Bab VI Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia	I - 31
Bab VII. Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi dan Parpol	I - 34
Bab VIII Peningkatan Kemanan dan Ketertiban	I - 38
Bagian II Pembangunan Masyarakat Yang Produktif dan Memiliki Ekonomi Yang Tangguh.....	II-1
Bab I. Revitalisasi Pertanian dan Agro Industri.....	II-1
Bab II. Pengembangan Industri	II-12
Bab III. Pengembangan Kelembagaann Ekonomi	II-15
Bab IV. Peningkatan Investasi dan Pengembangan Kerjasama Antar Daerah	II-21
Bab V. Pengembangan Infrastruktur Transportasi.....	II-24
Bab VI Pembangunan Sumber Daya Air	II-36
Bab VII Pengembangan BUMD	II-45
Bab VIII Pembangunan Ketenaga Kerjaan	II-47
Bab IX Pembangunan Pertambangan dan Energi	II-51
Bab X Pengembangan Pariwisata	II-57
Bab XI Pengelolaan Sumber Daya Alam	II-60
Bab XII Penanggulangan Bencana Alam	II-68
Bab XIII Penataan Ruang dan Pertanahan	II-71
Bab XIV Prasarana Perumahan dan Pemukiman	II-77
Bagian III Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas	III-1
Bab I. Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan	III-1
Bab II. Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	III-13

Bab III.	Pembangunan Keluarga Berencana	III-23
Bab IV	Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga	III-26
Bab V	Peningkatan Kualitas Pemuda	III-30
Bab VI	Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	III-34
Bagian IV	Mewujudkan Masyarakat Religius Yang Bertakwa Kepada Tuhan YME, Rukun Penuh Kedamaian, Berbudaya Serta Didukung Oleh Supremasi Hukum dan Stabilitas Politik Yang Handal	IV-1
Bab I.	Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama	IV-1
Bab II.	Pemberantasan Maksiat dan Penyakit Masyarakat	IV-4
Bab III.	Pengembangan Kebudayaan	IV-7
Bab IV.	Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial	IV-11

BAGIAN PERTAMA

AGENDA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG PRODUKTIF DAN MEMILIKI EKONOMI YANG TANGGUH

BAB I.
PENINGKATAN PRODUKSI DAN PENGAMANAN
KETAHANAN PANGAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AGRIBISNIS
UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI

A. Kondisi Umum

Pemenuhan kebutuhan pokok merupakan unsur penting dalam peningkatan kesejahteraan dan menjaga stabilitas pembangunan, untuk itu diperlukan kebijakan meningkatkan produksi dan mengamankan ketahanan pangan yang diarahkan kepada peningkatan ketersediaan dan kecukupan pangan. Upaya ini dilakukan dengan mendorong peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan beberapa komoditi perkebunan serta mengembangkan keragaman pangan guna memenuhi kebutuhan pokok secara lebih merata sampai pada tingkat rumah tangga. Kebijakan ini merupakan kelanjutan program yang telah dilakukan sebelumnya untuk dapat menjaga stabilitas ketersediaan pangan disamping meningkatkan pendapatan masyarakat yang bekerja pada usaha ekonomi yang menghasilkan produk pangan.

Upaya peningkatan produksi dilakukan melalui peningkatan produktivitas didukung oleh pengembangan teknologi seperti penggunaan bibit bermutu, perbaikan budaya, penggunaan alat dan mesin pertanian, pengendalian hama dan penyakit tanaman, penanganan pasca panen, peningkatan luas tanam, pemanfaatan lahan tidur dan pekarangan. Pengembangan keragaman bahan pangan dilakukan dengan memasyarakatkan berbagai bahan pangan sehingga masyarakat tidak tergantung pada satu jenis komoditi pangan saja yaitu beras yang menjadi kebutuhan utama pangan masyarakat. Upaya peningkatan ketahanan pangan juga didukung oleh pengendalian harga dan distribusi pangan sehingga pangan dapat tersedia dengan cukup pada tingkat keluarga.

Peran pertanian sampai saat ini masih dominan dalam perekonomian Kabupaten Dharmasraya dan merupakan lapangan usaha yang memberikan nilai tambah cukup besar dalam pembentukan PDRB (*Product Domestic Regional Bruto*) dan sektor terbesar yang menyerap tenaga kerja sebesar 63.981 orang (70,83%)

dari angkatan kerja. Walaupun usaha pertanian telah berperan besar dalam pembangunan daerah, namun peningkatan pendapatan petani belum dapat diwujudkan sebagaimana diharapkan. Sebagian besar masyarakat petani ternyata masih tergolong pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang perlu terus diupayakan peningkatan pendapatannya dengan mengoptimalkan pengelolaan usaha pertanian. Fokus komoditi pada pertanian tanaman pangan dan hortikultura yaitu padi, jagung, ubi kayu, kedelai, dan sayur-sayuran.

Luas lahan yang dipergunakan untuk usaha tanaman padi seluas 7.593 Ha (2,55%) dari luas wilayah Kabupaten Dharmasraya dengan hasil produksi sebesar 38.591 ton, jika dibandingkan dengan tahun 2003 terjadi penurunan hasil produksi sebesar 10.156 ton. Produksi palawija tahun 2004, jika dilihat dari luas panen tanaman ubi kayu seluas 2.287 Ha dengan produksi sebesar 68.810 ton, disusul tanaman jagung dengan luas panen 732 Ha dan produksi sebesar 3.241 ton, sedangkan produksi ubi jalar sebesar 548 ton.

Daerah penghasil produksi palawija di Kabupaten Dharmasraya adalah Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Pulau Punjung, dan Kecamatan Sungai Rumbai. Ketersediaan pangan di Kabupaten Dharmasraya masih mengharapkan kontribusi pangan dari Kabupaten terdekat, karena masih kecilnya lahan tanaman pangan yang diolah petani untuk areal tanaman pangan (padi) dan hortikultura lainnya.

Pengamanan ketahanan pangan untuk mencukupi potensi yang berasal dari hewan produksi ternak sapi pada tahun 2004 sebanyak 25.756 ekor, kerbau 7.824 ekor, kambing 8.183 ekor, domba 176 ekor. Sedangkan produksi ayam ras 125.400 ekor, ayam buras 163.602 ekor, dan itik sebanyak 9.956 ekor. Produksi ayam ras dan buras pada tahun 2004 mengalami perkembangan yang cukup baik untuk masa datang.

Walaupun telah dicapai beberapa kemajuan dalam peningkatan produksi dan pengamanan ketahanan pangan tetapi masih banyak permasalahan yang dihadapi, seperti :

1. Lemahnya akses petani terhadap *input* produksi dengan biaya wajar.
2. Tidak adanya kepastian pasar hasil produksi dengan harga wajar.

3. Fluktuasi harga komoditi pertanian yang mempengaruhi pendapatan yang diterima petani.
4. Masih lemahnya penanganan pasca panen dan tidak berkembangnya industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian.
5. Semakin berkurangnya lahan produktif karena meningkatnya alih fungsi lahan disamping masih banyaknya lahan tidur.
6. Produktifitas lahan yang relatif rendah karena keterbatasan penggunaan teknologi.

Pengembangan agribisnis merupakan salah satu bentuk pembangunan pertanian yang mengintegrasikan pembangunan industri, pertanian dan jasa terkait dalam suatu gugus industri (*Cluster Industry*) yang mencakup empat sub sistem, yaitu : sub sistem agribisnis hulu, sub sistem usaha tani, sub sistem agribisnis hilir, dan sub sistem jasa penunjang. Empat sub sistem agribisnis tersebut harus dikembangkan secara simultan, sinergis dan harmonis.

Pengembangan agribisnis bertujuan untuk mendorong berkembangnya usaha pertanian yang mampu menghasilkan produk pertanian dan industri pertanian yang berdaya saing dan menghasilkan nilai tambah bagi peningkatan pendapatan petani dan masyarakat.

Pengembangan agribisnis sangat ditentukan oleh peran pelaku usaha terutama dalam peningkatan mutu produk dan peningkatan nilai tambah usaha pertanian. Pelaku utama dari pembangunan sistem agribisnis di Kabupaten Dharmasraya adalah usaha rumah tangga, usaha kelompok, usaha kecil dan menengah serta koperasi.

Pengembangan agribisnis dilakukan pada kawasan-kawasan potensial dengan membangun keterkaitan sistem penyediaan sarana produksi, proses produksi, pasca panen dan pengolahan hasil, pemasaran dan sistem penunjang lainnya, sehingga diperoleh efisiensi usaha yang dapat menghasilkan produk pertanian yang berdaya saing. Pengembangan agribisnis didukung oleh penguatan kelembagaan petani, peningkatan sarana, pengembangan jaringan usaha terutama penyediaan sarana produksi dan pemasaran serta pengembangan teknologi tepat guna yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani.

Pengembangan agribisnis mencakup sub sektor pertanian tanaman pangan, sub sektor peternakan, sub sektor perkebunan, dan sub sektor perikanan. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pengembangan agribisnis antara lain adalah :

1. Pengembangan teknologi seperti pertanian organik untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi usaha.
2. Fasilitasi sarana dan prasarana yang menunjang agribisnis seperti dalam pasca panen *packing, grading* dan pemasaran.
3. Peningkatan SDM dalam menunjang usaha tani yang berbasis pangan.
4. Pengembangan usaha untuk dapat mendukung pelaksanaan sistem agribisnis.

Usaha pertanian tanaman pangan memiliki luas lahan sawah yang menghasilkan produksi padi pada tahun 2004 seluas 8.604 Ha, jika dibandingkan tahun 2003, terdapat 1.570 Ha sawah yang terlantar dan tidak terkelola dengan baik. Lahan kering yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya seluas 18.610 Ha yang masih belum diolah secara baik. Hasil yang dicapai dalam pembangunan tanaman pangan seperti padi dengan produksi 38.591 ton. Kecamatan penghasil padi terbesar terdapat di Kecamatan Pulau Punjung sebesar 13.753 ton, Kecamatan Koto Baru sebesar 11.115 ton, Kecamatan Sitiung sebesar 8.369 ton dan Kecamatan Sungai Rumbai sebesar 5.354 ton. Jumlah kebutuhan pangan di Kabupaten Dharmasraya sekarang ini masih belum mencukupi, ini terlihat dari beras yang beredar di pasaran, umumnya pasokan beras dari Kabupaten-kabupaten tetangga.

Disamping produksi padi terdapat komoditi ubi kayu seluas 2.287 Ha dengan hasil produksi sebesar 68.610 ton, jagung sebesar 1.241 ton, sementara produksi ubi jalar sebesar 548 ton. Dilihat dari lokasi penghasil ubi kayu terbesar adalah Kecamatan Koto Baru yang memberikan kontribusi lebih dari 80% hasil produksi total, yaitu seluas 1.499 Ha dengan hasil produksi sebesar 44.970 ton, disusul Kecamatan Sitiung dengan luas 631 Ha dengan hasil produksi sebesar 18.900 ton, Kecamatan Pulau Punjung 86 Ha dengan hasil produksi sebesar 2.580 ton dan Kecamatan Sungai Rumbai dengan luas 71 Ha dengan hasil produksi sebesar 2.130 ton.

B. Sasaran

Sasaran peningkatan produksi dan pengamanan ketahanan pangan untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pangan baik nabati maupun hewani untuk dikonsumsi masyarakat serta pembangunan sistem agribisnis untuk meningkatkan pendapatan petani dilakukan melalui upaya :

1. Meningkatnya produksi pangan untuk mendukung ketahanan pangan daerah dan penunjang ketahanan pangan nasional.
2. Meningkatnya ketersediaan dan kecukupan pangan baik nabati maupun hewani untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan penduduk.
4. Meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha pertanian yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan sehingga dapat mendorong dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Meningkatnya kesejahteraan petani yang dicerminkan dari peningkatan pendapatan dan produktivitas pekerja di bidang pertanian.

C. Arah Kebijakan

Peningkatan produksi dan pengamanan ketahanan pangan diarahkan pada :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas melalui peningkatan mutu, intensifikasi, perluasan areal tanam, pengamanan produksi (pengendalian organisme pengganggu tanaman dan bencana alam), pengolahan dan pemasaran hasil.
2. Peningkatan pengembangan sistem ketahanan pangan daerah melalui peningkatan sub sistem ketersediaan pangan, distribusi, diversifikasi serta kewaspadaan dan keamanan pangan.
3. Pertanian produksi, produktivitas, kualitas dan nilai tambah usaha pertanian yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan dan budidaya perikanan.

4. Peningkatan manajemen pengelolaan usaha tani baik dari aspek budidaya, sarana dan prasarana produksi, pengolahan hasil maupun pasca panen.
5. Peningkatan akses terhadap pasar dan sumber modal.
6. Peningkatan kelembagaan pertanian dan SDM pelaku usaha pertanian melalui pelatihan dan bimbingan lapangan sehingga mampu menggunakan teknologi secara tepat.

BAB II.

MENATA KELEMBAGAAN DAN MEMBERDAYAKAN PELAKU USAHA

A. Kondisi Umum

Pemberdayaan kelembagaan dan pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan akses pelaku usaha kecil/petani dan memperkuat posisi tawar terhadap sumber daya ekonomi baik dalam penyediaan sarana produksi, permodalan maupun pemasaran hasil usaha sehingga dapat meningkatkan daya saing dan memperkuat basis perekonomian daerah. Menata kelembagaan dimulai dari penguatan kelembagaan pada kelompok produksi yang dapat dikembangkan menjadi kelompok usaha bersama maupun badan usaha lainnya.

Penataan kelembagaan ini diarahkan kepada lembaga pemasaran produk usaha kecil dan lembaga penunjang usaha kecil, menengah dan koperasi seperti lembaga penyedia modal dan penjamin kredit (Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Kredit Mikro, Asuransi Kredit bagi Usaha Kecil dan Menengah). Sementara itu pemberdayaan pelaku usaha kecil diarahkan kepada pengembangan kemampuan dan kemandirian para pelaku usaha kecil dan menengah dalam pengelolaan usahanya, diharapkan nilai tambah yang diterima oleh pelaku usaha kecil akan dapat ditingkatkan melalui bimbingan, pendampingan dan pelatihan.

Menata kelembagaan usaha ekonomi kerakyatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Kondisi kelembagaan dari usaha ekonomi Kabupaten Dharmasraya terdiri dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebanyak 4 buah, namun belum dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan tuntutan masyarakat dan tuntutan teknologi. Disamping itu, pembangunan pertanian juga didukung oleh kelompok tani sebanyak 36 kelompok dengan anggota sebanyak 687 orang serta kelembagaan pendukung usaha tani dan usaha lainnya di bidang penyediaan modal usaha melalui koperasi 115 unit dan Bank BNI, Bank Mandiri, BRI, BPD dan BPR sebanyak 10 buah.

Usaha kecil dan menengah pada tahun 2004 terdapat 62 unit usaha kecil dan rumah tangga, dimana 32 unit bergerak dalam usaha industri logam, mesin dan

kimia, 14 unit bergerak dalam usaha hasil pertanian, sedangkan 16 unit bergerak pada usaha industri aneka.

B. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam menata kelembagaan dan memberdayakan pelaku usaha adalah meningkatkan kinerja kelembagaan/organisasi pelaku usaha, sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah kualitas lembaga usaha serta lembaga pendukung pengembangan usaha.
2. Meningkatnya kemandirian dan manajemen pelaku usaha dalam pengelolaan usaha yang profesional.
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) aparatur dan pelaku usaha.

C. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan dalam menata kelembagaan dan memberdayakan pelaku usaha diupayakan melalui :

1. Peningkatan jumlah dan kuantitas kelembagaan pelaku usaha.
2. Peningkatan kemandirian dan manajemen pelaku usaha.
3. Peningkatan Kemandirian dan manajemen pelaku usaha dalam pengelolaan usaha yang profesional.
4. Peningkatan kualitas SDM aparatur dan pelaku usaha.

BAB III.

PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PENINGKATAN JARINGAN INFORMASI DAN PROMOSI USAHA

A. Kondisi Umum

Pembangunan koperasi dan UKM di Kabupaten Dharmasraya telah berpengaruh terhadap pertumbuhan koperasi dan UKM. Jumlah koperasi yang ada pada tahun 2004 adalah 116 unit koperasi terdiri dari 45 unit KUD dan 71 unit non KUD dengan jumlah anggota secara keseluruhan 31.152 orang. Jika dibandingkan tahun 2003 terjadi peningkatan koperasi non KUD sebanyak 58 unit menjadi 71 unit, namun masih banyak pengelolaan koperasi yang belum memahami tentang prinsip-prinsip dasar koperasi. Hal ini terlihat dari rendahnya koperasi yang melakukan rapat anggota tahunan (RAT). Volume usaha koperasi tahun 2003 tercatat Rp. 143.896.667 dibanding tahun 2002 tercatat Rp. 99.786.248 atau meningkat sebanyak Rp. 44.108.319.

Usaha kecil dan menengah dalam pembangunan ekonomi daerah telah memegang peranan yang cukup besar dalam :

1. Penyediaan lapangan kerja.
2. Mendorong kesempatan kerja di daerah.
3. Mendorong pemerataan pendapatan.
4. Meningkatkan PDRB daerah.
5. Menunjang sektor ekonomi lainnya.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan koperasi dan usaha kecil serta peningkatan jaringan informasi dan promosi usaha, antara lain :

1. Rendahnya kemampuan dan terbatasnya jangkauan pemasaran.
2. Rendahnya penguasaan teknologi serta masih kurangnya peran penelitian dalam pengembangan produksi.
3. Rendahnya SDM dan keterampilan pengusaha dalam mengembangkan unit usahanya.
4. Lemahnya administrasi dan informasi akuntansi.

5. Rendahnya kemampuan modal usaha baik modal kerja maupun modal tetap.
6. Tingginya persaingan dengan perusahaan-perusahaan besar.
7. Kemampuan membangun jaringan bisnis yang masih terbatas.
8. Umumnya usaha kecil dan menengah beroperasi pada volume produksi di sekitar titik impas sehingga akumulasi modal dari keuntungan kurang dapat diharapkan.

B. Sasaran

Sasaran pembangunan pada pengembangan koperasi dan usaha kecil serta peningkatan jaringan informasi dan promosi usaha diarahkan untuk :

1. Meningkatnya jumlah dan kualitas kelembagaan koperasi.
2. Meningkatnya jumlah peraturan dan pedoman pendukung usaha Koperasi dan UKM.
3. Meningkatnya produktivitas usaha koperasi dan UKM.
4. Meningkatnya peran koperasi dan UKM dalam pembentukan PDRB.
5. Meningkatnya kemampuan koperasi dan UKM dalam penyerapan tenaga kerja.
6. Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM yang diukur dengan meningkatnya perdagangan lintas daerah dan ekspor UKM.
7. Meningkatnya peran UKM dalam pengembangan industri.
8. Berkembangnya usaha koperasi dan UKM di bidang agribisnis.
9. Tumbuhnya wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Arah Kebijakan

Pengembangan koperasi dan usaha kecil serta peningkatan jaringan informasi dan promosi usaha diarahkan untuk :

1. Peningkatan kemampuan pelaku usaha kecil dan menengah dalam menghasilkan komoditi yang berdaya saing tinggi.
2. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM.

3. Peningkatan pengembangan dan penguatan kelembagaan usaha UKM yang lebih profesional dan berkualitas.
4. Peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil dan menengah.
5. Peningkatan kemampuan pelaku usaha.
6. Peningkatan dukungan bagi pengembangan usaha baik dari aspek penyediaan sarana produksi, teknologi, pemasaran dan permodalan.
7. Pengembangan UKM melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri.

BAB IV.
PENGEMBANGAN INDUSTRI KERAJINAN DAN INDUSTRI
PENGOLAHAN BERBASIS PERTANIAN

A. Kondisi Umum

Industri kerajinan dan industri pengolahan yang berbasis pertanian di Kabupaten Dharmasraya terdaftar sebanyak 860 unit usaha, dengan memanfaatkan tenaga kerja 4.491 orang (4,31%) dari angkatan kerja yang ada dan peranannya masih relatif kecil dalam pengembangan ekonomi daerah. Pengembangan industri kecil dan kerajinan serta industri pengolahan yang berbasis pertanian masih mengalami banyak persoalan.

Persoalan utama masih kurangnya dunia usaha dalam mengembangkan industri pengolahan dan penanganan pasca panen terhadap produk pertanian, sehingga nilai tambah yang diperoleh dari usaha tersebut relatif kecil dan tidak tercipta jaminan pasar dari produk-produk pertanian yang pada umumnya cepat rusak. Selain itu, industri kerajinan yang ada pengelolaannya masih menggunakan manajemen sederhana. Penggunaan dan pengembangan teknologi serta tingkat keterampilan pelaku usaha yang masih terbatas sehingga kualitas dan produktivitas usaha relatif rendah yang menyebabkan rendahnya daya saing industri di pasar.

B. Sasaran

Sasaran pengembangan industri kerajinan dan industri pengolahan berbasis pertanian adalah :

1. Meningkatnya produksi dan kuantitas produk industri kerajinan dan industri pengolahan berbasis pertanian.
2. Meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam pengolahan hasil pertanian.

C. Arah Kebijakan

Kebijakan pengembangan industri kerajinan dan industri pengolahan berbasis pertanian, diarahkan pada :

Buku II RKPD Tahun 2007 Kabupaten Dharmasraya

1. Mengembangkan industri pengolahan berbasis pertanian untuk dapat meningkatkan nilai tambah dan memberikan jaminan pemasaran bagi produk pertanian.
2. Peningkatan pembinaan dan pengembangan industri kerajinan melalui pendekatan sentra atau kawasan-kawasan pemasaran sehingga memudahkan pembinaan manajemen pengolahan usaha dan pengendalian mutu.
3. Melakukan peningkatan promosi dan sosialisasi tentang penerapan teknologi tepat guna untuk pengembangan industri hasil pengolahan pertanian.
4. Meningkatkan SDM untuk pengembangan usaha industri kerajinan dan memfasilitasi kerjasama swasta untuk melakukan mitra dengan petani sebagai produsen.

BAB V.

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DASAR

A. Kondisi Umum

Sarana dan prasarana dasar di Kabupaten Dharmasraya masih sangat terbatas. Hal ini terlihat dari kondisi prasarana jalan, irigasi dan lingkungan pemukiman yang belum memadai dan dalam kondisi rusak.

Kabupaten Dharmasraya memiliki ruas jalan sepanjang 734,70 km yang terdiri dari jalan negara sepanjang 62,50 km, jalan propinsi sepanjang 83,50 km dan jalan kabupaten sepanjang 588,70 km. Panjang jalan yang ada hanya 123 km yang dalam kondisi baik dan 244,60 km dalam kondisi rusak, kemudian sisanya perlu perawatan. Untuk meningkatkan kondisi jalan di Kabupaten Dharmasraya masih ditemui beberapa permasalahan, diantaranya :

1. Terbatasnya dana pembangunan dan biaya pemeliharaan jalan yang relatif tinggi mengingat faktor geografis yang bergelombang dan berbukit.
2. Daerah rawan bencana sehingga sering terjadinya longsor dan banjir yang mengakibatkan banyaknya jalan yang rusak.
3. Belum terpadunya penanganan sistem jaringan jalan kabupaten, jalan propinsi dan jalan negara.
4. Masih kurangnya fasilitas dan kelengkapan sarana jalan, berupa rambu-rambu lalu lintas.

Dalam rangka mendukung produksi pertanian dan perikanan maka penyediaan prasarana air masih merupakan satu hal yang sangat penting untuk ditangani, karena telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan sektor pertanian. Keberadaan irigasi Batang Hari diharapkan mampu mengairi areal persawahan di wilayah Kabupaten Dharmasraya seluas 15.000 Ha dan didukung oleh 72 buah daerah irigasi (DI) dengan luas areal yang diairi mencapai 4.026 Ha yang belum terjangkau oleh bendungan Batang Hari.

Permasalahan dalam pengelolaan sumber daya air dan irigasi adalah :

1. Tidak seimbangnya antara pasokan dengan kebutuhan air.
2. Menurunnya kemampuan penyediaan air.
3. Kurang optimalnya tingkat layanan jaringan irigasi.
4. Lemahnya koordinasi kelembagaan dan ketata laksanaan pengelolaan sumber daya air.
5. Belum maksimalnya keterpaduan antara lintas sektor dalam menangani ketersediaan air sebagai sumber irigasi.
6. Belum optimalnya pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
7. Belum berdayanya kelembagaan pengelolaan irigasi.

Kondisi sarana dan prasarana pemukiman masih belum memadai terutama dalam penyediaan air bersih yang ada pada tahun 2003 baru mencapai 20%. Sedangkan berdasarkan program nasional cakupan air bersih yang digunakan masyarakat telah mencapai 60%. Berkaitan dengan sanitasi lingkungan cakupan jamban keluarga tahun 2004 baru mencapai 36%, sedangkan pemberdayaan hidup bersih dan sehat (PHBS) baru mencapai 2,65% pada tahun 2004. drainase dan jalan lingkungan masih banyak yang tidak memenuhi syarat sehingga menimbulkan genangan pada beberapa wilayah dan tempat di Kabupaten Dharmasraya.

B. Sasaran

Sasaran pembangunan pada peningkatan sarana dan prasarana dasar, antara lain :

1. Meningkatkan kemantapan jalan dan jembatan pada jalan negara, propinsi dan jalan kabupaten.
2. Terciptanya kondisi fisik prasarana jalan yang dapat memberikan tingkat pelayanan yang baik sampai dengan batas umur yang teknis yang direncanakan.
3. Meningkatkan pelayanan prasarana jalan sesuai dengan kebutuhan yang berkembang secara efisien, aman dan ekonomis.
4. Meningkatnya kualitas pemeliharaan jalan dan penanggulangan bencana.

5. Tersedianya SDM yang berkualitas di bidang prasarana jalan.
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan instansi terkait untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan pemeliharaan jalan.
7. Terpenuhinya secara merata kebutuhan air untuk usaha pertanian, rumah tangga dan industri.
8. Meningkatnya kesadaran masyarakat tani dalam pengelolaan irigasi dengan baik.
9. Terjaminnya keamanan kawasan pemukiman, pertanian dan sarana publik lainnya dari bahaya banjir.
10. Terpenuhinya pembangunan unit-unit rumah sederhana dan sangat sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
11. Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana permukiman.
12. Terwujudnya revitalisasi dan pelestarian kawasan yang meliputi pembangunan kawasan dan pusat pengembangan desa.

C. Arah Kebijakan

Untuk meningkatkan sarana dan prasarana dasar dilakukan melalui upaya :

1. Memaksimalkan pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan untuk mencapai kondisi yang diharapkan.
2. Meningkatkan peranan masyarakat dan pengusaha dalam pemeliharaan jalan dan jembatan.
3. Memberi dukungan perencanaan teknis pembangunan, pengawasan jaringan jalan dan jembatan.
4. Mensinergikan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan antar status jalan yang ada.
5. Meningkatkan rehabilitasi daerah irigasi yang ada.
6. Meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat dengan pemerintah daerah melalui program-program stimulan dan bantuan langsung.
7. Mewujudkan kondisi lingkungan pemukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan.

BAGIAN KEDUA

AGENDA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN PENUH PENGABDIAN (*GOOD GOVERNANCE*)

BAB VI.
PENINGKATAN KEMAMPUAN KELEMBAGAAN
BIROKRASI DAN ADMINISTRASI PUBLIK

A. Kondisi Umum

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, membawa perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam konteks tersebut terlihat bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan dan ruang gerak yang luas dalam menyelenggarakan dan mengelola daerahnya, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsekuensi logis yang dimiliki akibat adanya kebijakan yang diterapkan sebagai pijakan pelaksanaan gerak langkah pembangunan dan mekanisme pertanggungjawabannya adalah terjadinya perubahan menuju tatanan baru. Perubahan dari tatanan lama menuju tatanan baru tersebut membawa dua konsekuensi logis yang pertama munculnya peluang dan kedua mengandung resiko. Peluang yang diharapkan adalah semakin berkembangnya demokrasi yang ditandai dengan tegaknya kedaulatan rakyat, berfungsinya pemerintahan dengan baik dan berkembangnya dunia usaha yang murni berdasarkan upaya perwujudan kemitraan yang mutualistik. Sedangkan resiko yang terkandung didalamnya adalah pemisahan wilayah secara keruangan, ketegangan serta konflik sosial kemasyarakatan sebagai egoisme daerah.

Otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan aparatur penyelenggara pemerintahan di daerah dalam melaksanakan kewenangan di bidang pemerintahan umum, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja unit-unit kerja pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan masyarakat. Namun penyelenggaraan pemerintahan di daerah belum mengalami perubahan yang signifikan. Walaupun dalam beberapa tahun terakhir telah dilakukan pembenahan dan penataan secara kelembagaan birokrasi dan administrasi publik, namun masih

dirasakan lambannya pelaksanaan reformasi birokrasi. Permasalahan yang dihadapi masih berputar kepada persoalan rendahnya kinerja sumber daya aparatur, penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan yang tinggi, rendahnya tingkat disiplin, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang belum memadai sehingga mengakibatkan terjadinya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi unit-unit kerja pemerintah daerah.

Demikian pula dengan penataan organisasi dan manajemen pemerintahan yang masih jauh dari harapan dan belum sepenuhnya berdasarkan atas analisis jabatan dan kebutuhan organisasi serta beban tugas. Kecenderungan kelembagaan di daerah masih membengkak, ditandai dengan tidak efektifnya struktur organisasi di daerah dalam melakukan peningkatan kinerjanya. Rendahnya kinerja pengawasan, kelembagaan dan ketatalaksanaan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah perlu dibenahi karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan yang serius terhadap sistem administrasi pemerintah daerah, bahkan dari penyelenggaraan pemerintah daerah itu sendiri.

Permasalahan lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah belum memadainya pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan yang cepat, tepat, akurat, murah dan transparan serta tidak diskriminatif. Disamping itu, penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan belum sepenuhnya terlaksana. Demikian pula dengan munculnya berbagai pungutan yang memberatkan masyarakat, ternyata belum dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan.

B. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai pada peningkatan kemampuan kelembagaan dan administrasi publik adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya ketatalaksanaan birokrasi pelayanan publik yang baik, cepat dan transparan.
2. Terwujudnya aparatur pemerintahan yang bersih, profesional, bertanggung jawab dan bebas KKN.

3. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang relevan sesuai dengan kemampuan.
4. Terlaksananya pelayanan publik yang efektif dan efisien.
5. Meningkatnya peran aktif dunia usaha dan masyarakat.
6. Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran dalam rangka peningkatan kinerja dan kenyamanan kerja aparatur.
7. Meningkatnya koordinasi, komunikasi dan kerjasama antar daerah.

C. Kebijakan Umum

Untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan birokrasi dan administrasi publik dilakukan melalui upaya :

1. Penyempurnaan struktur organisasi dan tata kerja termasuk tugas pokok dan fungsi unit-unit kerja.
2. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan melalui jenjang pendidikan formal dan diklat teknis fungsional.
3. Peningkatan kesejahteraan PNS dan pemberlakuan sistem karir berdasarkan prestasi.
4. Peningkatan penegakan sistem dan budaya birokrasi yang profesional melalui pembinaan dan pengawasan melekat.
5. Peningkatan kerjasama yang sinergis antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memperkecil kesenjangan ekonomi, sosial dan budaya dalam masyarakat.
6. Peningkatan koordinasi antar unit kerja di lingkungan pemerintah daerah.
7. Peningkatan kerjasama antar daerah.

BAB VII.

PENINGKATAN KEMAMPUAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN NAGARI

A. Kondisi Umum

Salah satu kebijakan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah adalah dilaksanakannya pemerintahan terendah melalui sistem pemerintahan nagari. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Namun dalam implementasinya, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan terendah tersebut belum dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Hal ini disebabkan rendahnya kualitas sumber daya nagari, sarana dan prasarana serta daya dukung dan partisipasi anak nagari termasuk para perantau.

B. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai pada peningkatan kemampuan kelembagaan pemerintahan nagari adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas SDM perangkat nagari yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pembangunan pemerintahan nagari dan masyarakat.
2. Tersedianya sarana dan prasarana nagari yang memadai.
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan sistem pemerintahan nagari.

C. Kebijakan Umum

Untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan pemerintahan nagari dilakukan melalui upaya :

1. Penataan kelembagaan dalam sistem pemerintahan nagari.
2. Peningkatan kemampuan SDM aparatur pemerintahan nagari melalui diklat fungsional dan studi banding.

3. Peningkatan pemberdayaan pengelolaan administrasi pemerintahan nagari.
4. Peningkatan pemberdayaan pengelolaan sumber-sumber keuangan dan aset nagari.
5. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan nagari dalam membuat berbagai kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintahan nagari.
6. Peningkatan kemampuan pemerintahan nagari untuk melaksanakan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat.
7. Peningkatan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan sistem pemerintahan nagari termasuk keterlibatan kaum perempuan dalam berbagai kegiatan nagari.

BAB VIII.
PENINGKATAN DEMOKRATISASI
PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

A. Kondisi Umum

Proses konsolidasi demokrasi dan politik di daerah tidak terlepas dari proses demokrasi dan konstelasi politik yang terjadi di tingkat nasional. Dalam konteks budaya politik, bergulirnya proses demokratisasi secara perlahan telah membuka wawasan dan menajamkan persepsi masyarakat mengenai pentingnya nilai-nilai demokrasi dalam mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat tampak makin sensitif terhadap berbagai gejala dan proses politik yang terjadi serta ingin lebih banyak turut serta dalam proses pengambilan keputusan politik yang langsung berkaitan dengan kepentingan mereka, serta sering memberikan respon dengan cepat melalui kegiatan demokrasi untuk menyatakan aspirasinya.

Namun demikian, proses demokrasi yang terjadi masih berjalan pada arah yang baik dan benar. Kondisi masyarakat seperti ini dapat dikatakan sebagai sebuah modal awal yang baik bagi proses demokrasi. Oleh karena itu, teladan dan dorongan untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi dari pemerintah, partai-partai politik, organisasi kemasyarakatan dan LSM merupakan hal yang terus perlu dilakukan bagi peningkatan kualitas partisipasi politik dan nilai-nilai demokrasi masyarakat.

Permasalahan mekanisme perwakilan rakyat adalah belum optimalnya mekanisme perwakilan rakyat yang ada dalam mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakili, masih cukup dominannya budaya politik golongan serta masih lemahnya etika berpolitik. Disamping itu, peranan partai politik, organisasi kemasyarakatan dan LSM dan media massa masih belum optimal untuk secara bersama-sama memberikan akses dan saluran kepada masyarakat untuk melakukan pendidikan politik yang efektif apabila adanya interaksi yang dinamis antara struktur politik, proses politik dan *civil society* secara kuat dan demokratis. Hal ini juga berarti penguatan posisi masyarakat dalam hubungannya dengan pemerintah daerah.

Secara kelembagaan baik yang menyangkut penerapan peran dan fungsi eksekutif dan legislatif maupun yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah masih menuntut perhatian yang mendalam dengan visi yang luas untuk mengatasinya. Kepemimpinan yang bersih dan efektif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan masih merupakan agenda politik utama yang mendesak, terutama dalam mengatasi persoalan KKN dalam birokrasi penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, kepemimpinan yang memiliki kredibilitas dan visi menjadi faktor yang cukup penting selain pembenahan dalam bidang struktural kelembagaan. Meningkatnya transparansi dan keterbukaan informasi adalah masalah dan tantangan yang menuntut komitmen yang kuat terhadap demokrasi dari berbagai pihak.

B. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai pada peningkatan demokratisasi pemerintahan dan partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Menguatnya kesempurnaan dan kesesuaian kelembagaan penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan.
2. Terpeliharanya konsolidasi demokrasi berdasarkan hasil-hasil proses pemilihan.

C. Kebijakan Umum

Untuk menciptakan kehidupan politik yang demokratis melalui upaya penegakan kedaulatan rakyat serta partisipasi masyarakat, diperlukan pembinaan dan pengembangan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Arah kebijakan untuk meningkatkan demokratisasi pemerintahan dan partisipasi masyarakat dilakukan melalui upaya :

1. Penegakan sistem demokrasi yang baik dan benar.
2. Pelaksanaan sistem rekrutmen politik yang didasarkan kemampuan dan prestasi.

3. Peningkatan peran dan fungsi DPRD dalam menyerap, mengartikulasikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
4. Peningkatan kualitas lembaga dan organisasi partai politik dalam menjalankan fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan berdasarkan etika dan moral yang sehat.
5. Terciptanya ruang komunikasi politik yang baik dan benar antara pemerintah dan masyarakat.
6. Pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yang tidak diskriminatif.
7. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengartikulasikan kepentingannya secara beretika dan menjunjung tinggi hukum.
8. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik dengan etika komunikasi yang sehat.
9. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, menikmati hasil kebijakan dan ikut terlibat dalam mengevaluasi kebijakan publik.
10. Terwujudnya debat publik yang rasional, objektif, argumentatif dan faktual mengenai hal yang berhubungan dengan kepentingan umum.
11. Peningkatan budaya politik masyarakat untuk menggunakan mekanisme dan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam menyalurkan aspirasi dan kepentingan.
12. Terwujudnya prinsip keadilan gender dalam berbagai kegiatan pemerintahan daerah.
13. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

BAB IX.

PENINGKATAN KUALITAS DAN INFORMASI KETENAGA KERJAAN

A. Kondisi Umum

Penciptaan kesempatan kerja belum dapat mengurangi pengangguran secara berarti dimana pada tahun 2004, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 104.123 jiwa (61,30%) dari jumlah penduduk dengan tingkat ketergantungan 63,15%. Kalau kita lihat dari kuantitas terdapat jumlah usia produktif lebih besar dari usia non produktif, namun kalau dibandingkan dengan tingkat ketergantungan tergambar tingginya tingkat pengangguran. Sementara disisi lain, pendidikan angkatan kerja serta informasi ketenaga kerjaan sangat terbatas terutama yang berhubungan dengan lowongan pekerjaan.

Permasalahan yang dihadapi di bidang ketenaga kerjaan, antara lain :

1. Tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan akibat sulitnya lapangan pekerjaan.
2. Pendidikan dan keterampilan angkatan kerja masih rendah.
3. Informasi dan penyaluran tenaga kerja belum tertata dengan baik.

B. Sasaran

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan informasi ketenaga kerjaan di Kabupaten Dharmasraya, sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan dan magang.
2. Terciptanya hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pengusaha.
3. Meningkatnya kesejahteraan warga transmigrasi.

C. Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, kebijakan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan informasi ketenaga kerjaan dititik beratkan kepada :

1. Peningkatan kualitas keterampilan, kompetensi dan kemandirian tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan kerja dan pengembangan di tempat kerja.
2. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja untuk mendorong kesempatan kerja pada industri padat karya.
3. Peningkatan sistem jaminan sosial tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan kerja.
4. Peningkatan kualitas dokumen, data dan informasi ketenaga kerjaan.
5. Peningkatan SDM warga transmigrasi melalui penempatan, pembinaan serta pelatihan transmigrasi untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

BAGIAN KETIGA

**AGENDA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEHAT
DALAM LINGKUNGAN YANG BERSIH,
AMAN DAN NYAMAN**

BAB X.

PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN DAN PEMERATAAN KESEHATAN

A. Kondisi Umum

Sesuai dengan UUD 1945, pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Dharmasraya telah menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya namun masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya aksesibilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dapat diukur melalui tingkat kematian bayi (0-1 tahun), ibu melahirkan dan umur harapan hidup, dimana AKI (Angka Kematian Ibu) sekitar 390 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2003, dan pada tahun 2004 tercatat kematian ibu melahirkan sebanyak 5 orang dari 3.848 ibu melahirkan atau AKI sebesar 130 orang/100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2003 sebesar 16,9 per 1.000 kelahiran. Sedangkan pada tahun 2004 sebesar 20,99 dari 3.145 kelahiran.

Status gizi (anak balita, ibu hamil, ibu menyusui dan anemia anak remaja) masih rendah yaitu :

1. Gizi buruk lebih dari 5% dan gizi kurang 24,3%.
2. Anemia gizi besi ibu hamil 60%.
3. Anemia gizi besi remaja putri mencapai 70% dan endemik Gaky dengan TGR masih diatas 30% dan masih tingginya tingkat kesakitan yang disebabkan penyakit infeksi-diare 23,89% pada tahun 2004.
4. ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) 32,9% pada tahun 2004.
5. Malaria 36,79/ 1.000 orang (AMI) tahun 2004.

6. Suspek TB sebesar 25,6%, sedangkan CDR 23,4% dan CFR 52,6% serta rendahnya cakupan kesehatan lingkungan seperti cakupan sarana air bersih baru mencapai 20%, dimana standar nasional untuk cakupan air bersih sebesar 60%.
7. Cakupan jamban keluarga tahun 2004 baru mencapai 36%.
8. Cakupan hasil pemeriksaan TTU baru mencapai 53,8% (tahun 2004) seharusnya 100% dari TTU yang ada.
9. Sedangkan Pemberdayaan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) baru mencapai 2,65% tahun 2004.

Peningkatan kinerja di bidang kesehatan tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah maupun pusat dalam meningkatkan fasilitas atau jumlah sarana dan prasarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan lainnya juga peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan serta penyediaan obat-obatan esensial bagi masyarakat.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat dilihat dari :

1. Pelayanan kesehatan dasar melalui peningkatan pelayanan di puskesmas dan pustu, dimana pada tahun 2004 jumlah kunjungan puskesmas mencapai 129.768 orang dan rawat jalan 48.880 orang.
2. Peningkatan prasarana dan sarana dari RSUD, puskesmas dan pustu melalui perbaikan gedung, kelengkapan peralatan yang dibutuhkan, dimana Kabupaten Dharmasraya hanya mempunyai 1 RSUD, 8 puskesmas, 45 pustu, 66 polindes dan 171 posyandu.
3. Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan.

Permasalahan di bidang kesehatan perlu mendapat perhatian pada tahun 2006, terutama pada :

1. Masih rendahnya kualitas kesehatan penduduk yang terlihat dari tingginya angka kematian bayi, balita dan ibu melahirkan.

2. Rendahnya tingkat gizi masyarakat.
3. Tingginya angka kematian akibat penyakit menular.
4. Belum meratanya jumlah, penyebaran, komposisi serta mutu tenaga kesehatan pada setiap puskesmas.
5. Kurangnya tenaga kesehatan sehingga masih banyak pustu yang tidak ditempati, hanya dikunjungi secara berkala oleh tenaga kesehatan puskesmas.
6. Belum optimalnya polindes dan posyandu sebagai ujung tombak untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di desa (Jorong dan Nagari).

B. Sasaran

Sasaran pembangunan kesehatan tahun 2006 dititik beratkan untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terutama penduduk miskin. Sasaran peningkatan derajat kesehatan dan pemerataan kesehatan :

1. Meningkatnya proporsi keluarga yang berperilaku hidup bersih dan sehat.
2. Meningkatnya tingkat kunjungan masyarakat ke Puskesmas, Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan.
3. Meningkatnya cakupan imunisasi.
4. Menurunnya angka kelahiran dan kematian akibat penyakit menular.
5. Menurunnya prevalensi kurang gizi pada balita.
6. Meningkatnya pemerataan tenaga kesehatan.
7. Meningkatnya ketersediaan obat esensial.
8. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan.
9. Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan.

C. Arah Kebijakan

Peningkatan derajat kesehatan dan pemerataan kesehatan diarahkan pada :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan berkualitas terutama bagi masyarakat miskin.
2. Peningkatan pemerataan dan jangkauan pelayanan kesehatan melalui pemerataan dan peningkatan kualitas Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas dan RS.
3. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui peningkatan kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat serta peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat sejak usia dini.
4. Peningkatan kualitas kesehatan melalui peningkatan kualitas gizi masyarakat terutama bagi balita, remaja, ibu hamil dan peningkatan kesehatan reproduksi remaja serta pemahaman hak-hak kesehatan reproduksi remaja.

BAB XI.
PENINGKATAN KUALITAS PERLINDUNGAN SOSIAL,
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

A. Kondisi Umum

Pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dari tahun ke tahun terjadi peningkatan dan memperlihatkan kondisi yang menggembirakan terutama bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti pemberdayaan terhadap anak terlantar, santunan bagi usia lanjut terlantar. Selain itu juga telah dilakukan pemberdayaan peran keluarga dan keluarga fakir miskin dalam bentuk kelompok usaha bersama serta juga telah dilaksanakan rehabilitasi dan perlindungan sosial terhadap penyandang cacat dan anak cacat, kemudian juga telah dilaksanakan pembinaan terhadap kelompok tuna sosial serta pemberian bantuan kepada para korban bencana alam.

Permasalahan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya selama ini adalah :

1. Masih rendahnya kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
2. Belum tertatanya sistem dan standar pelayanan minimal bidang kesejahteraan sosial.

Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas merupakan salah satu langkah penting dalam mencapai peningkatan kualitas SDM, pengendalian kuantitas penduduk secara berkesinambungan diperlukan untuk menjamin tercapainya penduduk tumbuh seimbang di masa yang akan datang. Peningkatan kualitas keluarga kecil juga dilaksanakan antara lain melalui berbagai bidang pembangunan termasuk keluarga berencana. Disamping itu, penataan administrasi kependudukan dilakukan untuk mendukung administrasi kependudukan di Kabupaten Dharmasraya. Bila kita perhatikan jumlah keluarga menurut tingkat kesejahteraan dan pencapaian KB pada tahun 2004 terdapat 35.347 kepala keluarga dengan tingkat kesejahteraan keluarga sebagai berikut :

1. Pra sejahtera : 3.237 KK
2. Sejahtera I : 7.371 KK
3. Sejahtera II : 16.904 KK
4. Sejahtera III : 4.788 KK
5. Sejahtera III Plus : 1.342 KK

Berdasarkan data tersebut diatas secara kuantitatif tingkat kesejahteraan penduduk yang berada pada taraf kemiskinan sekitar 10.68 KK (30,01%). Sedangkan pencapaian KB pada tahun 2003, dimana PUS sekitar 29.293 orang, target 21.441 orang dengan pencapaian cakupan KB 22.008 (102,64%) dibandingkan tahun 2003 pencapaian KB aktif mencapai 19.275 orang (98,89%) atau meningkat sekitar 3,73%.

Dari kondisi perkembangan diatas ditemui beberapa permasalahan, diantaranya adalah :

1. Masih tingginya laju pertumbuhan dan jumlah penduduk.
2. Masih tingginya tingkat kelahiran.
3. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran pasangan usia subur dan remaja tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi.
4. Rendahnya partisipasi pria dalam melaksanakan KB.
5. Belum tertatanya administrasi kependudukan untuk pembangunan keberlanjutan.

B. Sasaran

Sasaran pembangunan peningkatan kualitas perlindungan sosial, kependudukan dan keluarga berencana, adalah :

1. Meningkatnya PMKS dan kelompok rentan lainnya yang mendapat pelayanan dan pembinaan.
2. Meningkatnya jumlah keluarga fakir miskin, masyarakat terpencil dan PMKS lainnya yang diberdayakan.

3. Menurunnya persentase fakir miskin, keluarga rentan sosial ekonomi dan masyarakat terpencil.
4. Meningkatnya jumlah relawan sosial, karang taruna dan organisasi sosial masyarakat yang diberdayakan.
5. Terjaminnya bantuan sosial bagi korban bencana alam.
6. Menurunnya angka kelahiran.
7. Meningkatnya pencapaian peserta KB aktif.
8. Menurunnya keluarga pra sejahtera dan sejahtera I menjadi anggota UPPKS.
9. Meningkatnya jumlah keluarga dalam meningkatkan kemampuannya dalam pengasuhan dan pengembangan anak.
10. Meningkatnya usia kawin pertama wanita.
11. Tersedianya sistem informasi data kependudukan.

C. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang akan ditempuh untuk meningkatkan kualitas perlindungan sosial, kependudukan dan keluarga berencana adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya aksesibilitas dan kuantitas hidup PMKS dan kelompok lainnya terhadap pelayanan sosial dasar.
2. Meningkatnya pemberdayaan bagi keluarga miskin, masyarakat terpencil dan PMKS lainnya.
3. Meningkatnya profesionalitas pelayanan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha terhadap PMKS.
4. Meningkatnya prakarsa dan peran aktif sosial yang melibatkan semua unsur dan komponen masyarakat termasuk dunia usaha, LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial. Meningkatnya kualitas penyuluhan kesejahteraan sosial.
5. Terjaminnya persediaan bantuan dasar bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lainnya.

6. Perluasan kesempatan melalui pengembangan dan peningkatan kualitas SDM dalam penanggulangan kemiskinan.
7. Peningkatan kemampuan kelembagaan dalam peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin.
8. Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dengan menyediakan sistem jukaminan sosial.
9. Peningkatan kualitas penduduk serta meningkatkan keluarga kecil berkualitas.
10. Peningkatan pendataan pembangunan kependudukan untuk mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk dan meningkatkan kualitas dokumen, data dan informasi penduduk secara terpadu dan sinergi antar instansi terkait.

BAB XII.

PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

A. Kondisi Umum

Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam upaya agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat, ini dapat diwujudkan melalui kerjasama antar masyarakat dan aparaturnya yang terlibat, seperti pihak keamanan dan aparaturnya penegak hukum lainnya.

Kondisi kamtibmas Kabupaten Dharmasraya tahun 2004 dilihat dengan peristiwa pencurian sebanyak 80 kasus, diikuti oleh perjudian sebanyak 28 kasus, penganiayaan sebanyak 20 kasus, perbuatan cabul sebanyak 10 kasus, membawa kayu tanpa dokumen sah sebanyak 15 kasus, kebakaran sebanyak 14 kasus dan lain sebagainya sebanyak 42 kasus.

B. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat :

1. Menurunnya indeks kriminalitas.
2. Meningkatnya tingkat penyelesaian kasus kriminalitas.
3. Menurunnya pencurian kayu tanpa dokumen yang sah.
4. Menurunnya konflik kriminal.

C. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang akan ditempuh untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara pihak keamanan dan aparaturnya penegak hukum lainnya.

2. Meningkatkan peran aktif masyarakat untuk peran serta bersama pihak kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Melakukan operasi bersama dengan lintas sektor dalam menjaga kelestarian hukum.

BAB XIII.

PENINGKATAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA ALAM

A. Kondisi Umum

Pembangunan yang seimbang dan terpadu antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup adalah prinsip pembangunan yang senantiasa menjadi dasar pertimbangan utama bagi seluruh sektor dan daerah guna mengamankan keberlanjutan proses pembangunan, peningkatan, pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam diharapkan dapat mendukung perekonomian daerah tanpa mengorbankan fungsi lingkungan hidupnya.

B. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan, pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam adalah :

1. Penegakan hukum terhadap penebangan liar maupun perambahan kawasan hutan.
2. Penetapan kawasan hutan dalam tata ruang yang mempertahankan aspek lingkungan sosial budaya.
3. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
4. Terwujudnya peran serta masyarakat dan perlindungan hak-hak masyarakat dalam pengelolaan hutan.
5. Terkelolanya kawasan konservasi secara terpadu.
6. Tersedianya informasi yang jelas tentang potensi hasil hutan kayu maupun non kayu.
7. Terbukanya peluang usaha pertambangan dan berkembangnya usaha pertambangan.
8. Menurunnya pertambangan tanpa izin dan pertambangan rakyat yang merusak lingkungan hidup.

9. Meningkatnya diversifikasi usaha dan industri hilir yang berbasis pada produk sumber daya mineral.
10. Tersusunnya informasi dan peta wilayah yang rentan terhadap kerusakan lingkungan, bencana banjir, kekeringan serta bencana alam lainnya.
11. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.
12. Peningkatan penegakan hukum lingkungan bagi para pelanggar maupun perusak lingkungan.
13. Meningkatnya mutu rencana tata ruang kabupaten dan kawasan prioritas, kawasan tertentu dan kawasan perbatasan.

C. Arah Kebijakan

Peningkatan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam berarti pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan daya dukung lingkungannya yang diarahkan untuk :

1. Meningkatnya data dan informasi sumber daya alam melalui survey dan pemetaan.
2. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian melalui peraturan perundang-undangan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum bagi pelanggar.
3. Meningkatnya rehabilitasi dan pemulihan kualitas sumber daya alam melalui penghijauan dan reboisasi.
4. Meningkatnya proses produksi yang ramah lingkungan melalui penggunaan teknologi yang efisien serta tidak menimbulkan limbah.
5. Meningkatnya SDM yang paham mengenai lingkungan hidup melalui pendidikan, workshop maupun lokakarya.
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam melalui sosialisasi, penyuluhan serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pelestarian sumber daya alam.

BAGIAN KEEMPAT

AGENDA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERPENDIDIKAN DAN MENGUASAI TEKNOLOGI

BAB XIV.

PENINGKATAN PEMERATAAN DAN MUTU PENDIDIKAN

A. Kondisi Umum

Pendidikan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan bangsa serta memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan transparansi sosial. Pendidikan akan menciptakan masyarakat terpelajar yang menjadi prasyarat terbentuknya masyarakat yang maju, mandiri, demokratis, sejahtera dan bebas dari kemiskinan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional tahun 2003 menyimpulkan bahwa Pendidikan di Indonesia sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi, kenaikan rata-rata 1%. Pendidikan tenaga kerja menaikkan *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) atau ekonomi riil per kapita sebesar 0,29% dengan asumsi yang lain tetap. Sementara itu kenaikan rata-rata pendidikan penduduk akan menaikkan PDRB sebesar 0,19%. Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa, pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak saja dipengaruhi oleh meningkatnya pendidikan tenaga kerja tetapi juga oleh pendidikan penduduk secara keseluruhan.

Perkembangan pendidikan di Kabupaten Dharmasraya tahun 2004 belum sepenuhnya mampu memberikan pelayanan secara lebih merata, berkualitas dan terjangkau yang antara lain ditunjukkan dari gambaran kondisi pendidikan pada tahun ajaran 2004/2005 adalah :

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI sebesar 102% dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI sebesar 90%, berarti masih ada 10% sekitar 2.222 orang anak usia 7-12 tahun yang belum tertampung di SD/MI.
2. APK SMP/MTs tahun ajaran 2004/2005 yaitu 65,7% dan APM SMP/MTs sebesar 49,3%, kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada 50,7% atau sebanyak 5.566 orang anak usia 13-15 tahun (10.979 orang) yang belum tertampung di SMP/MTs.

3. APK SMA/MA hanya mencapai 28,78% dan APM SMA/MA hanya mencapai 24,78% berarti masih terdapat 75,22% atau sebanyak 8.303 orang anak usia 16-18 tahun yang belum tertampung pada SMA/MA.

Dengan kondisi ini, pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah mengagendakan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2005-2010 untuk mewujudkan masyarakat yang berpendidikan. Rendahnya cakupan layanan pendidikan bagi anak usia dini (PADU) terlihat dari 7.949 orang anak berusia 5-6 tahun yang terlayani pada TK hanya 2.457 orang dan pada RA sebanyak 286 orang.

Permasalahan lain di bidang pendidikan masih kurangnya pembinaan terhadap anak-anak putus sekolah. Hal ini terlihat hanya 1 paket kejar usaha dan 4 kelompok kejar paket A dengan anggota 45 orang. Disamping itu, belum optimalnya pengelolaan pengembangan pendidikan keterampilan (*life skill*) yang diarahkan pada peningkatan kemampuan peserta didik agar memperoleh peluang kerja pada perusahaan terkait atau bisa mandiri berusaha, belum optimalnya pendidikan perempuan yang diarahkan pada pengarus utamaan gender. Selain itu, juga masih belum optimalnya program peningkatan kemitraan usaha dan peningkatan peran pemuda dalam membantu percepatan pembangunan di pedesaan.

Selain upaya untuk meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan juga dilakukan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan lulusan, sehingga dengan tersedianya lulusan sekolah yang berkualitas maka diharapkan akan tersedia tenaga kerja yang berkualitas sehingga memiliki kemampuan untuk berkompetisi dalam mencari dan menciptakan lapangan kerja.

Meskipun pelaksanaan kegiatan di berbagai bidang pendidikan telah menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2003, namun masih ditemui berbagai permasalahan dalam mencapai tujuan pembangunan pendidikan Kabupaten Dharmasraya antara lain :

1. Masih rendahnya tingkat pemerataan pada Pendidikan Dasar dan Menengah yang ditandai dengan belum tuntasnya program Wajib Belajar 9 tahun.

2. Keterbatasan kemampuan sebagian masyarakat untuk memenuhi biaya pendidikan
3. Belum optimalnya penyelenggaraan manajemen pendidikan.
4. Belum optimalnya penyelenggaraan manajemen Pendidikan.
5. Belum optimalnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan penyelenggaraan pendidikan non formal.

B. Sasaran

Berdasarkan kondisi dan permasalahan yang ada, maka untuk meningkatkan pemerataan mutu dan relevansi pendidikan ditetapkan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2007 sebagai berikut :

1. Meningkatkan jumlah anak berusia 4-6 tahun pada lembaga PADU menjadi 35 %.
2. Meningkatnya angka partisipasi sekolah antara lain :
 - Angka partisipasi murni SD/MI/Paket A menjadi 94,5 %
 - Meningkatnya angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B menjadi sebesar 67 %
 - Meningkatnya angka partisipasi murni SMA/MA/SMK/Paket C menjadi 28%
3. Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan sesuai standarisasi yang ditetapkan.
4. Meningkatnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi standarisasi yang ditetapkan.
5. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan.
6. Meningkatnya penyelenggaraan kurikulum berbasis kompetensi.
7. Meningkatnya penyelenggaraan layanan pendidikan bagi anak cacat.
8. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan non formal.

C. Arah Kebijakan

Kebijakan peningkatan pemerataan mutu dan relevansi pendidikan diarahkan kepada :

1. Peningkatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan bagi anak usia dini.
2. Peningkatan pemerataan Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Peningkatan penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan
4. Pemberian kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat tidak mampu dan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.
5. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan non formal.
6. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
7. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
8. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.
9. Peningkatan manajemen pendidikan.

BAB XV.

PENINGKATAN KUALITAS DAN PERAN PEREMPUAN

A. Kondisi Umum

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tidak akan terwujud tanpa adanya partisipasi segenap komponen masyarakat baik laki-laki maupun perempuan yang pada dasarnya merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan inovatif sebagai sumber penggerak yang dilakukan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peningkatan kualitas dan peran perempuan di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada buku "*Dharmasraya dalam angka tahun 2004*", dimana untuk pemerataan kesempatan belajar pada penuntasan wajib belajar 9 tahun, jumlah anak perempuan yang bersekolah pada SD dan MI sebanyak 10568 orang sedangkan anak laki-laki sebanyak 11.409 orang.

Dalam kesempatan untuk memperoleh bea siswa juga masih terjadi kesenjangan antara anak perempuan dengan anak laki-laki yaitu jumlah murid SD perempuan yang mendapatkan beasiswa sebanyak 1.325 orang, sedangkan jumlah murid SD laki-laki yang mendapatkan bea siswa sebanyak 2.800 orang. Hal ini juga terjadi pada tingkat SLTP, dimana jumlah siswa perempuan yang memperoleh bea siswa sebanyak 437 orang lebih rendah dibanding laki-laki sebanyak 580 orang. Jabatan Kepala Sekolah SD yang dijabat oleh perempuan sebanyak 31 orang pada tahun 2003 dan laki-laki sebanyak 106 orang, sedangkan Kepala Sekolah SMP yang dijabat oleh perempuan tidak ada, sedangkan yang laki-laki sebanyak 17 orang.

Permasalahan pada peningkatan kualitas dan peran perempuan, adalah :

1. Masih rendahnya SDM perempuan dibandingkan laki-laki.
2. Terdapatnya kesenjangan kesempatan dalam bidang karir dan belum berperannya perempuan dalam mengambil keputusan untuk menunjang pembangunan.

B. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kualitas SDM perempuan, kedudukan dan peran perempuan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan.
2. Terlaksananya berbagai upaya perlindungan terhadap perempuan.
3. Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan.
4. Terwujudnya pembangunan sektor yang responsif gender melalui upaya pengarus utamaan gender yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan bahkan nagari.
5. Tersedianya data dan statistik gender.
6. Menguatnya kelembagaan dan jaringan pengarus utamaan gender (PUG) di tingkat kabupaten dan kecamatan.
7. Tersusunnya kebijakan dan program pembangunan daerah yang responsif gender.

C. Arah Kebijakan

Berdasarkan permasalahan dan kondisi yang dihadapi, maka arah dan kebijakan daerah yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan peran perempuan di bidang politik.
2. Penguatan kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarus utamaan gender di tingkat kabupaten maupun kecamatan.

BAB XVI.

PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN BUDAYA DAERAH

A. Kondisi Umum

Sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Dharmasraya sebagai potensi wisata daerah, apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik akan dapat menunjang perekonomian masyarakat seperti wisata sejarah/budaya, wisata alam, dan lainnya. Namun keterbatasan dari berbagai aspek baik terkait dengan sistem maupun sumber daya aparatur menyebabkan pengelolaan objek wisata yang ada belum dilakukan secara matang seperti objek wisata air terjun Timbulun Indah, bendungan Batang Hari (Batu Bakawik), air terjun Batang Pangian Batu Kangkung, Panorama puncak Gunung Medan, Wisata Perkebunan, Ngalau Cigak (gua), wisata buru babi dan situs kerajaan Dharmasraya Sungai Lansek, dan lainnya.

Selain objek wisata dapat juga dikembangkan event atau atraksi wisata khas daerah seperti selaju sampan, motor cross, adu bagong (adu beberapa anjing memburu babi), dan lainnya. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata dan budaya daerah di Kabupaten Dharmasraya, adalah :

1. Objek wisata yang ada belum terkelola dengan baik dan profesional.
2. Kurangnya promosi dan jaringan informasi pariwisata.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat pariwisata dan budaya daerah.

B. Sasaran

Dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan memajukan kebudayaan daerah Kabupaten Dharmasraya adalah dengan pengembangan pariwisata dan budaya daerah dengan sasaran yang ingin dicapai, antara lain :

1. Terkelolanya tempat pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisata.
2. Terkelolanya budaya daerah dalam menunjang pariwisata.

C. Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai, maka kebijakan pembangunan diarahkan kepada :

1. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam pengelolaan kepariwisataan daerah.
2. Pengembangan kawasan pariwisata budaya dari daerah Kerajaan Siguntur di Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung.
3. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan pariwisata.

BAB XVII.
PENINGKATAN KUALITAS GENERASI MUDA DAN
PENGEMBANGAN OLAH RAGA

A. Kondisi Umum

Sebagaimana lazimnya daerah yang baru berkembang, maka hal-hal yang bersifat prestisius dalam berbagai event kompetisi relatif masih belum memperlihatkan hasil yang membanggakan. Upaya pembinaan terhadap generasi muda terus dilaksanakan, sehingga keberadaan pemuda dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Dharmasraya, seperti menjadi pelopor pembangunan Nagari atau lingkungan tempat tinggalnya.

Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan kualitas generasi muda dan pengembangan olah raga, diantaranya adalah :

1. Terbatasnya kemampuan organisasi kepemudaan dalam menampung aspirasi pemuda.
2. Sebagian masyarakat belum memberikan dukungan terhadap kreatifitas dan aktivitas generasi muda.
3. Tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan pengembangan olah raga.

B. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan kualitas generasi muda dan pengembangan olah raga adalah, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pemuda melalui perluasan akses dan keikutsertaan pemuda dalam berbagai kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Meningkatnya kemandirian pemuda dalam menciptakan lapangan kerja sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya.
3. Meningkatnya pembangunan terhadap organisasi (berbagai macam bidang olah raga), atlet dan pelatih atau pembina olah raga.

4. Meningkatnya sarana dan prasarana olah raga baik kualitas maupun kuantitas.
5. Menjadikan olah raga sebagai budaya masyarakat.

C. Arah Kebijakan

Arah kebijakan peningkatan kualitas generasi muda dan pengembangan olah raga, adalah :

1. Meningkatnya kualitas dan kapasitas pemuda dengan menanamkan dan menumbuhkan kembangkan semangat dan jiwa kepemimpinan serta jiwa kewirausahaan.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas olahragawan.
3. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan daerah.

BAGIAN KELIMA

**AGENDA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG
RELIGIUS, BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA
ESA, RUKUN PENUH KEDAMAIAN, BERBUDAYA
SERTA DIDUKUNG OLEH SUPREMASI HUKUM DAN
STABILITAS POLITIK YANG HANDAL**

BAB XVIII.
PENINGKATAN PEMBANGUNAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN
HAK AZAZI MANUSIA (HAM)

A. Kondisi Umum

Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengatur kepentingan. Disamping itu juga merupakan perangkat, norma yang mewadahi nilai-nilai sosial dan aturan berperilaku, tetapi juga merupakan suatu instrumen untuk menggerakkan dan mengarahkan dinamika sosial untuk mewujudkan tujuan pembangunan hukum daerah.

Salah satu tugas yang sampai saat ini belum dituntaskan adalah pembentukan sistem hukum daerah yang aspiratif dan mengacu kepada hukum nasional yang mencerminkan cita-cita, jiwa, semangat serta nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang di daerah perlu diwujudkan. Sebagaimana yang telah digambarkan kinerja pembangunan hukum dan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, masih adanya permasalahan yang menghambat dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan hukum yaitu :

1. Pembangunan hukum yang selalu berorientasi kepada hukum nasional yang mengakibatkan produk hukum yang dibuat kurang aspiratif dan akomodatif sehingga sulit dilaksanakan.
2. Pelaksanaan atau penegakan hukum dan perlindungan HAM yang belum berjalan secara maksimal dan konsisten yang mengakibatkan terjadinya berbagai bentuk pelecehan hak dan kewajiban yang dilakukan baik oleh masyarakat atau aparat yang seharusnya menjadi tuntunan.
3. Timbulnya krisis kepercayaan/sorotan tajam di kalangan masyarakat terhadap hukum, etika dan moral karena hukum yang merupakan jaminan hak dan kewajiban tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

4. Produk hukum yang ada kadangkala tidak mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi, sehingga materinya ganda atau bertentangan.

B. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai pada peningkatan pembangunan hukum dan perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM) adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya produk hukum daerah yang aspiratif dan akomodatif sesuai dengan kewenangan dan norma hukum yang berlaku.
2. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dan aparat terhadap produk hukum daerah.
3. Meningkatnya kemajuan hukum dan penegakan HAM.
4. Meningkatnya kualitas hukum dan perlindungan HAM.
5. Tertatanya produk hukum dan sistem hukum daerah yang aspiratif dan akomodatif yang mengacu kepada hukum nasional.
6. Adanya dokumentasi dan informasi produk hukum daerah.
7. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap hukum dan HAM yang dapat menjamin hak dan kewajiban.
8. Terlaksananya pembangunan produk hukum daerah yang aspiratif yang mewadahi nilai-nilai sosial budaya yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat.

C. Kebijakan Umum

Untuk meningkatkan pembangunan hukum dan perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM) dilakukan dengan arah:

1. Pembangunan materi hukum, struktur hukum dan perlindungan HAM.
2. Pembinaan, penyusunan dan pengawasan serta evaluasi produk hukum daerah.
3. Penegakan supremasi hukum, legislatif hukum, sengketa dan perlindungan HAM.
4. Penyuluhan hukum dan HAM.

5. Pelatihan teknis aparat pengelola produk hukum / penegak hukum.
6. Pembentukan sistem hukum dan penataan produk hukum daerah yang aspiratif dan akomodatif yang mengacu kepada hukum nasional.
7. Dokumentasi dan informasi hukum dan HAM.
8. Supremasi hukum, bantuan hukum, sosialisasi hukum dan perlindungan HAM.

BAB XIX.
PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN
NILAI-NILAI KEAGAMAAN

A. Kondisi Umum

Pembangunan agama merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak memeluk agama dan beribadat menurut keyakinan masing-masing sebagai mana diatur dalam UUD 1945 Bab IX Pasal 29 ayat 1 dan 2. Kondisi peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat dalam buku "*Dharmasraya dalam angka tahun 2004*", dimana pemeluk agama Islam mencapai 99,24% dan Protestan mencapai 0,38%, Katolik mencapai 0,35%, Budha mencapai 0,02% dan Hindu mencapai 0,01%.

Kabupaten Dharmasraya yang penduduknya mayoritas beragama Islam mempunyai 146 Masjid dan 379 Mushola dan langgar, serta sarana pendidikan agama seperti TPA dan TPSA yang jumlahnya mencapai 259 buah, terdiri dari 173 TPA dan 86 TPSA. Permasalahan yang ditemui dalam peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, adalah :

1. Belum optimalnya pengamalan ajaran agama dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.
2. Belum optimalnya penggunaan sarana agama sebagai tempat ibadah dan tempat kegiatan sosial lainnya.

B. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan adalah :

1. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat.
2. Meningkatnya peran serta lembaga sosial keagamaan dalam lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan.

3. Meningkatnya kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
4. Meningkatnya kerukunan intern antar umat beragama.
5. Meningkatnya kualitas tenaga penyuluh agama, dan tenaga pelayanan keagamaan lainnya.
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, wakaf, infaq dan sedekah.

C. Arah Kebijakan

Dalam mewujudkan pembangunan dalam peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, maka arah kebijakan dilakukan, melalui :

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
2. Peningkatan kerukunan hidup beragama.
3. Peningkatan peran serta lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan.

BAB XX.
PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN
NILAI-NILAI ADAT DAN BUDAYA DAERAH

A. Kondisi Umum

Peningkatan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya daerah di Kabupaten Dharmasraya perlu ditingkatkan sebagai upaya untuk melestarikan adat dan budaya daerah dan sebagai filter dalam menyaring/menyerap budaya yang datang dari luar.

Permasalahan yang ditemui dalam peningkatan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya daerah :

1. Belum optimalnya pengamalan nilai-nilai adat dan budaya daerah dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Belum optimalnya lembaga adat melakukan fungsinya dalam membina masyarakat dalam pembangunan.

B. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya daerah, adalah :

1. Meningkatnya peran serta lembaga adat dalam mempertahankan nilai-nilai adat dan budaya daerah.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai adat dan budaya daerah.

C. Arah Kebijakan

Dalam mewujudkan peningkatan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya daerah, maka arah kebijakan dilakukan melalui :

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat istiadat kepada masyarakat.
2. Peningkatan peran serta lembaga adat dalam membimbing pemahaman, penghayatan dan pengamalan norma-norma adat di lingkungan masyarakat.

REKAPITULASI ANGGARAN DANA TAHUN 2007 BERDASARKAN AGENDA PEMBANGUNAN

No	Agenda Pembangunan	Pagu Indikatif (Rp)		
		APBD II	APBD I	APBN
I	Agenda Mewujudkan Masyarakat yang Produktif Rukun dan Memiliki Ekonomi yang Tangguh	78.097.909.200	18.031.146.800	147.250.500.000
1	Peningkatan Produksi dan Pengamanan Ketahanan Pangan dan Pengembangan Sistem Agribisnis untuk Meningkatkan Pendapatan Petani	6.312.468.750	93.146.800	61.726.500.000
2	Menata Kelembagaan dan Memberdayakan Pelaku Usaha	1.420.940.450	0	0
3	Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Peningkatkan Jaringan Informasi dan Promosi Usaha	1.585.000.000	0	0
4	Pengembangan Industri Kerajinan dan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian	866.000.000	0	0
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar	67.913.500.000	17.938.000.000	85.524.000.000
II	Agenda Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Penuh Pengabdian (Good Governance)	191.367.493.133	198.500.000	524.939.750
6	Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Birokrasi dan Administrasi Publik	190.204.275.433	0	341.189.750
7	Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Pemerintahan Nagari	661.167.700	50.000.000	0
8	Peningkatan Demokratisasi Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat	384.800.000	0	0
9	Peningkatan Kualitas dan Informasi Ketenagakerjaan	117.250.000	148.500.000	183.750.000
III	Agenda Mewujudkan Masyarakat yang Sehat dalam Lingkungan yang Bersih, Aman dan Nyaman	9.800.303.300	-689.450.000	8.036.484.020
10	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Pemerataan Kesehatan	7.906.199.500	-960.000.000	5.536.484.020
11	Peningkatan Kualitas Perlindungan Sosial, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.369.700.000	270.550.000	2.500.000.000
12	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	249.403.800	0	0
13	Peningkatan dan Pengendalian Sumber Daya Alam	275.000.000	0	0
IV	Agenda Mewujudkan Masyarakat yang Berpendidikan dan Menguasai Teknologi	14.532.854.700	9.150.000.000	0
14	Peningkatan Pemerataan dan Mutu Pendidikan	11.799.500.000	8.700.000.000	0
15	Peningkatan Kualitas dan Peran Perempuan	413.354.700	0	0
16	Pengembangan Pariwisata dan Budaya Daerah	795.000.000	450.000.000	0
17	Peningkatan Kualitas Generasi Muda dan Pengembangan Olah Raga	1.525.000.000	0	0

V	Agenda Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rukun Penuh Kedamaian, Berbudaya serta Didukung oleh Supremasi Hukum dan Stabilitas Politik yang Handal	1.025.619.225	50.000.000	0
18	Peningkatan Pembangunan Hukum dan Perlindungan Hak Azazi Manusia (HAM)	402.000.000	0	0
19	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan	585.000.000	50.000.000	0
20	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Nilai-Nilai Adat dan Budaya Daerah	38.619.225	0	0
	JUMLAH	294.824.179.558	26.740.196.800	155.811.923.770

MATRIK PROGRAM PEMBANGUNAN PENINGKATAN PRODUKSI DAN PENGAMANAN KETAHANAN PANGAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AGRIBISNIS UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI

No	Program/Kegiatan Pokok dalam RPJM 2006-2010	Program/Kegiatan Pokok dalam RKPD 2007	Sasaran Program Tahun 2007	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp)		
					APBD II	APBD I	APBN
1	Program : Peningkatan Ketahanan Pangan	Program : Peningkatan Ketahanan Pangan					
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :					
	- Pengembangan kelembagaan ketahanan pangan tingkat Kabupaten dan Nagari	1 Pengembangan Perikanan Budidaya (Budidaya Kolam dan Kerambah)	Terciptanya Bahan Pangan berprotein Hewani	Dinas Pertanian	50.000.000		
	- Peningkatan distribusi pangan	2 Perintisan Model Pelestarian Lingkungan Perairan Umum	Terjaminnya Produksi ikan lestari sebagai sumber bahan pangan berprotein hewani	Dinas Pertanian	100.000.000		
	- Pengamanan ketersediaan pangan	3 Peningkatan Mutu Ternak	Terjaminnya mutu genetik sapi	Dinas Pertanian	150.000.000		
	- Peningkatan paska panen dan pengolahan hasil	4 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular	Terlindunginya ternak masyarakat dari penyakit zoonosis dan mengurangi keresahan masyarakat terhadap stamping out flu burung	Dinas Pertanian	40.000.000		

	- Peningkatan kesadaran masyarakat akan perlunya konsumsi pangan dan protein	5 Pemantapan Sistem Pengamatan dan Peramalan OPT serta Bencana Alam	Terkendalinya serangan hama dan penyakit	Dinas Pertanian	60.000.000		
	- Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan	6 Pemberdayaan Pos IPAHA (Informasi dan Pelayanan Agen Hayati)	Meningkatnya pemanfaatan agen hayati dalam pengendalian OPT Tanaman	Dinas Pertanian	40.000.000		
	- Diversifikasi pangan	7 Peningkatan Intensifikasi Pertanian (PIP) Padi Sawah	Meningkatnya IP 300 Untuk Padi Sawah	Dinas Pertanian	100.000.000		
		8 Peningkatan Mutu Intensifikasi Padi Sawah (P3)	Meningkatkan Mutu Intensifikasi Padi Sawah	Dinas Pertanian	150.000.000		
		9 Pengelolaan Lahan dan Air	Pengoptimalisasi- an Lahan	Dinas Pertanian	286.000.000		2.574.000.000
		10 Penangkaran Benih Padi Unggul	Terciptanya jenis padi unggul tipe baru yang berpotensi di daerah Kabupaten Dharmasraya	Dinas Pertanian	150.000.000		
2	Program : Pengembangan Agribisnis dan Kawasan sentraproduksi	Program : Pengembangan Agribisnis dan Kawasan sentraproduksi					
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :					

- Pengembangan kawasan penghasil dan peningkatan produksi produk segar	1	Penataan Sistem Kemitraan Usaha Pertanian	Terciptanya hubungan lembaga yang dinamis diantara sub sistem usaha peternakan dan perikanan	Dinas Pertanian	100.000.000		
- Peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui peningkatan paska panen, mutu, pengolahan hasil dan pemasaran	2	Pembangunan Pasar Ternak	Terjaminnya tempat pemasaran ternak petani	Dinas Pertanian	400.000.000		2.475.000.000
- Peningkatan mutu perbenihan/pembibitan bersertifikasi	3	Pengembangan Agribisnis Sapi Potong	Terciptanya Pengembangan usaha peternakan	Dinas Pertanian	27.500.000		247.500.000
- Pembangunan infrastruktur irigasi, jalan usaha tani, pasar produk pertanian, & telekomunikasi	4	Penumbuhan Agribisnis Pangan	Meningkatkan kualitas hasil pertanian	Dinas Pertanian	286.000.000		2.574.000.000
- Peningkatan investasi dan pengembangan industri pendukung	5	Sekolah lapangan pembangunan karet rakyat	Meningkatkan keterampilan perkebunan komoditi karet	Dinas Perkebunan	53.950.000		
- Pengembangan diversifikasi usaha tani	6	Pengembangan penanaman dan lanjutan pemeliharaan	Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produksi perkebunan	Dinas Perkebunan	1.650.000.000		
- Pengembangan lembaga keuangan dan sumber daya produktif	7	Pengembangan Tanaman Buah-buahan	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Dinas Pertanian	400.000.000		43.956.000.000

		8 Penyusunan data base komoditi perkebunan	Terlaksananya perencanaan yang efektif pada setiap tahunnya	Dinas Perkebunan	21.171.000		
		9 Pengawasan produksi, pengolahan dan pengendalian mutu hasil perkebunan	Terpenuhinya PAD	Dinas Perkebunan	18.517.000		
		10 Study banding peningkatan mutu hasil perkebunan	Terlaksananya peningkatan mutu hasil karet	Dinas Perkebunan	25.000.000		
		11 Pemeliharaan demplot kebun karet	Meningkatkan efektifitas sistem penyuluhan	Dinas Perkebunan	34.935.250		
		12 Pengawasan mutu dan sertifikasi benih perkebunan	Mengantisipasi pemakaian benih asalan komoditi perkebunan	Dinas Perkebunan		26.676.800	
		13 Pembibitan dan pemeliharaan kebun entres karet	Mengantisipasi pemakaian benih asalan komoditi perkebunan	Dinas Perkebunan	150.300.000		
		14 Pembibitan tanaman sawit	Mengantisipasi pemakaian benih asalan komoditi perkebunan	Dinas Perkebunan	85.000.000		
		15 Pembibitan tanaman kakao	Mengantisipasi pemakaian benih asalan komoditi perkebunan	Dinas Perkebunan	50.000.000		
3	Program : Revitalisasi dan kelembagaan dan sistem penyuluhan pertanian	Program : Revitalisasi dan kelembagaan dan sistem penyuluhan pertanian					
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :					

<ul style="list-style-type: none"> - Revitalisasi sistem penyuluhan - Penumbuhan dan penguatan lembaga pertanian di tingkat Nagari dan Jorong - Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pertanian 	1	Pengembangan Balai Benih Ikan	Tersedianya benih ikan yang berkualitas	Dinas Pertanian	145.000.000		4.455.000.000
	2	Pembinaan Pembenihan Ikan Rakyat	Berkembangnya usaha Pembenihan ikan rakyat	Dinas Pertanian	50.000.000		
	3	Pendamping DAK perikanan	Tersedianya dana pendamping DAK	Dinas Pertanian	450.000.000		
	4	Mimbar Sarasehan KTNA (2x Setahun)	Tercapainya visi dan misi petani serta kelompok tani	Dinas Pertanian	20.000.000		
	5	Penyusunan Data Base Pertanian, Peternakan dan Perikanan	Tersedianya data pada tingkat kelompok tani untuk keperluan penyusunan program	Dinas Pertanian	35.000.000		
	6	Pengembangan sarana penyuluhan lapangan	Terlaksananya sistem laku dengan baik sehingga informasi pada petani berjalan dengan cepat dan tepat	Dinas Perkebunan	19.000.000		
	7	Operasional penyuluh lapangan	Meningkatkan efektifitas sistem penyuluhan (8 Unit Sepeda Motor, Laptop, dan pengarah)	Dinas Perkebunan	160.000.000		

		8 Pelatihan penyuluhan tentang pengenalan dan pengamatan OPT selama 3 (tiga) hari SLUT/SLPHT	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan penyuluhan tentang pengenalan dan pengamatan OPT	Dinas Perkebunan	25.000.000		
		9 Pelatihan kelompok tani bidang manajemen usaha perkebunan rakyat	Meningkatkan efektifitas sistem penyuluhan	Dinas Perkebunan		66.470.000	
		10 Pemberantasan rabies dan eliminasi	Masih tingginya kasus gigitan anjing tersangka rabies	Dinas Pertanian	25.000.000		
		11 Pemberdayaan POSKESWAN	Pelayanan kesehatan hewan masyarakat dan antisipasi penyakit hewan menular	Dinas Pertanian	42.000.000		
		12 Pengembangan Peralatan Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan	Terwujudnya produksi ikan olahan bernilai ekonomi tinggi	Dinas Pertanian	50.000.000		
4	Program : Pengembangan Usaha Pertanian Ramah Lingkungan	Program : Pengembangan Usaha Pertanian Ramah Lingkungan					
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :					
	- Pengembangan usaha pertanian ramah lingkungan (produk pertanian bebas pestisida)	1 Pengendalian hama dan penyakit ikan	Tersedianya obat-obatan perikanan untuk penanggulangan hama dan penyakit ikan	Dinas Pertanian	10.000.000		

	Pengelolaan sumber daya lahan dan air secara terintegrasi dan berkelanjutan	2 Pengendalian OPT Perkebunan	Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pengendalian hama	Dinas Perkebunan	43.095.500		
5	Program : Pengendalian banjir dan pengamanan sungai	Program : Pengendalian banjir dan pengamanan sungai					
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :					
	- Pemeliharaan dan perbaikan alur sungai	1 Rehabilitasi Bufferzone Bendung Batang Hari	Mencegah terjadinya penurunan debit air Sungai Batang Hari	Dinas Kehutanan	50.000.000		
	- pembangunan prasarana pengendali banjir dan pengamanan sungai	2 Kecil menanam besar memanen (penanaman pohon pelindung di sekolah, kantor, sarana ibadah dan sosial)	Terciptanya lingkungan yang asri dan nyaman	Dinas Kehutanan	50.000.000		

	- Melaksanakan reboisasi sepanjang daerah aliran sungai rawan banjir	3 DAK-DR Kabupaten Dharmasraya	Merehabilitasi lahan kritis, baik yang berada dalasm kawasan maupun luar kawasan hutan	Dinas Kehutanan	275.000.000		2.475.000.000
		4 GN-RHL	Merehabilitasi lahan kritis, baik yang berada dalam kawasan maupun luar kawasan hutan	Dinas Kehutanan	330.000.000		2.970.000.000
6	Program : Pengembangan, dan pengelolaan sumber air baku	Program : Pengembangan, dan pengelolaan sumber air baku					
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :					
	- Penatagunaan sumber daya air	1 Operasi pengamanan hutan dalam rangka Pemberantasan Ilegal Logging	Penertiban ilegal logging, sawmill liar, dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar hutan	Dinas Kehutanan	80.000.000		
	- Penyelenggaraan konservasi air tanah pada wilayah kritis air	2 Croscek Peredaran dokumen SKSHH Luar Daerah	Mengantisipasi Dokumen Terbang (Dokter)	Dinas Kehutanan	25.000.000		
	- Pembangunan waduk, embung dan sarana penampung air						
	- Penyediaan, pengelolaan dan perlindungan sumber air baku						
	Jumlah				6.312.468.750	93.146.800	61.726.500.000

MATRIK MENATA KELEMBAGAAN DAN MEMBERDAYAKAN PELAKU USAHA

No	Program/Kegiatan Pokok dalam RPJM 2006-2010	Program/Kegiatan Pokok dalam RKPD 2007	Sasaran Program Tahun 2007	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp)		
					APBD II	APBD I	APBN
1	Program : Penataan sistem dan kelembagaan usaha	Program : Penataan sistem dan kelembagaan usaha					
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :					
	- Regulasi peraturan-peraturan yang menghambat perkembangan pelaku usaha	1 Diklat Pengurus dan karyawan Koperasi	Koperasi dan KUD	Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal	30.000.000		
	- Pembuatan sistem pembinaan dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati						
	- Pembinaan dan fasilitasi tumbuhnya kelompok usaha atau asosiasi						
	- Mendorong berdirinya lembaga keuangan pedesaan seperti Simpan pinjam, badan kredit pedesaan, BPR, dsb						

2	Program : Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi	Program : Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi					
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :					
	- Penyediaan kemudahan perizinan dan pembinaan	1 Pendataan ulang kelembagaan KUKM	Koperasi dan KUD	Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal	25.000.000		
	- Penyediaan skim pembiayaan alternatif						
	- Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan bimbingan teknis manajemen usaha						
	- Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung usaha serta kemitraan usaha						
	- Peningkatan administrasi dan pengawasan badan hukum						
3	Program : Peningkatan Iklim Investasi	Program : Peningkatan Iklim Investasi					
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :					

	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan peraturan daerah pendorong investasi daerah - Penyederhanaan prosedur pelayanan penanaman modal dan pemberian insentif 	<p>1 Fasilitasi dan koordinasi tim pengembangan potensi ekonomi daerah</p>	<p>Meningkatkan kualitas pengelolaan potensi ekonomi daerah melalui penataan ekonomi, peningkatan kapasitas SDM aparatur dan masyarakat serta penguatan permodalan</p>	<p>Bagian Perekonomian Setdakab</p>	<p>20.000.000</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi perencanaan investasi dengan daerah kabupaten tetangga 	<p>2 Analisis dan kajian potensi ekonomi daerah</p>	<p>Meningkatkan kualitas pengelolaan potensi ekonomi daerah melalui penataan ekonomi, peningkatan kapasitas SDM aparatur dan masyarakat serta penguatan permodalan</p>	<p>Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah</p>	<p>45.000.000</p>		

	- Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan investasi baik PMA & PMDN	3 Fasilitasi promosi dan informasi produksi daerah (pameran, buku, leaflet dan CD)	Dikenalnya produk daerah oleh masyarakat luas terutama investor	Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal	200.000.000		
	- Pemantapan kelembagaan penanaman modal dan pengembangan sistem informasi investasi						
	- Penyusunan profil investasi daerah						
4	Program : Pengelolaan dan Pengendalian Usaha Pertambangan	Program : Pengelolaan dan Pengendalian Usaha Pertambangan					
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :					

<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan regulasi, pedoman teknis, dan standar pertambangan mineral dan batu bara 	<ul style="list-style-type: none"> - Analisa dan kajian potensi pertambangan 	<p>Meningkatkan kualitas pengelolaan potensi pertambangan melalui peningkatan kualitas SDM aparatur, penertiban perizinan dan pengawasan terhadap pengusaha bidang pertambangan</p>	<p>Dinas Pertambangan dan Energi</p>	<p>75.000.000</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan pengawasan kegiatan penambangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Studi AMDAL kawasan (perindustrian, perkantoran, pemukiman, perdagangan, dll) 		<p>Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah</p>	<p>45.000.000</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan produksi, pemasaran dan pengelolaan mineral dan batu bara 						

	- Evaluasi perencanaan produksi dan pemasaran mineral dan batu bara, serta pengembangan masyarakat wilayah pertambangan						
	- Pembinaan, evaluasi, pengawasan dan penertiban pertambangan rakyat						
	- Pemulihan lingkungan pasca tambang dan penerapan kebijakan produksi dan pengelolaan pasca tambang berwawasan lingkungan						
	- Penyelidikan umum potensi pertambangan serta pemetaan geologi dan geohidrologi						
5	Program : Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif	Program : Pengembangan kewirausahaan dan					
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :					

<ul style="list-style-type: none"> - Pemasyarakatan kewirausahaan dan fasilitasi serta pemberian dukungan serta kemudahan terhadap pelaku usaha - Pelatihan, bimbingan magang, pembinaan lapangan terhadap aparatur pembina dan pelaku usaha - Pembinaan dan fasilitasi tumbuhnya kelompok usaha yang tangguh dalam kegiatan produksi 	1 Dana Pendukung (Cost Sharing) BLM PPK III	Meningkatnya partisipasi masyarakat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	800.000.000		
	2 Pembinaan dan Administrasi PPK	Terlaksananya administrasi PPK dengan baik	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	20.440.450		
	3 Pelatihan Manajemen Usaha dan Teknis Administrasi UEM-SP	Meningkatnya kemampuan manajemen UEM-SP	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	25.000.000		
	4 Pelatihan Teknologi Tepat Guna	Meningkatnya partisipasi masyarakat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	60.000.000		
	5 Koordinasi, Pembinaan dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya program penanggulangan kemiskinan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	75.500.000		
Jumlah				1.420.940.450	0	0

MATRIK PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PENINGKATAN JARINGAN INFORMASI DAN PROMOSI

No	Program/Kegiatan Pokok dalam RPJM 2006-2010	Program/Kegiatan Pokok dalam RKPD 2007	Sasaran Program Tahun 2007	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (R)	
					APBD II	APBD I
1	Program : Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi	Program : Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi				
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :				
	- Penyediaan kemudahan perizinan dan pembinaan	1 Penumbuhan Usaha kondusif dan penyediaan fasilitas penguatan modal koperasi dan UKM	Meningkatnya usaha perekonomian rakyat	Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal	1.500.000.000	
	- Penyediaan skim pembiayaan alternatif	2 Penyuluhan terhadap pelaku ekonomi rakyat yang tergabung dalam koperasi	Meningkatnya kesadaran masyarakat berkoperasi	Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal	50.000.000	
	- Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan bimbingan teknis manajemen usaha					

	- Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung usaha serta kemitraan usaha					
	- Peningkatan administrasi dan pengawasan badan hukum					
2	Program : Peningkatan Iklim Investasi	Program : Peningkatan Iklim Investasi				
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :				
	- Penyederhanaan prosedur pelayanan penanaman modal dan pemberian insentif	1 Fasilitasi penanaman modal	Terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif	Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal	35.000.000	
	- Pembuatan peraturan daerah pendorong investasi daerah					
	- Koordinasi perencanaan investasi dengan daerah kabupaten tetangga					
	- Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan investasi baik PMA & PMDN					

	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantapan kelembagaan penanaman modal dan pengembangan sistem informasi investasi 					
	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan profil investasi daerah 					
	Jumlah				1.585.000.000	0

I

p)
APBN

0

MATRIK PENGEMBANGAN INDUSTRI KERAJINAN DAN INDUSTRI PENGOLAHAN BERBASIS PER

No	Program/Kegiatan Pokok dalam RPJM 2006-2010	Program/Kegiatan Pokok dalam RKPD 2007	Sasaran Program Tahun 2007	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (F	
					APBD II	APBD I
1	Program : Pengembangan Agribisnis dan Kawasan sentraproduksi	Program : Pengembangan Agribisnis dan Kawasan sentraproduksi				
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :				
	- Pengembangan kawasan penghasil dan peningkatan produksi produk segar	1 Pengadaan alat pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan	Pengadaan mesin pengolah biji kakao dan rumah pengolahan hasil	Dinas Perkebunan	660.000.000	
	- Peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui peningkatan paska panen, mutu, pengolahan hasil dan pemasaran					
	- Peningkatan mutu perbenihan/pembibitan bersertifikasi					
	- Pembangunan infrastruktur irigasi, jalan usaha tani, pasar produk pertanian, dan telekomunikasi					
	- Peningkatan investasi dan pengembangan industri pendukung					
	- Pengembangan diversifikasi usaha tani					

	- Pengembangan lembaga keuangan dan sumber daya produktif					
2	Program : Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah	Program : Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah				
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :				
	- Penyediaan kemudahan perizinan dan pembinaan	- Uji petik retribusi pasar	Pasar se Kabupaten	Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal	15.000.000	
	- Penyediaan skim pembiayaan alternatif	- Penertiban perizinan	Kabupaten Dharmasraya	Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal	21.000.000	
	- Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan bimbingan teknis manajemen usaha	- Pembinaan Usaha Industri Kecil dan Menengah	Batik dan Genteng	Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal	70.000.000	

	- Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung usaha serta kemitraan usaha					
	- Peningkatan administrasi dan pengawasan badan hukum					
3	Program : Peningkatan Iklim Investasi	Program : Peningkatan Iklim Investasi				
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :				
	- Pembuatan peraturan daerah pendorong investasi daerah	- Penyusunan perda penanaman modal	tersedianya perangkat hukum dalam peningkatan investasi daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	100.000.000	
	- Penyederhanaan prosedur pelayanan penanaman modal dan pemberian insentif					
	- Koordinasi perencanaan investasi dengan daerah kabupaten tetangga					
	- Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan investasi baik PMA & PMDN					
	- Pemantapan kelembagaan penanaman modal dan pengembangan sistem informasi investasi					

	- Penyusunan profil investasi daerah					
	Jumlah				866.000.000	0

0

Matrik Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar

No	Program/Kegiatan Pokok dalam RPJM 2006-2010	Program/Kegiatan Pokok dalam RKPD 2007	Sasaran Program Tahun 2007	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp)		
					APBD II	APBD I	APBN
1	Program : Peningkatan /Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program : Peningkatan /Pembangunan Jalan dan Jembatan					
	Indikasi Kegiatan	Kegiatan :					
	- Peningkatan dan pembangunan ruas jalan dan jembatan	Peningkatan jalan dan jembatan		Dinas pekerjaan Umum	10.000.000.000		40.000.000.000
	- Pembangunan dan peningkatan ruas jalan ke daerah terpencil	Pembangunan Jembatan		Dinas pekerjaan Umum	2.000.000.000		2.000.000.000
	- Peningkatan peran swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi	Peningkatan Jalan Pedesaan		Dinas pekerjaan Umum	3.980.000.000		

2	Program : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Program : Pemeliharaan jalan dan jembatan					
	Indikasi Kegiatan	Kegiatan :					
	- Rehabilitasi dan pemeliharaan rutin jalan kabupaten	Pemeliharaan Periodik Jalan		Dinas pekerjaan Umum	7.000.000.000		20.000.000.000
	- Rehabilitasi dan pemeliharaan periodik jalan kabupaten	Pemeliharaan Rutin Jalan dan jembatan		Dinas pekerjaan Umum	1.500.000.000		
	- Pengadaan alat-alat berat pemeliharaan jalan						
3	Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi					
	Indikasi Kegiatan	Kegiatan :					
	- Pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Embung	Terpeliharanya Jaringan Irigasi Semi Teknis	Dinas pekerjaan Umum	500.000.000	300.000.000	1.000.000.000

- Pembangunan irigasi baru	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Embung	Tertanggulangnya kerusakan sedang/berat Jaringan Irigasi Semi Teknis	Dinas pekerjaan Umum	500.000.000	300.000.000	1.000.000.000
- Optimalisasi pemanfaatan lahan irigasi yang telah dikembangkan	- Pembentukan/Pembinaan Organisasi P3A dan Team Pembina	Terciptanya Peningkatan Ilmu Pengetahuan Masyarakat Tani Melalui Wadah P3A/Wadah Pembina Kab. & Kec.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	150.000.000		
- Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A)	Penyediaan Lahan Berpengairan (PLB)/ Cetak Sawah Baru	Tersedianya Areal Sawah Berproduksi	Dinas Pekerjaan Umum	2.800.000.000		
	Operasional dan Fasilitasi Koordinasi Tim DCC (District Committee Centre)		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	120.000.000		

		Peningkatan Jaringan Irigasi		Dinas Pekerjaan Umum	1.000.000.000		2.000.000.000
4	Program : Pengembangan, dan pengelolaan sumber air baku	Program : Pengembangan, dan pengelolaan sumber air baku					
	Indikasi Kegiatan	Kegiatan :					
	- Penatagunaan sumber daya air	Survey Investigasi dan Design (SID) Jaringan Irigasi	Didapatinya Data-data Lapangan yang konkrit	Dinas Pekerjaan Umum	112.500.000		
	- Pembangunan waduk, embung dan sarana penampung air	Normalisasi dan Penanggulangan Kerusakan Alur Sungai	Terciptanya Kenyamanan Masyarakat pada Lingkungan yang bersangkutan	Dinas Pekerjaan Umum	1.000.000.000	3.130.000.000	5.000.000.000
	- Penyediaan, pengelolaan dan perlindungan sumber air baku	- Batang Siat (Jr. Ranah Baru/Nag. Koto Besar)		Dinas PU & Perhubungan		3.368.000.000	
		- Batang Mimpi (Jr. Sikabau/Nag. Tebing Tinggi)		Dinas PU & Perhubungan	300.000.000		
		- Batang Piruko (Jr. Bukit Mindawa/Nag. Tebing Tinggi)		Dinas PU & Perhubungan	600.000.000		

		- Batang Momong (Jr. Durian Simpai/Nag. Silago)		Dinas PU & Perhubungan	500.000.000		
		- Batang Timpeh (Jr.Mrg Makmur, Jr.Timpeh, Jr.Pinang Makmur, Jr. Tbk.Penyeb. /Nag. Timpeh)		Dinas PU & Perhubungan		3.750.000.000	
		- Sei. Limau (Nag.Sei.Limau)		Dinas PU & Perhubungan	300.000.000		
		- Batang Sinamar/Bt. Asam (Nag. Sei. Limau)		Dinas PU & Perhubungan		1.000.000.000	
		Normalisasi Sungai					
		- Batang Lago		Dinas PU & Perhubungan	440.000.000		
		- Batang Momong		Dinas PU & Perhubungan	660.000.000		
		- Batang Mimpi		Dinas PU & Perhubungan	330.000.000		
		- Batang Siat		Dinas PU & Perhubungan		3.300.000.000	
	- Penyelenggara - an konservasi air tanah pada wilayah kritis air	- Batang Timpeh		Dinas PU & Perhubungan		1.100.000.000	

	- Pembangunan waduk, embung dan sarana penampung air						
5	Program : Pembangunan Persampahan dan Drainase	Program : Pembangunan Persampahan dan Drainase					
	Indikasi Kegiatan	Kegiatan :					
	- Pengembangan master plan sistem drainase dan persampahan kabupaten	Pengembangan Sistem Drainase dan Pembangunan Sarana Persampahan					
	- Peningkatan kesadaran masyarakat dan stakeholders terhadap pentingnya pelayanan persampahan dan drainase	- Pembangunan jaringan Drainase		Dinas Pekerjaan Umum	1.000.000.000	1.000.000.000	

<ul style="list-style-type: none"> - pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan 		<p style="text-align: center;">Dinas Pekerjaan Umum</p>	<p style="text-align: center;">1.000.000.000</p>		<p style="text-align: center;">2.000.000.000</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan jaringan drainase primer dan sekunder, peningkatan dan normalisasi saluran drainase 						
<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan teknologi tepat guna bidang persampahan dan drainase 						
<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan dan pengembangan sistem dan kelembagaan pengelolaan persampahan dan drainase 						
<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan SDM pengelola persampahan dan drainase 						

6	Program : Pembangunan Air Minum dan Pengelolaan Limbah	Program : Pembangunan Air Minum dan Pengelolaan Limbah					
	Indikasi Kegiatan	Kegiatan :					
	- Penyiapan dan pengembangan sistem kelembagaan pengelolaan air minum dan pengelolaan limbah	- Pembangunan Instalasi Air Minum dan Pembuangan Air Limbah		Dinas Pekerjaan Umum	4.530.000.000		
	- Pengembangan sistem pelayanan air minum dan air limbah	- Pembangunan Instalasi Jaringan Air Bersih		Dinas Pekerjaan Umum	3.300.000.000		
	- Penyediaan fasilitas dan jaringan air bersih yang mamadai						

	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah rumah tangga - Peningkatan kampanye publik, mediasi dan fasilitasi kepada masyarakat - Peningkatan peran sekolah dalam perilaku hidup bersih dan sehat - Pengembangan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber air baku 							
7	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor						
	Indikasi Kegiatan	Kegiatan :						

	- Peningkatan dan rehabilitasi prasarana kantor dan rumah dinas	- Pembangunan Kantor SKPD		Dinas Pekerjaan Umum	3.660.000.000		5.000.000.000
	- Peningkatan mobiler kantor dan rumah dinas	- Pengembangan Locational Area Network (LAN)		Bagian Umum Setda Kab	220.000.000		1.980.000.000
	- Peningkatan sarana komunikasi dan sarana kerja kantor	- Pengadaan Mobiler Kantor SKPD		Bagian Umum Setdakab	1.000.000.000		
	- Peningkatan sarana dan prasarana protokoler Pemda	- Pembangunan Kantor Camat (Pemekaran)		Dinas Pekerjaan Umum	1.660.000.000		5.940.000.000
		- Pengembangan Kantor Camat		Dinas Pekerjaan Umum	550.000.000		
		- Rehabilitasi gedung kantor SKPD		Dinas Pekerjaan Umum	1.000.000.000		

8	Program : Peningkatan penunjang operasional aparatur	Program : Peningkatan penunjang operasional aparatur					
	Indikasi Kegiatan	Kegiatan :					
	- Pengadaan mobilitas Pemda	- Pengadaan Kendaraan Dinas		Bagian Umum Setdakab	10.000.000.000		
9	Program : Pengembangan Agribisnis dan Kawasan sentraproduksi	Program : Pengembangan Agribisnis dan Kawasan sentraproduksi					
	Indikasi Kegiatan	Kegiatan :					
	- Pengembangan kawasan penghasil dan peningkatan produksi produk segar	Pembangunan Pasar Nagari		Dinas Pekerjaan Umum	1.650.000.000		
	- Peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui peningkatan paska panen, mutu, pengolahan hasil dan pemasaran	- Pengadaan Sarana Olah Raga dan Kepemudaan		Dinas Perhubungan dan Pariwisata	440.000.000		1.760.000.000

	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan mutu perbenihan/pembibitan bersertifikasi - Pembangunan infrastruktur irigasi, jalan usaha tani, pasar produk pertanian, & telekomunikasi - Peningkatan investasi dan pengembangan industri pendukung - Pengembangan diversifikasi usaha tani - Pengembangan lembaga keuangan dan sumber daya produktif 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Gedung Olah Raga 		Dinas Pekerjaan Umum	220.000.000		4.180.000.000
10	Program : Pembangunan dan Peningkatan prasarana lalu lintas jalan raya	Program : Pembangunan dan Peningkatan prasarana lalu lintas jalan raya					

Indikasi Kegiatan	Kegiatan :					
- Peningkatan sarana dan prasaran penunjang pengamanan lalu lintas	- Pemasangan rambu-rambu di jalan Propinsi dan Kabupaten	mengurangi angka kecelakaan	Dinas Perhubungan dan Pariwisata	75.000.000	100.000.000	
- Pembangunan terminal	- Pemasangan Traffic Light Simp. Sikabau		Dinas Perhubungan dan Pariwisata		150.000.000	
- Peningkatan profesionalisme petugas pengatur lalu lintas	- Pemasangan Traffic Light Simp. 3 S. Rumbai		Dinas Perhubungan dan Pariwisata	150.000.000		
- Pengembangan master plan sistem dan jaringan transportasi	- Renovasi terminal pembantu (<i>Pembangunan Terminal Angdes, Truk, AKDP/AKAP</i>)	meningkatkan pelayanan transportasi kepada masyarakat	Dinas Perhubungan dan Pariwisata	3.000.000.000		
	- Pembuatan Halte	meningkatkan pelayanan transportasi kepada masyarakat	Dinas Perhubungan dan Pariwisata	300.000.000		

		- Pembangunan pos lalin Angk. Sungai	Tertib angkutan sungai	Dinas Perhubungan dan Pariwisata	15.000.000		
		- Pengadaan Speed boad	Tertib angkutan sungai	Dinas Perhubungan dan Pariwisata	50.000.000		
11	Program : Pembangunan dan Peningkatan prasarana lalu lintas jalan raya	Program : Pembangunan dan Peningkatan prasarana lalu lintas jalan raya					
	Indikasi Kegiatan	Kegiatan :					
	- Peningkatan sarana dan prasaran penunjang pengamanan lalu lintas	- Pembangunan tower telekomunikasi/frek wensi radio	Meningkatkan pelayanan komunikasi terhadap masyarakat	Dinas Perhubungan dan Pariwisata	90.000.000		
	- Peningkatan profesionalisme petugas pengatur lalu lintas						
	- Pembangunan terminal						

- Pengembangan master plan sistem dan jaringan transportasi							
Jumlah					67.913.500.000	17.938.000.000	85.524.000.000

MATRIK PENINGKATAN KEMAMPUAN KELEMBAGAAN BIROKRASI DAN ADMINISTRASI PUBLIK

No	Program/Kegiatan Pokok dalam RPJM 2006	Program/Kegiatan Pokok dalam RKPD	Sasaran Program Tahun	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp)		
					APBD II	APBD I	APBN
1	Program : Peningkatan	Program :					
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :					
	- Pengembangan tenaga aparatur pemeriksa yang profesional	- Pemeriksaan Rutin	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan sinergi instansi pemerintah	Inspektorat Daerah	356.160.000		
	- Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan, audit internal, eksternal dan kontrol publik	- Pemeriksaan Khusus/Kasus		Inspektorat Daerah	88.800.000		
	- Peningkatan tindak lanjut temuan pengawasan dan penerapan reward dan punishment	- Rakor Pengawasan dan Gelar Pengawasan		Inspektorat Daerah	75.000.000		
	- Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja dan meningkatkan implementasinya	- Pelatihan Kantor Sendiri		Inspektorat Daerah	18.276.000		

<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan transparansi kualitas informal hasil pengawasan, tindak lanjutnya serta dokumentasi track record aparatur yang akurat - Melakukan peningkatan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan 	- Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan		Inspektorat Daerah	45.000.000		
	- Pemutahiran Data		Inspektorat Daerah	20.000.000		
	- Evaluasi Hasil Pemeriksaan		Inspektorat Daerah	24.268.000		
	- Monitoring SPJ		Inspektorat Daerah	12.000.000		
	- Sosialisasi Pengawasan seluruh SKPD		Inspektorat Daerah	30.000.000		
	- Penyusunan LPPD Tahun 2006	Tertibnya penyelenggaraan pemerintahan	Bag. Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	15.000.000		
	- Penyusunan LKPJ Tahun 2007	Tertibnya penyelenggaraan pemerintahan	Bag. Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	100.000.000		

3	Program : Peningkatan Penunjang Operasional Kegiatan Kantor	Program : Peningkatan Penunjang Operasional Kegiatan					
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :					
	- Pengadaan mobilitas pemda	- Pengadaan Pakaian Dinas	Adanya keseragaman pakaian dinas di kalangan pegawai	Badan Kapagawaian Daerah	828.613.750		
	- Pengadaan pakaian dinas dan atribut pemda						
4	Program : Pengembangan sistem informasi dan komunikasi	Program : Pengembangan sistem informasi dan komunikasi					
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :					
	- Peningkatan pemerataan informasi pembangunan melalui media cetak dan elektronik	- Belanja Modal Elektronik dan Mobiler (kantor Baru)	Terpenuhinya sarana elektronik dan mobiler pada kantor Sekretariat Daerah yang baru	Bagian Umum Setda Kab	500.000.000		
	- Pembinaan dan fasilitasi media massa dalam kontrol sosial dan pengawasan publik	- Pembuatan Santel Kabupaten Dharmasraya	Adanya pusat data dan dokumentasi serta pelayanan telekomunikasi Kabupaten Dharmasraya	Bagian Humas dan Protokol Setda Kab	100.000.000		

	- Pengembangan situs dan web site daerah	- Pengadaan Sarana Perlengkapan Upacara	Meningkatnya mutu pelayanan dan tertib acara kegiatan upacara	Bagian Humas dan Protokol Setda Kab	500.000.000		
	- Peningkatan kinerja kehumasan daerah	- Peningkatan Sarana Informasi (Koran, Majalah, dll)	Adanya sarana informasi perangkat daerah	Bagian Humas dan Protokol Setda Kab	500.000.000		
	- Penerapan pola tata kehumasan daerah	- Inventarisasi arsip-arsip penting daerah	Terinventarisasinya arsip-arsip penting daerah	Kantor Arsip dan perpustakaan	22.000.000		
	- Pembangunan perpustakaan daerah	- Pengadaan sarana dan prasarana penunjang arsip daerah	Tersedianya sarana kearsipan dan perpustakaan daerah	Kantor Arsip dan perpustakaan	120.500.000		
		- Pelatihan tenaga kearsipan dan perpustakaan	Terlatihnya tenaga kearsipan dan perpustakaan daerah	Kantor Arsip dan perpustakaan	7.500.000		
		- Peningkatan Perpustakaan Masyarakat	Meningkatnya minat baca masyarakat	Kantor Arsip dan perpustakaan	20.000.000		
5	Program : Penataan Ruang	Program : Penataan Ruang					
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :					

<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan rencana tata ruang 	<ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi Data Spatial Pembangunan dan Operasional BKPRD 	<ul style="list-style-type: none"> Terkoordinasinya dan terkendalinya penataan ruang daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda 	<ul style="list-style-type: none"> 161.222.250 		
<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin kesesuaian rencana dengan pelaksanaan, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan keseimbangan pembangunan antar fungsi melalui peningkatan fungsi koordinasi BKPRD di Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> - Operasional BKP4D 	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya koordinasi antar pelaku tingkat daerah dalam rangka penyiapan, penerapan dan pengambilan kebijakan daerah tentang perumahan dan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda 	<ul style="list-style-type: none"> 58.772.700 		
<ul style="list-style-type: none"> - penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang memperjelas status peruntukkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan RTRK 2 Kawasan Pusat Pertumbuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Terkendalinya pemanfaatan ruang pada kawasan-kawasan berpotensi tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda 	<ul style="list-style-type: none"> 550.000.000 		
<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan rencana tata ruang yang lebih terinci pada kawasan fungsional 						

	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan penyuluhan dan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat - Pelaksanaan sosialisasi rencana tata ruang secara komprehensif 						
6	Program : Pengelolaan Pertanahan	Program : Pengelolaan					
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :					
	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan sistem pendaftaran tanah yang efisien dan transparan - Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan, berkelanjutan dan menjunjung supremasi hukum - Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan SDM - Penegakan hukum pertanahan yang adil dan transparan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendataan Tanah R 	Masyarakat	Bag. Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	40.000.000		

	- Pengembangan sistem informasi pertanahan yang handal dalam rangka peningkatan koordinasi, pelayanan dan pengelolaan pertanahan						
7	Program : Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Pembangunan	Program : Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama					
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :					
	- Peningkatan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan	- Pengendalian pelaksanaan kegiatan unit kerja	Meningkatkan Kualitas pelayanan administrasi pemerintahan melalui penataan kelembagaan manajemen publik dan peningkatan kapasitas SDM aparatur daerah	Bagian Pembangunan Setda Kab	15.000.000		
	- Pengembangan kerjasama antar daerah di dalam kabupaten dan dengan kabupaten tetangga	- Penataan Administrasi dan penyusunan pedoman umum unit kerja		Bagian Pembangunan Setda Kab	15.000.000		
	- Pengembangan kerjasama daerah dengan perguruan tinggi dan NGO	- Penyusunan standar harga barang pemerintah kebutuhan pemerintah		Bagian Ekonomi Setda Kab	15.000.000		

	- Pengembangan kerjasama wilayah perbatasan	- Fasilitasi dan koordinasi tim pengembangan potensi ekonomi daerah	Meningkatkan kualitas pengelolaan potensi ekonomi daerah melalui penataan ekonomi, peningkatan kapasitas SDM aparatur dan masyarakat serta penguatan permodalan	Bagian Ekonomi Setda Kab	20.000.000		
		- Penegasan Batas Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten Sawahlunto/Siiuniung	Jelasnya batas Kabupaten Dharmasraya	Bag. Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	90.000.000		
		- Penegasan Batas Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten Solok Selatan	Jelasnya batas Kabupaten Dharmasraya	Bag. Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	140.000.000		
8	Program : Peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah	Program : Peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah					
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :					

<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Penyusunan RASK Tahun 2008 	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya perencanaan APBD yang efektif dan efisien 	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda 	<ul style="list-style-type: none"> 196.289.100 		
<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Survey Kelayakan Kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> Terencananya kegiatan sesuai kebutuhan di lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda 	<ul style="list-style-type: none"> 43.537.900 		
<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kebijakan perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Musrenbang 2007 dan Penyusunan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 	<ul style="list-style-type: none"> Terarahnya pelaksanaan pembangunan daerah untuk jangka pendek (tahunan) 	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda 	<ul style="list-style-type: none"> 68.879.350 		
<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Survey dan Penelitian Pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya kajian potensi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda 	<ul style="list-style-type: none"> 1.000.000.000 		
<ul style="list-style-type: none"> - Pemantapan proses perencanaan pembangunan dari bawah 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan P3A 	<ul style="list-style-type: none"> Terciptanya P3A mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda 	<ul style="list-style-type: none"> 52.101.750 		

- Fasilitas Tim Koordinasi Pengelola PKPS-BBM	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengelolaan PKPS-BBM	Bappeda	52.354.500		
- Fasilitas dan Operasional Tim DCC Pembangunan Irigasi Batang Hari dan Pengelolaan DAS Batang Hari	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan DAS Batang Hari	Bappeda	131.188.750		
- Fasilitas Pembangunan Daerah Tertinggal	Percepatan pembangunan untuk daerah tertinggal	Bappeda	60.761.850		
- Asistensi penyusunan dokumen kegiatan unit kerja	Meningkatkan Kualitas pelayanan administrasi pemerintahan melalui penataan kelembagaan manajemen publik dan peningkatan kapasitas SDM aparatur daerah	Bagian Pembangunan Setda Kab	10.000.000		

	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung operasional Kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan Kecamatan (termasuk Kecamatan pemekaran)	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya	400.000.000		
	- Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan	Terarahnya pelaksanaan pembangunan daerah	Bappeda	75.000.000		
	- Penyusunan Buku Kabupaten dan Nagari dalam Angka serta PDRB Tahun 2006	Tersedianya data dan informasi untuk perencanaan	Bappeda	155.561.700		
	- Inventarisasi dan pembuatan data dan peta pokok Kabupaten Dharmasraya	Tersedianya data dan informasi untuk perencanaan	Bappeda	200.000.000		

9	Program : Peningkatan Manajemen Pengelolaan PAD dan Penerimaan lainnya	Program : Peningkatan Manajemen Pengelolaan PAD dan Penerimaan lainnya					
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :					
	- Penyusunan potensi dan rencana tindak peningkatan penerimaan PAD	- Pendataan Potensi Sumber-Sumber Penerimaan	Terealisasinya potensi pajak retribusi daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	185.000.000		
	- Penyusunan dan evaluasi perda pajak dan retribusi daerah	- Sosialisasi Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain	Meningkatnya kesadaran wajib pajak dan retribusi	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	45.000.000		

<ul style="list-style-type: none"> - Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD - Pengembangan lembaga penerimaan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah - Optimalisasi penerimaan daerah dari pemerintah atasan 	- Penetapan dan Penagihan Tunggakan Pajak dan Retribusi	Terlaksananya kondisi dengan pengelola pajak	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	32.000.000		
	- Evaluasi dan Koordinasi Peningkatan PAD	Terlaksananya evaluasi penerimaan pajak dan retribusi	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	125.000.000		
	- Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	Meningkatnya efektivitas penerimaan PBB	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	949.758.100		
	- Uji Petik Pos Pengelolaan Retribusi	Tersedianya data penerimaan	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	46.500.000		
	- Pelatihan Pengelola PBB	Tersedianya SDM Pengelola PBB	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	44.000.000		

		- Pembuatan Leaflet Pajak, Retribusi dan Pendapatan lainnya	Meningkatnya kesadaran wajib pajak dan retribusi	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	30.000.000		
		- Pemutakhiran Data Objek Pajak	Terdatanya seluruh objek pajak yang wajib pajak	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	50.000.000		
10	Program : Penataan Manajemen Sumber Daya Aparatur	Program : Penataan Manajemen Sumber Daya Aparatur					
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :					
	- Penataan dan pembinaan sumber daya aparatur sesuai kewenangan dan beban kerja, kompetensi dan perbaikan distribusi	- Penyusunan SIMPEG/SIMKRI	Memudahkan pencarian data pegawai yang diperlukan	BKD	50.000.000		
	- Peningkatan disiplin aparatur	- Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Disiplin (SIDAK)	Terdapatnya pegawai yang disiplin dan menghargai tugasnya	BKD	8.648.750		

- Menyempurnakan dan menciptakan mekanisme, standar rekrutmen aparatur, standarisasi jabatan, promosi dan mutasi yang objektif dan profesional
- Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

- Pelayanan SK Kenaikan Pangkat Pengabdian, SK Pensiun, Karpeg, Karis, Karsu dan Penerbitan Kartu Taspen	Terciptanya pelayanan prima dalam urusan kepegawaian	BKD	60.546.500		
- Operasional MPP	Terdapatnya pegawai yang disiplin dan menghargai tugasnya	BKD	8.497.500		
- Orientasi dan Pembekalan CPNSD	Meningkatnya kualitas SDM pegawai	BKD	76.557.250		
- pelantikan dan Sumpah Janji PNS	Memperlancar kinerja pegawai	BKD	7.695.000		
- Penyusunan Formasi tahun 2008	Tersusunnya formasi pegawai baru yang dibutuhkan tahun 2008	BKD	41.658.000		
- Pelaksanaan Rekrutmen CPNSD 2007	Memperlancar kinerja pegawai	BKD	139.342.500		

- Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS	Terciptanya pelayanan prima dalam urusan kepegawaian	BKD	155.882.050		
- Pelaksanaan Diklat Pembekalan Tenaga Strategis Honor Daerah	Meningkatnya kualitas SDM pegawai	BKD	60.041.000		341.189.750
- Pelaksanaan Diklat PIM IV	Meningkatnya kualitas SDM pegawai	BKD	209.365.000		
- Pelaksanaan Diklat Pemegang Kas	Meningkatnya kualitas SDM pegawai	BKD	131.824.750		
- Peningkatan pendidikan guru SD	Meningkatnya kualitas SDM pegawai khususnya guru SD yang berkompetensi	BKD	894.000.000		
- Penyusunan Juklak dan Kewenangan Camat	Tersusunnya juklak dan kewenangan camat	BKD	20.000.000		

<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan fasilitas kebutuhan kerja pimpinan 	<p>Terselenggaranya tugas dan fungsi manajemen dalam melaksanakan tugas pemerintahan</p>	<p>Seluruh SKPD, Bupati dan Wakil Bupati, DPRD</p>	<p>180.743.171.433</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kantor seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan, belanja modal dan belanja lainnya 	<p>Terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam melaksanakan penyelenggaraan tugas pemerintahan</p>	<p>Sekretariat Daerah</p>			
<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi rencana dan program kerja kantor, badan, dan dinas 		<p>Sekretariat DPRD</p>			
<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan sistem prosedur dan standarisasi administrasi pendukung pelayanan 		<p>BPKD</p>			

- Meningkatkan fungsi manajemen yang efisien dan efektif

BAPPEDA

BKD

BAPPEDALDA

Inspektorat Daerah

Kantor Pol PP

Dinas Pertanian

Dinas Kehutanan

Dinas Perkebunan

Dinas Kesehatan

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Perhubungan dan Pariwisata

Dinas Pendidikan

Dinas Sosial,
Pemberdaya -
an Masyarakat
dan KB

Kantor
Kesatuan
Bangsa dan
Politik

Dinas
Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi dan
Penanaman
Modal

Dinas
Pertambangan
dan Energi

Kantor
Kependuduk -
an dan Catatan
Sipil

Bupati dan
Wakil Bupati

Kec. P.

Punjung

Kec. Sitiung

Kec. Koto Baru

				Kec. S. Rumbai RSUD Kantor Arsip dan Perpustakaan Kantor Transmigrasi dan Tenaga Kerja			
11	Program : Penataan Manajemen Aset Daerah	Program : Penataan Manajemen Aset Daerah					
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :					
	- Pelaksanaan inventarisasi aset daerah	- Pensektifikatan Tanah Pemda	Terkelolanya aset daerah dengan baik	Bag. Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	50.000.000		
	- Peningkatan pengelolaan aset daerah						
	Jumlah				190.204.275.433	0	341.189.750

MATRIK PENINGKATAN KEMAMPUAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN NAGARI

No	Program/Kegiatan Pokok dalam RPJM 2006-2010	Program/Kegiatan Pokok dalam RKPD 2007	Sasaran Program Tahun 2007	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp)	
					APBD II	APBD I
1	Program : Penataan Kewenangan Pemerintahan Nagari	Program : Penataan Kewenangan Pemerintahan Nagari				
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :				
	- Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan nagari	- Verifikasi APB-Nagari Tahun Anggaran 2007	DAUN tepat sasaran	Bagian Pemerintahan Nagari Setda Kab	30.000.000	
	- Pembinaan dan penataan produk hukum di tingkat nagari	- Pembentukan Buku Pedoman DAUN Tahun 2007	Terbentuknya buku pedoman DAUN	Bagian Pemerintahan Nagari Setda Kab	20.000.000	
	- Peningkatan kualitas perencanaan anggaran nagari	- Penyusunan Pedoman Teknis Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Nagari	Tertibnya batas Nagari	Bagian Pemerintahan Nagari Setda Kab	15.000.000	

		- Penyusunan Sistem dan Prosedur Penguatan Kapasitas Pemerintahan Nagari didukung Manajemen Informasi Daerah	Tersedianya sistem informasi yang dibutuhkan masyarakat dengan cepat dan tepat	Bagian Pemerintahan Nagari Setda Kab	20.000.000	
		- Asuransi Aparatur Nagari	Terselenggaranya jaminan hidup bagi aparatur Nagari	Bagian Pemerintahan Nagari Setda Kab		50.000.000
2	Program : Peningkatan kualitas perangkat nagari	Program : Peningkatan kualitas perangkat nagari				
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :				
	- Pembinaan dan pemberdayaan perangkat nagari	- Monitoring DAUN dan Pembinaan Administrasi	DAUN tepat sasaran	Bagian Pemerintahan Nagari Setda Kab	30.000.000	
	- Peningkatan kualitas perangkat nagari	- Rapat Teknis Penguatan Pemerintahan Nagari	Terselenggaranya pemerintahan nagari dengan baik	Bagian Pemerintahan Nagari Setda Kab	20.000.000	
	- Peningkatan kesejahteraan perangkat nagari	- Pelatihan Tenaga Linmas Nagari	Meningkatnya aktifitas Masyarakat	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	5.000.000	

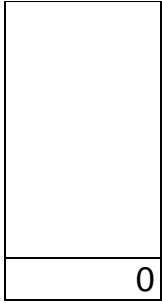
3	Program : Penataan Kelembagaan Nagari	Program : Penataan Kelembagaan Nagari				
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :				
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan kelembagaan nagari - Pengembangan administrasi dan ketatalaksanaan nagari - Peningkatan sarana dan parasarana pemerintahan nagari 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan LPPKN - Pelatihan Aparatur Nagari - Pelatihan Manajemen Kepemudaan Nagari - Pelatihan Pengurus LPM - Pelatihan Fasilitator Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pola Partisipatif Nagari 	<ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya LPPKN Meningkatnya pengetahuan aparatur Nagari Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Tertatanya pembangunan nagari yang efisien 	<ul style="list-style-type: none"> Bagian Pemerintahan Nagari Setda Kab Bagian Pemerintahan Nagari Setda Kab Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 	<ul style="list-style-type: none"> 30.000.000 25.000.000 35.000.000 20.000.000 40.000.000 	

		- Pengadaan Sarana dan Prasarana nagari Baru Hasil Pemekaran	Tersedianya sarana dan parasarana Nagari guna mempercepat pelayanan yang memadai	Bagian Pemerintahan Nagari Setda Kab	150.000.000	
4	Program : Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Program : Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat				
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :				
	- Pengembangan pola partisipatif pembangunan nagari	- Pembinaan dan Administrasi PPK	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	124.404.500	
	- Pemberdayaan lembaga-lembaga sosial di nagari	- Integrasi Pembangunan Masyarakat di Nagari Prioritas	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Bagian Pemerintahan Nagari Setda Kab	33.605.600	
	- Pemberdayaan lembaga-lembaga ekonomi di nagari	- Permbinaan Nagari Berprestasi (Lomba Nagari)	Meningkatnya aktifitas Masyarakat	Bagian Pemerintahan Nagari Setda Kab	63.157.600	
	- Pelaksanaan lomba-lomba di tingkat nagari					

	- Mendorong peran serta masyarakat perantau dalam berbagai aktivitas pembangunan di nagari					
	Jumlah				661.167.700	50.000.000

)

APBN



MATRIK PENINGKATAN DEMOKRATISASI PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

No	Program/Kegiatan Pokok dalam RPJM 2006-2010	Program/Kegiatan Pokok dalam RKPD 2007	Sasaran Program Tahun 2007	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp)		
					APBD II	APBD I	APBN
1	Program : Penataan	Program : Penataan					
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :					
	- Perumusan kelembagaan pemerintah daerah yang efisien, efektif, profesional, akuntabel dan adaptif serta perumusan tupoksi	- Fasilitasi pelaksanaan rapat-rapat DPRD	Terlaksananya kelancaran pembahasan Ranperda dan pembahasan persetujuan DPRD yang diajukan eksekutif tepat waktu	Sekretariat Dewan	244.800.000		
	- Perumusan jabatan fungsional	- Pengadaan penelitian terhadap Kebijakan dan pelaksanaan pembangunan		Sekretariat Dewan	75.000.000		
	- Perumusan ketatalaksanaan pemerintah daerah						
	- Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja						
	- Pengembangan budaya kerja aparatur						

	- Pengembangan administrasi dan kearsipan yang efektif dan efisien						
2	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor					
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :					
	- Peningkatan dan rehabilitasi prasarana kantor dan rumah dinas	- Pemberian Informasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Pelaksanaan Kegiatan DPRD	Tersedianya media informasi perkantoran Kabupaten Dharmasraya dan buku-buku perpustakaan	Sekretariat Dewan	65.000.000		
	- Pembinaan dan fasilitasi media massa	- Inventarisasi Buku-buku Perundang-undangan					
	- Pengembangan situs dan web site daerah						
	- Pengadaan sarana dan protokoler pemda						
	Jumlah				384.800.000	0	0

MATRIK PENINGKATAN KUALITAS DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN

No	Program/Kegiatan Pokok dalam RPJM 2006-2010	Program/Kegiatan Pokok dalam RKPD 2007	Sasaran Program Tahun 2007	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp)		
					APBD II	APBD I	APBN
1	Program : Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	Program : Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja					
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :					
	- Perlindungan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	- Pengawasan dan Keselamatan Kerja	Meningkatnya keselamatan pekerja/buruh	Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi	50.000.000		
	- Pembentukan dan pengoptimalan fungsi lembaga tenaga kerja	- Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	Meningkatnya hubungan baik pengusaha dengan pekerja/buruh	Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi	30.000.000		
	- Peningkatan sosialisasi hubungan industrial	- Pelatihan dan Produktivitas Kerja	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	0	

	- Peningkatan penegakan hukum, standar upah, dan kesejahteraan serta perlindungan tenaga kerja						
2	Program : Pembangunan Perumahan dan Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Program : Pembangunan Perumahan dan Pemberdayaan Komunitas Perumahan					
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :					
	- Penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana sehat, termasuk perumahan PNS, TNI/POLRI dan masyarakat berpendapatan rendah	- Pembinaan Kawasan Terbinanya PTA dan PTB	Terbinanya kawasan PTA dan PTB	Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20.750.000		183.750.000
	- Pembangunan rumah baru layak huni bagi masyarakat miskin yang belum memiliki rumah	- Pengembangan Kawasan Perkotaan Mandiri di Wilayah Transmigrasi	Terbinanya kawasan transmigrasi	Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	0	

<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan pola subsidi yang tepat sasaran, efisien dan efektif dalam pembangunan rumah sederhana sehat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Transmigrasi paradigma baru 	<p>Terbinanya kawasan transmigrasi</p>	<p>Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p>	<p>16.500.000</p>	<p>148.500.000</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya yang berbasis pemberdayaan masyarakat 						
<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi dan bantuan teknis perbaikan rumah pada kawasan kumuh, desa tradisional dan desa eks transmigrasi 						
<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas lingkungan pada kawasan kumuh, desa tradisional dan desaa eks transmigrasi 						

	- Pengembangan dan peningkatan pemukiman dan sarana prasarana pendukung transmigrasi						
	Jumlah				117.250.000	148.500.000	183.750.000

Matrik Peningkatan Derajat Kesehatan dan Pemerataan Kesehatan

No	Program/Kegiatan Pokok dalam RPJM 2006-2010	Program/Kegiatan Pokok dalam RKPD 2007	Sasaran Program Tahun 2007	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp)		
					APBD II	APBD I	APBN
1	Program : Pelayanan Kesehatan Perorangan	Program : Pelayanan Kesehatan Perorangan					
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :					
	- Pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit	- Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas		Dinas Kesehatan	0		0
	- Perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit	- Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawatan		Dinas Kesehatan	0	0	
	- Pengadaan dan perbekalan rumah sakit	- Rehabilitasi Polindes, Pustu dan Puskesmas		Dinas Kesehatan	1.000.000.000	990.000.000	99.000.000
	- Pemantapan pelayanan kesehatan rujukan	- Pengadaan Peralatan Medis Puskesmas, Pustu dan Polindes		Dinas Kesehatan	1.650.000.000		4.950.000.000

- Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin	- Pengadaan Puskesmas Keliling/Ambulance		Dinas Kesehatan	600.000.000		
- Melakukan advokasi dan sosialisasi kebijakan upaya kesehatan perorangan	- Peningkatan gedung RSUD Sei Dareh		RSUD S.Dareh	2.000.000.000	-2.000.000.000	
- Melakukan kajian dan monev terhadap kegiatan kesehatan perorangan	- Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai	Mencukupi alat-alat kesehatan	SUD S. Dareh	506.000.000		
- Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	- Pengadaan Alat-alat Kedokteran	Tersedianya alat-alat kedokteran	SUD S. Dareh	400.000.000		
- Peningkatan peran serta sektor swasta dalam upaya kesehatan perorangan	- Pengadaan Obat-obatan	Tersedianya obat-obatan	SUD S. Dareh	224.000.000		
	- Pengadaan Oksigen	Tersedianya oksigen	SUD S. Dareh	135.000.000		

		- Pengadaan Bahan Laboratorium	Mencukupinya bahan Labor	SUD S. Dare	70.000.000		
		- Pengadaan Bahan Makanan dan Minuman Pasien	Tersedianya makanan dan minuman pasien	SUD S. Dare	200.000.000		
		- Pengadaan dan pendistribusian obat esensial, reagen dan operasional gudang farmasi	Tersedianya obat esensial dan reagen untuk pelayanan kesehatan dasar	Dinas Kesehatan	307.000.000		
2	Program : Upaya Kesehatan Masyarakat	Program : Upaya Kesehatan Masyarakat					
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :					
	- Pelayanan kesehatan penduduk miskin	- Pelatihan petugas dan guru UKS	Terlaksananya pelatihan guru dan petugas UKS	Dinas Kesehatan	23.750.000		
	- Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan	- Pelatihan dokter kecil	Terlaksananya pelatihan dokter kecil	Dinas Kesehatan	29.750.000		

- Pemantapan UKBK bagi kelompok potensial, bintek dan evaluasi pelayanan kesehatan	- Pelatihan kader kesehatan remaja (KKR)	Terlaksananya Pelatihan kader kesehatan remaja (KKR)	Dinas Kesehatan	28.750.000		
- Penyediaan bantuan/dukungan pada puskesmas	- Pembinaan UKS	Terlaksananya Pembinaan sekolah sehat	Dinas Kesehatan	38.250.000		
- Pembinaan pemberdayaan kesehatan masyarakat	- Sosialisasi pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR)	Terlaksananya Sosialisasi pelayanan kesehatan peduli remaja	Dinas Kesehatan			8.300.000
- Peningkatan pelayanan kesehatan dasar	- Pelatihan PKPR	Terlaksananya Pelatihan PKPR	Dinas Kesehatan			24.250.000

mencakup promote kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar

<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pengetahuan petugas tentang kesehatan reproduksi dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan reproduksi pada Ibu dan Anak 	<p>Terlaksananya Peningkatan pengetahuan petugas tentang kesehatan reproduksi dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan reproduksi pada Ibu dan Anak</p>	<p>Dinas Kesehatan</p>	<p>37.000.000</p>		<p>294.238.620</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan evaluasi program KIA 	<p>Terlaksananya Pembinaan dan evaluasi program KIA</p>	<p>Dinas Kesehatan</p>			
<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan dan pembinaan kelas ibu hamil 	<p>Terlaksananya Pembentukan dan pembinaan kelas ibu hamil</p>	<p>Dinas Kesehatan</p>			
<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan evaluasi AMP (Audit Maternal Paternal) dan pelatihan AMP 	<p>Terlaksananya Pembinaan dan evaluasi AMP (Audit Maternal Paternal) dan pelatihan AMP</p>	<p>Dinas Kesehatan</p>			

		<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan evaluasi tumbuh kembang balita dan apras dan pelatihan tumbang dan apras 	Terlaksananya Pembinaan dan evaluasi tumbuh kembang balita dan apras dan pelatihan tumbang dan apras	Dinas Kesehatan		
		<ul style="list-style-type: none"> - Lomba balita indonesia 	Terlaksananya Lomba balita indonesia	Dinas Kesehatan		
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan dan pembinaan kelompok lanjut usia 	Terlaksananya Pembentukan dan pembinaan kelompok lanjut usia	Dinas Kesehatan		
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dukun bayi 	Terlaksananya Pembinaan dukun bayi	Dinas Kesehatan		
3	Program : Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Program : Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit				
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :				
	<ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko 	<ul style="list-style-type: none"> - Imunisasi 	Terlaksananya Imunisasi	Dinas Kesehatan	300.000.000	

- Peningkatan mutu dan pelayanan imunisasi	- Pemberantasan dan pencegahan penyakit ISPA	Terlaksananya Pemberantasan dan pencegahan penyakit ISPA	Dinas Kesehatan	17.886.000		
- Penemuan dan tata laksana penderita	- Pemberantasan dan pencegahan penyakit TB Paru	Terlaksananya Pemberantasan dan pencegahan penyakit TB Paru	Dinas Kesehatan	45.830.000		
- Peningkatan survailance epidemiologi dan penanggulangan wabah	- Pemberantasan dan pencegahan penyakit HIV/AIDS	Terlaksananya Pemberantasan dan pencegahan penyakit HIV/AIDS	Dinas Kesehatan	29.068.000		
- Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit	- Pengamatan dan pengkajian penyakit (Survailance)	Terlaksananya Pengamatan dan pengkajian penyakit (Survailance)	Dinas Kesehatan	16.862.500		
	- Pembinaan dan pelayanan kesehatan penyakit Rabies	Terlaksananya Pembinaan dan pelayanan kesehatan penyakit Rabies	Dinas Kesehatan	9.029.000		

		- Pemberantasan dan pencegahan penyakit berbasis binatang	Terlaksananya Pemberantasan dan pencegahan penyakit berbasis binatang	Dinas Kesehatan	34.000.000		
		- Pemberantasan dan pencegahan penyakit diare	Terlaksananya Pemberantasan dan pencegahan penyakit diare	Dinas Kesehatan	12.000.000		
		- Pertemuan dan pembinaan program PL	Terlaksananya Pertemuan dan pembinaan program PL	Dinas Kesehatan	14.524.000		
		- Pemeriksaan dan pembinaan TTU dan TPM	Terlaksananya Pemeriksaan dan pembinaan TTU dan TPM	Dinas Kesehatan	6.000.000		
		- Penanggulangan kasus KLB	Terlaksananya Penanggulangan kasus KLB	Dinas Kesehatan		50.000.000	
4	Program : Perbaikan Gizi Masyarakat	Program : Perbaikan Gizi Masyarakat			26.500.000		129.195.400
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :					

- Peningkatan SDM Pengelola program gizi masyarakat	- Pelatihan penatalaksanaan gizi buruk dan gizi kurang	Terlaksananya Pelatihan penatalaksanaan gizi buruk dan gizi kurang	Dinas Kesehatan			
- Penanggulangan KEP, anemia, GAKY, kurang Vit A, dan zat mikro lainnya	- Pelatihan pemantauan pertumbuhan paradigma baru	Terlaksananya Pelatihan pemantauan pertumbuhan paradigma baru	Dinas Kesehatan			
- Penanggulangan gizi lebih	- Pemberian makanan tambahan pemulihan gizi buruk dan kurang	Terlaksananya Pemberian makanan tambahan pemulihan	Dinas Kesehatan			
- Peningkatan surveillance gizi	- Pemantauan status gizi	Terlaksananya Pemantauan status gizi	Dinas Kesehatan			
- Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian kadarzi	- Distribusi kapsul minyak beryodium	Terlaksananya Distribusi KMB	Dinas Kesehatan	25.000.000		
- Pengadaan obat program gizi masyarakat	- Pemetaan Gondok	Terlaksananya Pemetaan Gondok	Dinas Kesehatan			16.500.000

- Peningkatan peran serta kelompok potensial dalam meningkatkan status gizi masyarakat	- Distribusi Kapsul Vitamin A	Terlaksananya Distribusi Kapsul Vitamin A	Dinas Kesehatan	21.000.000		
	- Distribusi Tablet FE	Terlaksananya Distribusi Tablet FE	Dinas Kesehatan	12.000.000		
	- Survey Anemia	Terlaksananya Survey Anemia	Dinas Kesehatan			15.000.000
	- Pelatihan Pelayanan Gizi Institusi	Terlaksananya Pelatihan Pelayanan Gizi Institusi	Dinas Kesehatan	25.000.000		
	- Pemetaan Kadarzi	Terlaksananya Sosialisasi Eksklusif	Dinas Kesehatan	30.000.000		
	- pertemuan dan evaluasi program perbaikan gizi masyarakat	Terlaksananya evaluasi program perbaikan gizi masyarakat	Dinas Kesehatan	12.000.000		
	- Sosialisasi Eksklusif	Terlaksananya Sosialisasi Eksklusif	Dinas Kesehatan	20.000.000		
Jumlah				7.906.199.500	-960.000.000	5.536.484.020

Matrik Peningkatan Kualitas Perlindungan Sosial, Kependudukan dan KEI Berencana

No	Program/Kegiatan Pokok dalam RPJM 2006-2010	Program/Kegiatan Pokok dalam RKPD 2007	Sasaran Program Tahun 2007	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp)	
					APBD II	APBD I
1	Program : Keluarga Berencana	Program : Keluarga Berencana				
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :				
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan kebijakan pelayanan KB, KIE dan peran serta masyarakat dalam KB dan Kesehatan reproduksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Advokasi KIE dan Pelayanan KB 	Meningkatnya aktifitas Masyarakat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	17.000.000	
	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi - Peningkatan penggunaan kontrasepsi yang efektif dan efisien 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Alat Kontrasepsi 	Meningkatnya aktifitas Masyarakat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	54.750.000	

	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan alat, obat dan cara kontrasepsi - Penyelenggaraan promosi dan pemenuhan hak dan kesehatan reproduksi 					
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan sistem pengelolaan dan kemampuan tenaga lapangan KB 					
2	Program : Penataan Administrasi Kependudukan	Program : Penataan Administrasi Kependudukan				
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :				

	<ul style="list-style-type: none"> - Penyempurnaan sistem pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan melalui Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan Petugas, Kader IMP 	Meningkatnya aktifitas Masyarakat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	180.000.000	
	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan kelembagaan administrasi kependudukan yang berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Catatan Sipil Keliling 	Meningkatnya aktifitas Masyarakat	Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil	10.000.000	
	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan SDM aparatur pengelola kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemutakhiran Data Keluarga 	Meningkatnya aktifitas Masyarakat	Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil	208.000.000	
	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang administrasi informal kependudukan 					

3	Program : Kesehatan Reproduksi Remaja	Program : Kesehatan Reproduksi Remaja				
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :				
	- Pengembangan kebijakan pelayanan kesehatan reproduksi remaja	- Orientasi KKR/IMS HIV AIDS bagi P3N dan LSOM	Meningkatnya aktifitas Masyarakat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	50.000.000	

<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan promosi kesehatan reproduksi remaja, pemahaman dan pencegahan HIV/AIDS dan bahaya NAPZA 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan PIKKRR 	Meningkatnya aktifitas Masyarakat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	17.000.000	
<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan konseling bagi masyarakat, keluarga dan remaja 					
<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja 					

4	Program : Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Program : Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga				
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :				
	- Pengembangan dan pemantapan ketahan dan pemberdayaan keluarga	- Sosialisasi dan Pembentukan PKLK	Meningkatnya aktifitas Masyarakat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	20.000.000	
	- Pengembangan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan	- Pengembangan KBS Fakir Miskin	Menurunnya angka pengangguran	Bag. Kesra Sekretariat Daerah	250.000.000	
	- Pengembangan cakupan dan kualitas kelompok bina keluarga balita, remaja dan lanjut usia	- Pembangunan Rumah Sehat Sederhana	Meningkatnya rumah sehat	Bag. Kesra Sekretariat Daerah	11.000.000	110.000.000
	- Penyelenggaraan advokasi, KIE dan konseling bagi keluarga pola asuh dan tumbang kembang anak, kebutuhan dasar	- Pemberdayaan Panti Sosial Asuhan Anak	Meningkatnya aktifitas Masyarakat	Bag. Kesra Sekretariat Daerah		16.500.000
		- Penyuluhan Sosial Keliling	Meningkatnya aktifitas Masyarakat	Bag. Kesra Sekretariat Daerah	2.200.000	19.800.000

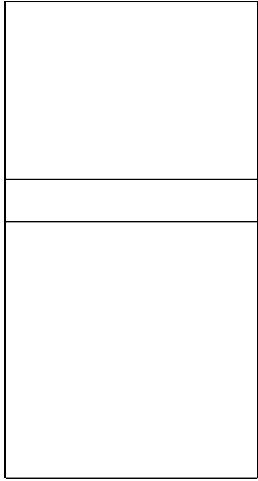
	kebutuhan dasar keluarga, akses terhadap sumber daya ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan Rumah Tak Layak Huni - Pengembangan dan Pembinaan KKKS Kabupaten Dharmasraya - Pengembangan Sarana dan Prasarana Panti 	<p>Meningkatnya kondisi rumah layak huni</p> <p>Meningkatnya kesejahteraan keluarga di Kabupaten Dharmasraya</p> <p>Meningkatnya aktifitas Masyarakat</p>	<p>Bag. Kesra Sekretariat Daerah</p> <p>Bag. Kesra Sekretariat Daerah</p> <p>Bag. Kesra Sekretariat Daerah</p>	<p>500.000.000</p> <p>8.250.000</p> <p>27.500.000</p>	<p>50.000.000</p> <p>74.250.000</p>
4	Program : Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Alam	Program : Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Alam				
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :				
	<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan sistem informasi dan peta daerah rawan bencana alam - Penyiapan kelembagaan / satuan pelaksana penanganan bencana alam 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat Sekitar Lokasi Bencana Alam - Pelatihan Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam 	<p>Meningkatnya partisipatif masyarakat dalam penanggulangan bencana alam</p> <p>Meningkatnya SDM Pengelola bencana alam</p>	<p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana</p> <p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana</p>	<p>7.000.000</p> <p>7.000.000</p>	

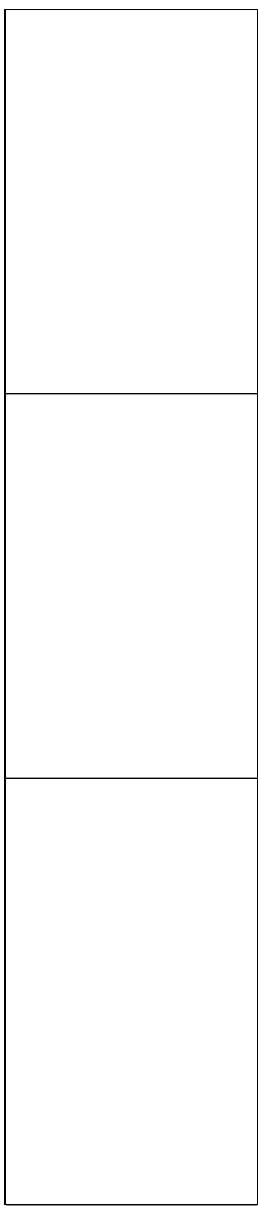
<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan peralatan pendukung mitigasi dan penanganan bencana alam 					
<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas personil dan lembaga untuk penanganan kondisi bencana alam 					
<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan masyarakat yang bermukim di kawasan rawan bencana alam 					
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pencegahan dan penanggulangan bencana alam 					
<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian banjir dan pengamanan sungai 					

	- Peningkatan penanganan pasca bencana					
	Jumlah				1.369.700.000	270.550.000

LUARGA

(p)
APBN





2.500.000.000

2.500.000.000

MATRIK PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

No	Program/Kegiatan Pokok dalam RPJM 2006-2010	Program/Kegiatan Pokok dalam RKPD 2007	Sasaran Program Tahun 2007	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp)		
					APBD II	APBD I	APBN
1	Program : Peningkatan Upaya Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Umum	Program : Peningkatan Upaya Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Umum					
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :					
	- Peningkatan operasi penegakan produk hukum daerah	- Pengamanan Objek Vital Aset Daerah	Terjaganya keamanan objek vital dan aset daerah lainnya	Kantor Pol PP	50.000.000		
	- Pengamanan aset daerah	- Penertiban Pekat, Perda, Keputusan Bupati, IMB dan DMJ dan Pedagang Kaki Lima	Meningkatnya warga patuh hukum	Kantor Pol PP	50.000.000		
	- Peningkatan kapasitas Pol PP	- Rapat Koordinasi Polisi Pamong Praja se-Sumatera Barat	Terwujudnya kinerja Pol PP yang maksimal	Kantor Pol PP	16.425.000		
	- Peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat						
2	Program : Pencegahan dan pemberantasan Maksiat dan Penyakit Masyarakat	Program : Pencegahan dan pemberantasan Maksiat dan Penyakit Masyarakat					
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :					

<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan fungsi kontrol dan peran serta komponen masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi maksiat dan penyakit masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA 	<p>Meningkatnya aktifitas Masyarakat</p>	<p>Kantor Pol PP</p>	<p>4.500.000</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan sosialisasi tentang penyakit masyarakat dan upaya penanggulangannya terhadap generasi muda dan anak sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyuluhan Pemberantasan NAPZA dan Maksiat 		<p>Kantor Pol PP</p>	<p>7.000.000</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi dan operasional BND 	<ul style="list-style-type: none"> - Operasional Badan Narkotika Kabupaten 	<p>Meningkatnya pembinaan terhadap obat terlarang</p>	<p>Kantor Pol PP</p>	<p>50.478.800</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi antar pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan, penanganan dan pemberantasan perbuatan maksiat dan penyakit masyarakat 						

	- Penagakan sanksi hukum positif dan hukum adat terhadap pelaku						
3	Program : Peningkatan dan Pemantapan Integrasi Bangsa	Program : Peningkatan dan Pemantapan Integrasi Bangsa					
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :					
	- Pemantapan wawasan dan ketahanan bangsa	- Pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam Era Otonomi Daerah	Meningkatnya aktifitas Masyarakat	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	15.000.000		
	- Fasilitasi dan operasional tim KOMINDA	- Penataran Ketahanan dan Kestabilan Keamanan Masyarakat	Meningkatnya aktifitas Masyarakat	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	7.000.000		
	- Pemantapan komunikasi dan konsolidasi pembanuran bangsa bagi generasi muda	- Pelatihan Tenaga Linmas Nagari	Meningkatnya aktifitas Masyarakat	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	5.000.000		
		- Operasional KOMINDA	Meningkatnya aktifitas Masyarakat	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	44.000.000		
	Jumlah				249.403.800	0	0

MATRIK PENINGKATAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA ALAM

No	Program/Kegiatan Pokok dalam RPJM 2006-2010	Program/Kegiatan Pokok dalam RKPDP 2007	Sasaran Program Tahun 2007	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp)		
					APBD II	APBD I	APBN
1	Program : Pengelolaan dan Pengendalian Usaha Pertambangan	Program : Pengelolaan dan Pengendalian Usaha Pertambangan					
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :					
	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan regulasi, pedoman teknis dan standar pertambangan mineral dan batubara 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan dan penertiban eksplorasi dan eksploitasi pertambangan 	Meningkatkan kualitas pengelolaan potensi pertambangan melalui peningkatan kualitas SDM aparatur, penertiban perizinan dan pengawasan terhadap pengusaha bidang pertambangan	Dinas Pertambangan dan energi	75.000.000		
	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan pengawasan kegiatan penambangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Analisa dan kajian potensi pertambangan 	Meningkatkan kualitas pengelolaan potensi	Dinas Pertambangan dan	75.000.000		

<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan produksi, pemasaran dan pengelolaan mineral dan batubara - Evaluasi perencanaan produksi dan pemasaran mineral dan batubara serta program pengembangan masyarakat di wilayah pertambangan - Pembinaan, evaluasi, pengawasan dan penertiban pertambangan rakyat yang berpotensi mencemari lingkungan, termasuk PETI 		<p>pertambangan melalui peningkatan kualitas SDM aparatur, penertiban perizinan dan pengawasan terhadap pengusaha bidang pertambangan</p>	<p>energi</p>			
<ul style="list-style-type: none"> - Pemulihan lingkungan pasca tambang dan penerapan kebijakan produksi dan pengelolaan pasca tambang yang berwawasan lingkungan 						
<ul style="list-style-type: none"> - Penyelidikan umum potensi pertambangan serta pemetaan geologi dan geohidrologi 						

2	Program : Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Program : Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup					
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :					
	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan kualitas air tanah dan air permukaan terutama pada daerah permukiman dan kawasan industri 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup 	<p>Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup melalui peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat, pengembangan kelembagaan, peningkatan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup</p>	<p>Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah</p>	<p>30.000.000</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan penataan baku mutu air limbah, emisi gas buang dan pengelolaan limbah B3 	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis dan kajian study amdal kawasan (perkantoran, pemukiman, perdagangan, dll) 		<p>Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah</p>	<p>45.000.000</p>		

- Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana labor lingkungan
- Penyelesaian kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
- Penyusunan regulasi dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pedoman teknis, baku mutu lingkungan hidup
- Pengembangan penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan SDA, limbah dan teknologi industri
- Peningkatan produksi dan penggunaan pupuk kompos
- Peningkatan peran masyarakat dan sektor informal dalam upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan evaluasi perusahaan dan kegiatan wajib UKL/UPL dan AMDAL 	<p>Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup melalui peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat, pengembangan kelembagaan, peningkatan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup</p>	<p>Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah</p>	<p>50.000.000</p>		

- Peningkatan pengelolaan dan sarana dan prasarana persampahan						
Jumlah				275.000.000	0	0

MATRIK PENINGKATAN PEMERATAAN DAN MUTU PENDIDIKAN

No	Program/Kegiatan Pokok dalam RPJM 2006-2010	Program/Kegiatan Pokok dalam RKPD 2007	Sasaran Program Tahun 2007	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp)	
					APBD II	APBD I
1	Program : Pendidikan Anak Usia Dini	Program : Pendidikan Anak Usia Dini				
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :				
	- Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan optimalisasi sarana yang ada	- Penyelenggaraan PAUD		Dinas Pendidikan	100.000.000	8.700.000.000
	- Dukungan penyelenggaraan pendidikan	- Pengadaan Alat Peraga TK	Tersedianya alat peraga TK	Dinas Pendidikan	200.000.000	
	- Penumbuhan partisipasi masyarakat untuk penyelenggaraan PAUD					
2	Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun				
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :				

<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas - Rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak - Penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan secara merata, bermutu, tepat lokasi terutama daerah terpencil - Penyediaan dukungan biaya operasional pendidikan - Penyediaan alternatif layanan pendidikan dasar 	- Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar (SD)		Dinas Pendidikan	6.500.000.000	
	- Rehabilitasi MIS / MIN		Dinas Pendidikan	0	
	- Pelaksanaan UAS/UAN	Terlaksananya UAS/UAN dengan lancar	Dinas Pendidikan	367.000.000	
	- Sosialisasi Kurikulum 2004	Meningkatnya pemahaman kurikulum sekolah	Dinas Pendidikan	75.000.000	
	- Lomba Gugus SD	Meningkatnya keterampilan murid	Dinas Pendidikan	75.000.000	

- Peningkatan upaya penarikan kembali siswa putus sekolah	- Lomba Sekolah Sehat	Meningkatnya keterampilan murid	Dinas Pendidikan	80.000.000	
- Menyediakan bantuan beasiswa bagi peserta didik berprestasi dari keluarga yang tidak mampu	- Lomba 10 Mata Pelajaran	Meningkatnya keterampilan murid	Dinas Pendidikan	0	0
- Pengembangan kurikulum nasional dan lokal yang disesuaikan dengan perkembangan iptek, budaya dan seni	- Pembangunan USB SD		Dinas Pendidikan	0	
- Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas peserta didik	- Pembangunan USB SMP		Dinas Pendidikan	0	

	- Penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah yang berorientasi mutu	- Pembangunan SDLB		Dinas Pendidikan	0	
	- Penyediaan informasi pendidikan yang memadai					
	- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan					
	- Pengembangan sistem evaluasi pendidikan yang akuntabel dan transparan					
2	Program : Pendidikan Menengah	Program : Pendidikan Menengah				
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :				

- Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas	- Sosialisasi KBK		Dinas Pendidikan	25.000.000	
- Rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak	- Lomba Olimpiade Science dan Mata Pelajaran SMP, SMA dan SMK	Meningkatnya keterampilan murid	Dinas Pendidikan	10.000.000	45.000.000
- Penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan secara merata, bermutu, tepat lokasi terutama daerah terpencil	- Uji Kompetensi SMK		Dinas Pendidikan	50.000.000	
- Penyediaan alternatif layanan pendidikan menengah	- Sekolah unggul SMP, SMA dan SMK		Dinas Pendidikan	100.000.000	900.000.000

- Penataan bidang keahlian pada pendidikan menengah kejuruan sesuai kebutuhan lapangan kerja

- Menyediakan bantuan beasiswa bagi peserta didik berprestasi dari keluarga yang tidak mampu

- Pengembangan kurikulum nasional dan lokal yang disesuaikan dengan perkembangan iptek, budaya dan seni

- Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas peserta didik

- Pembangunan USB SMA

Dinas Pendidikan

450.000.000

	- Penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah yang berorientasi mutu					
	- Penyediaan informasi pendidikan yang memadai					
	- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan					
	- Pengembangan sistem evaluasi pendidikan yang akuntabel dan transparan					
3	Program : Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program : Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :				

<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan rasio pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan - Peningkatan kualitas layanan pendidik melalui diklat - Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hukum 	- Pelatihan Manajemen Tenaga Administrasi Sekolah	Meningkatnya kemampuan Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan	480.000.000	
	- Pelatihan Penilaian dan Perhitungan Angka Kredit Guru, Pengawas dan Penilik Dikmas		Dinas Pendidikan	55.000.000	
	- Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS)	Meningkatnya kemampuan pengawas	Dinas Pendidikan	360.000.000	
	- Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)	Meningkatnya kemampuan Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan	60.000.000	
	- Pelatihan Manajemen Unsur Pimpinan tingkat SMP, SMA dan SMK	Meningkatnya kemampuan Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan	60.000.000	
	- Lomba Guru Berprestasi	Meningkatnya kemampuan guru	Dinas Pendidikan	0	0

		- Lomba Guru Berprestasi SMP, SMA, SMK	Meningkatnya kemampuan guru	Dinas Pendidikan	0	0
		- MGMP tingkat SMP, SMA, SMK	Meningkatnya kemampuan guru	Dinas Pendidikan	60.000.000	
		- Penyusunan Data Pokok Kependidikan	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem, mekanisme dan prosedur pengawasan	Dinas Pendidikan	25.000.000	
4	Program : Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Program : Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :				
	- Membangun dan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan daerah	- Pengadaan Buku Paket dan Penunjang	Tersedianya buku paket dan penunjang	Dinas Pendidikan	980.000.000	
	- Mendorong tumbuhnya perpustakaan masyarakat	- Pembangunan Ruang Perpustakaan SD		Dinas Pendidikan	1.687.500.000	-1.687.500.000

	- Peningkatan intensitas pelaksanaan kampanye dan promosi budaya baca					
	- Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi					
	Jumlah				11.799.500.000	8.700.000.000

0

	0
	0

0

4.050.000.000

0

MATRIK PENINGKATAN KUALITAS DAN PERAN PEREMPUAN

No	Program/Kegiatan Pokok dalam RPJM 2006-2010	Program/Kegiatan Pokok dalam RKPD 2007	Sasaran Program Tahun 2007	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp)		
					APBD II	APBD I	APBN
1	Program : Peningkatan kulaitas hidup dan perlindungan perempuan	Program : Peningkatan kulaitas hidup dan perlindungan perempuan					
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :					
	- Pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan	- Sosialisasi PUG dan KKG	Meningkatnya aktifitas Masyarakat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	31.038.150		
	- Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	- Pembinaan dan Evaluasi Revitalisasi Posyandu	Meningkatnya aktifitas Masyarakat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	25.000.000		
	- Peningkatan kualitas hidup perempuan	- Pemberdayaan Masyarakat Temu Kader Posyandu, BKB dan PAUD	Meningkatnya aktifitas Masyarakat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	80.000.000		

<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan sistem pencatatan dan pelaporan dan sistem penanganan dan penyelesaian kasus tindak kekerasan eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan Dasa Wisma 	<p>Meningkatnya aktifitas Masyarakat</p>	<p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana</p>	<p>64.400.000</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit di tingkat kabupaten sebagai sarana perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan Program Terpadu P2WKSS 	<p>Meningkatnya aktifitas Masyarakat</p>	<p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana</p>	<p>40.000.000</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan upaya perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kinerja Pengurus PKK 	<p>Meningkatnya aktifitas Masyarakat</p>	<p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana</p>	<p>45.000.000</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan peran masyarakat dan media dalam penanggulangan pornografi dan pornoaksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat HKG PKK-KB-KES 	<p>Meningkatnya aktifitas Masyarakat</p>	<p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana</p>	<p>50.000.000</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kinerja Pokjanal Posyandu 	<p>Meningkatnya aktifitas Masyarakat</p>	<p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana</p>	<p>47.916.550</p>		

		- Pemberdayaan Masyarakat UPT	Meningkatnya aktifitas Masyarakat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	30.000.000		
	Jumlah				413.354.700	0	0

Matrik Pengembangan Pariwisata dan Budaya Daerah

No	Program/Kegiatan Pokok dalam RPJM 2006-2010	Program/Kegiatan Pokok dalam RKPD 2007	Sasaran Program Tahun 2007	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp)		
					APBD II	APBD I	APBN
1	Program : Pengembangan Pariwisata	Program : Pengembangan Pariwisata					
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :					
	- Pengembangan rencana induk pengembangan pariwisata	- Inventarisasi Kekayaan Seni dan Budaya	Terdatanya kekayaan seni dan budaya	Dinas Perhubungan dan Pariwisata	150.000.000		
	- Pembangunan dan pengembangan objek wisata	- Penyusunan RIPP (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata)	Tersusunnya rencana pengembangan pariwisata jangka panjang	Dinas Perhubungan dan Pariwisata	200.000.000		
	- Pembangunan sarana dan prasarana penunjang wisata	- Lomba-lomba Bidang Seni dan Budaya	Meningkatnya kreatifitas seni masyarakat	Dinas Perhubungan dan Pariwisata	20.000.000	150.000.000	
	- Pengembangan even-even pariwisata	- Pemeliharaan dan Perlindungan Benda Cagar Budaya	Terpeliharanya benda cagar budaya	Dinas Perhubungan dan Pariwisata	75.000.000	150.000.000	

<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan masyarakat sadar wisata - Pengembangan sistem informasi kepariwisataan yang efektif dan efisien - Mendorong pertumbuhan dan perkembangan investasi dalam industri pariwisata - Peningkatan kemampuan aparatur pengelola pariwisata 	- Pembuatan Komplek Makam Pahlawan	Tertatanya kompleks makam pahlawan	Dinas Perhubungan dan Pariwisata	150.000.000		
	- Pengiriman Kontingen Kesenian	Adanya peran serta dalam berbagai event kesenian	Dinas Perhubungan dan Pariwisata	50.000.000	150.000.000	
	- Jambore Seni	Adanya peran serta dalam berbagai event kesenian	Dinas Perhubungan dan Pariwisata	150.000.000		
	Jumlah			795.000.000	450.000.000	0

Matrik Peningkatan Kualitas Generasi Muda dan Pengembangan Olah Raga

No	Program/Kegiatan Pokok dalam RPJM 2006-2010	Program/Kegiatan Pokok dalam RKPD 2007	Sasaran Program Tahun 2007	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp)		
					APBD II	APBD I	APBN
1	Program : Pembangunan Olah Raga	Program : Pembangunan Olah Raga					
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :					
	- Pengembangan olah raga masal bagi generasi muda dan masyarakat	- Pembentukan Paskibra Kabupaten dan Utusan Propinsi	Terbentuknya Paskibra Kabupaten	Dinas Pendidikan	170.000.000		
	- Peningkatan pemanduan bakat dan pembibitan olah raga	- Pelatihan Pemuda Putus Sekolah	Terlatihnya pemuda putus sekolah	Dinas Pendidikan	150.000.000		
	- Peningkatan prestasi olah raga	- Bantuan Modal Usaha bagi Pemuda Terampil	Tersedianya bantuan modal usaha bagi pemuda terampil	Dinas Pendidikan	310.000.000		
	- Pembinaan manajemen olah raga	- PORDINI	Terselenggaranya PORDINI	Dinas Pendidikan	60.000.000		
	- Peningkatan profesionalisme pelatih, manajer dan tenaga keolahragaan	- POPDA	Terselenggaranya POPDA	Dinas Pendidikan	65.000.000		
	- Pengembangan sistem penghargaan dan kesejahteraan bagi atlet, pelatih dan tenaga keolahragaan	- Pembinaan Olahraga Berprestasi	Meningkatnya prestasi olahraga potensial	Dinas Pendidikan	50.000.000		

	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan pembangunan sarana dan prasarana olah raga - Pembinaan kemitraan dan kewirausahaan pengembangan olah raga 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga 	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	Dinas Pendidikan	400.000.000		
2	Program : Pengembangan Partisipasi dan Potensi Pemuda	Program : Pengembangan Partisipasi dan Potensi Pemuda					
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :					
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan kepemudaan - Peningkatan peran serta pemuda dalam kegiatan pembangunan - Peningkatan wawasan dan sikap mental pemuda dalam pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pemberdayaan SPMN 	Meningkatnya pemberdayaan sarjana dalam masyarakat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	300.000.000		
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pelatihan LPM 	Meningkatnya aktifitas Masyarakat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	20.000.000		

	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kreativitas, inovasi pemuda sebagai wadah penyaluran minat dan bakat dan mewujudkan kemandirian 						
	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan kepemudaan 						
	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan advokasi dan penyelamatan pemuda dari bahaya NAPZA dan HIV/AIDS 						
	Jumlah				1.525.000.000	0	0

MATRIK PENINGKATAN PEMBANGUNAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK AZAZI MANUSIA (HAM)

No	Program/Kegiatan Pokok dalam RPJM 2006-2010	Program/Kegiatan Pokok dalam RKPД 2007	Sasaran Program Tahun 2007	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp)		
					APBD II	APBD I	APBN
1	Program : Peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum daerah	Program : Peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum daerah					
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :					
	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan dan HAM - Perwujudan perilaku dan keteladanan dari penyelenggara pemerintahan - meningkatkan ruang partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah - Sosialisasi UU No. 41 Tahun 1999 dan INPRES No. 4 Tahun 2005 	<p>Meningkatnya aktifitas Masyarakat</p> <p>Masyarakat sekitar Lokasi Kawasan Hutan</p>	<p>Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>Dinas Kehutanan</p>	20.000.000	20.000.000	
2	Program : Peningkatan dan penataan produk hukum daerah	Program : Peningkatan dan penataan produk hukum daerah					
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :					
	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan dan penataan produk hukum daerah yang aspiratif dan akomodatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan dan Penyusunan Produk hukum daerah 	Terciptanya produk hukum daerah	Bag. Hukum Setdakab	100.000.000		

<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun perencanaan produk hukum yang terpadu, aspiratif dan akomodatif - Pembinaan, penyusunan dan pengawasan serta evaluasi produk hukum daerah - Peningkatan profesionalisme aparatur pengelola dalam penyusunan produk hukum - Dokumentasi dan informasi produk hukum daerah 	- Penyusunan dan Penerbitan buku JDI Hukum dan Lembaran Daerah	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat	Bag. Hukum Setdakab	40.000.000		
	- Penyuluhan Hukum	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat	Bag. Hukum Setdakab	50.000.000		
	- Penyempurnaan tatalaksana dan hubungan kerja antar unit kerja	Terciptanya pemerintahan kabupaten yang efektif dan transparan	Bag. Organisasi Setdakab	12.000.000		
	- Penyusunan LAKIP Pemda		Bag. Organisasi Setdakab	100.000.000		
	- Analisa Jabatan		Bag. Organisasi Setdakab	60.000.000		
Jumlah				402.000.000	0	0

Matrik Peningkatan, Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Nilai-nilai Keag

No	Program/Kegiatan Pokok dalam RPJM 2006-2010	Program/Kegiatan Pokok dalam RKPD 2007	Sasaran Program Tahun 2007	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp)	
					APBD II	APBD I
1	Program : Peningkatan, Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	Program : Peningkatan, Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan				
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :				
	- Penyuluhan dan bimbingan keagamaan	- Pembinaan dan Pemberdayaan Pondok Pesantren	Meningkatnya aktifitas ibadah masyarakat	Bag. Kesra Sekretariat Daerah	50.000.000	
	- Penyelenggaraan MTQ	- Pembinaan Imam, Gharib, Khatib dan Guru TPQ/TPSQ	Meningkatnya aktifitas ibadah masyarakat	Bag. Kesra Sekretariat Daerah	100.000.000	
	- Peningkatan kerjasama secara terpadu untuk memberantas pornografi, pornoaksi, KKN,dll	- Penyelenggaraan Turba Ramadhan	Meningkatnya aktifitas ibadah masyarakat	Bag. Kesra Sekretariat Daerah	100.000.000	
	- Penyelenggaraan pesantren kilat, lomba karya ilmiah agama, pembinaan bakat kepemimpinan agama	- Peningkatan Penyuluhan dan Bimbingan Keagamaan	Meningkatnya aktifitas ibadah masyarakat	Bag. Kesra Sekretariat Daerah	20.000.000	

	- Pemberian bantuan sarana, peralatan, buku pelajaran agama dan buku agama di sekolah umum	- Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan Agama	Meningkatnya aktifitas ibadah masyarakat	Bag. Kesra Sekretariat Daerah	25.000.000	
	- Melaksanakan pelatihan bagi tenaga penyuluh , pembimbing, mubaligh bagi pemuka agama					
	- Pengembangan wawasan dan pendalaman materi bagi pendidik dan tenaga kependidikan agama dan keagamaan					
2	Program : Peningkatan Pelayanan dan Pemahaman Kehidupan Beragama	Program : Peningkatan Pelayanan dan Pemahaman Kehidupan Beragama				
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :				
	- Pemberian bantuan pembangunan dan rehabilitasi tempat ibadah	- Dukungan Penyelenggaraan MTQ dan STQ	Meningkatnya aktifitas ibadah masyarakat	Bag. Kesra Sekretariat Daerah	130.000.000	
	- Meningkatkan fungsi dan peran tempat ibadah	- Pemantapan Program Kembali ke Surau	Meningkatnya aktifitas ibadah masyarakat	Bag. Kesra Sekretariat Daerah	50.000.000	

- Meningkatkan mutu pembinaan, pelayanan, jemaah haji	- Peningkatan Kerjasama Lintas terakit dan Masyarakat untuk Pemberantasan Pekat	Meningkatnya aktifitas ibadah masyarakat	Bag. Kesra Sekretariat Daerah		50.000.000
- Meningkatkan pelayanan pengelolaan zakat, wakaf serta ibadah sosial	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Keagamaan	Meningkatnya aktifitas ibadah masyarakat	Bag. Kesra Sekretariat Daerah	100.000.000	
- Memberdayakan lembaga-lembaga sosial keagamaan	- Sosialisasi fungsi BAZ	Meningkatnya aktifitas ibadah masyarakat	Bag. Kesra Sekretariat Daerah	10.000.000	
Jumlah				585.000.000	50.000.000

0

MATRIK PENINGKATAN, PEMAHAMAN, PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN NILAI-NILAI ADAT DAN BUDAYA DAERAH

No	Program/Kegiatan Pokok dalam RPJM 2006-2010	Program/Kegiatan Pokok dalam RKPD 2007	Sasaran Program Tahun 2007	Instansi Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp)		
					APBD II	APBD I	APBN
1	Program : Peningkatan	Program : Peningkatan					
	Indikasi Kegiatan :	Kegiatan :					
	- Pengembangan pola partisipatif pembangunan nagari	- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong	Meningkatnya aktifitas Masyarakat	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	25.000.000		
	- Pemberdayaan lembaga-lembaga sosial di nagari	- Pelatihan, Pengembangan dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya Minangkabau	Meningkatnya aktifitas Masyarakat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	13.619.225		
	- Pemberdayaan lembaga-lembaga ekonomi di nagari						
	- Pelaksanaan lomba-lomba di tingkat nagari						
	- Mendorong peran serta masyarakat perantau dalam berbagai aktivitas pembangunan di nagari						
	Jumlah				38.619.225	0	0